

Dr. St. Halimang, M.HI

Bildung

# PENDIDIKAN ANTI KORUPSI

Pendekatan Hukum di Indonesia



PENDIDIKAN ANTI-KORUPSI  
PENDEKATAN HUKUM DI  
INDONESIA



Dr. St. Halimang, M.HI

**Bildung** 

# **PENDIDIKAN ANTI KORUPSI**

**Pendekatan Hukum di Indonesia**

Copy right ©2020, Dr. St. Halimang, M. HI  
*All rights reserved*

**PENDIDIKAN ANTI-KORUPSI  
PENDEKATAN HUKUM DI INDONESIA**

Dr. St. Halimang, M. HI

Editor: Asnawan  
Desain Sampul: Ruhtata  
Lay out/tata letak Isi: Tim Redaksi Bildung

Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT)  
Pendidikan Anti-Korupsi Pendekatan Hukum di Indonesia/Dr. St.  
Halimang, M. HI/Yogyakarta: CV. Bildung Nusantara, 2020

x + 176 halaman; 14,5 x 21 cm  
ISBN: 978-623-6658-23-9

Cetakan Pertama: 2020

Penerbit:  
**BILDUNG**  
Jl. Raya Pleret KM 2  
Banguntapan Bantul Yogyakarta 55791  
Telpn: +6281227475754 (HP/WA)  
Email: [bildungpustakautama@gmail.com](mailto:bildungpustakautama@gmail.com)  
Website: [www.penerbitbildung.com](http://www.penerbitbildung.com)

Anggota IKAPI

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku tanpa seizin tertulis dari Penerbit.



## PENGANTAR PENULIS

*Bismillah ar-Rahman ar-Rahim*

Puji syukur kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan taufiq dan hidayah-Nya kepada manusia dengan menanamkan keislaman dan keimanan didalam hati makhluk-Nya, sehingga dapat membedakan antara yang haq dan yang batil serta dapat melaksanakan kewajiban sehari-hari sebagai umat bergama.

Selanjutnya, shalawat serta salam semoga senantiasa mengalir deras keharibaan baginda Rasul Muhammad SAW, yang telah membawa umat manusia dari kelamnya alam kejahiliaan menuju terangnya dunia ilmu pengetahuan dengan adanya iman dan islam.

*Alhamdulillah*, buku yang berjudul *Pendidikan Anti-Korupsi Pendekatan Hukum di Indonesia* dapat diselesaikan. Sesuai dengan judulnya, bahwa buku ini disusun tidak berangkat dari hal yang kosong, melainkan berangkat dari kesenjangan sosial pendidikan yang sangat marak dengan kasus-kasus korupsi baik dalam lembaga pendidikan, kalangan elit atas sampai dengan masyarakat lokal. Seperti yang kita ketahui Korupsi di tanah negeri kita, ibarat “warisan haram” tanpa

surat wasiat. Ia tetap lestari sekalipun diharamkan oleh aturan hukum yang berlaku dalam tiap orde yang datang silih berganti. Hampir semua segi kehidupan terjangkit korupsi. Apabila disederhanakan penyebab korupsi meliputi dua faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal merupakan penyebab korupsi yang datang dari diri pribadi sedang faktor eksternal adalah faktor penyebab terjadinya korupsi karena sebab-sebab dari luar.

Faktor internal terdiri dari aspek moral, misalnya lemahnya keimanan, kejujuran, rasa malu, aspek sikap atau perilaku misalnya pola hidup konsumtif dan aspek sosial seperti keluarga yang dapat mendorong seseorang untuk berperilaku korupsi. Faktor eksternal bisa dilacak dari aspek ekonomi misalnya pendapatan atau gaji tidak mencukupi kebutuhan, aspek politis misalnya instabilitas politik, kepentingan politis, meraih dan mempertahankan kekuasaan, aspek manajemen & organisasi yaitu ketiadaan akuntabilitas dan transparansi, aspek hukum, terlihat dalam buruknya wujud perundang-undangan dan lemahnya penegakkan hukum serta aspek sosial yaitu lingkungan atau masyarakat yang kurang mendukung perilaku anti-korupsi.

Ketika korupsi sudah menjadi bagian dalam kehidupan sosial masyarakat, yang terjadi selanjutnya adalah korupsi menjadi penopang dalam setiap pengambilan keputusan. Pada masyarakat yang korupsi, tidak ada lagi istilah halal dan haram ataupun baik dan buruk. Yang ada adalah bagaimana sesuatu yang dilakukan berhasil dan sesuai dengan keinginan meskipun bertabrakan dengan norma-norma luhur yang berkembang dalam masyarakat. Sehingga banyak orang yang mau merendahkan diri sendiri.

Untuk itu dari berbagai pandangan dan data autentik harus dijadikan sebuah refleksi untuk kita, agar korupsi semakin lama tidak semakin merajalela. Sehingga perlu adanya sebuah kesadaran diri untuk tidak melakukan tindak korupsi yang sangat merugikan orang lain. Dan kejujuran yang seharusnya mejadi kebiasaan dalam melakukan berbagai hal.

Terima kasih kami sampaikan kepada para kolega diskusi yang selalu ada untuk selalu giat dalam merespon perkembangan isu-isu hukum.

Makassar, 17 September 2020

**Dr. St. Halimang, M.HI**







## DAFTAR ISI

Pengantar Penulis \_\_v

Daftar Isi \_\_ix

### **BAB I PENDAHULUAN \_\_1**

### **BAB II SEJARAH KORUPSI DAN PEMBERANTASANNYA \_\_4**

A. Asal Muasal Korupsi di Indonesia \_\_4

B. Sejarah Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi \_\_15

### **BAB III PENDIDIKAN ANTI-KORUPSI \_\_36**

A. Pengertian Korupsi \_\_36

B. Penyebab Korupsi \_\_43

C. Dampak Korupsi \_\_53

D. Apa itu Pendidikan Anti-Korupsi? \_\_77

E. Urgensi Pendidikan Anti-Korupsi \_\_83

F. Upaya Pemberantasan Korupsi \_\_104

**BAB IV ANATOMI TINDAK PIDANA KORUPSI \_\_126**

A. Jenis dan Tipologi Korupsi \_\_126

B. Modus Operandi Korupsi \_\_134

**BAB V HUKUM-HUKUM TINDAK PIDANA  
KORUPSI \_\_137**

A. Pengaturan Tindak Pidana Korupsi dalam Sistem  
Hukum Pidana di Indonesia \_\_137

B. Korupsi dalam Konsep Hukum Formal \_\_142

C. Korupsi dalam Hukum Materiil \_\_144

D. Peraturan Perundang-Undangan Tindak Pidana  
Korupsi Nasional \_\_147

E. Penjatuan Pidana Pada Perkara Tindak Pidana  
Korupsi \_\_151

**BAB VI KONSEP DAN HUKUMAN KORUPSI  
DALAM PERSPEKTIF ALQURAN \_\_156**

A. Konsep Hukum Pidana Islam \_\_156

B. Prinsip-prinsip Keadilan \_\_161

C. Hukuman Korupsi dalam Alquran \_\_163

**BAB VII PENUTUP \_\_168**

Daftar Pustaka \_\_170

Tentang Penulis \_\_174



## BAB I PENDAHULUAN

PERKEMBANGAN PERADABAN dunia semakin sehari seakan-akan berlari menuju modernisasi. Perkembangan yang selalu membawa perubahan dalam setiap sendi kehidupan tampak lebih nyata. Seiring dengan itu pula bentuk-bentuk kejahatan juga senantiasa mengikuti perkembangan jaman dan bertransformasi dalam bentuk-bentuk yang semakin canggih dan beranekaragam. Kejahatan dalam bidang teknologi dan ilmu pengetahuan senantiasa turut mengikutinya. Kejahatan masa kini memang tidak lagi selalu menggunakan cara-cara lama yang telah terjadi selama bertahun-tahun seiring dengan perjalanan usia bumi ini. Bisa kita lihat contohnya seperti, kejahatan dunia maya (*cybercrime*), tindak pidana pencucian uang (*money laundering*), tindak pidana korupsi dan tindak pidana lainnya.

Salah satu tindak pidana yang menjadi musuh seluruh bangsa di dunia ini. Sesungguhnya fenomena korupsi sudah ada di masyarakat sejak lama, tetapi baru menarik perhatian dunia sejak perang dunia kedua berakhir. Di Indonesia sendiri fenomena korupsi ini sudah ada sejak Indonesia belum

merdeka. Salah satu bukti yang menunjukkan bahwa korupsi sudah ada dalam masyarakat Indonesia jaman penjajahan yaitu dengan adanya tradisi memberikan upeti oleh beberapa golongan masyarakat kepada penguasa setempat. Korupsi masih mentradisi setelah Indonesia Merdeka baik di era Orde Lama, Orde Baru hingga era Reformasi. Berbagai Upaya telah dilakukan untuk membrantas Korupsi, namun hasilnya masih jauh panggang dari api, seperti halnya pembentukan badan pemberantasan korupsi dari era Orde Lama sampai era Reformasi seperti Ran, Opera Budhi, TPK, KPKPN, TGPTPK, dan KPK hingga sekarang yang masih eksis.

Melihat sejarah korupsi yang ada, Korupsi adalah hal yang merugikan baik bagi rakyat dan negara hal ini bisa dilihat dari beberapa kasus yang ada mulai dari Pra kemerdekaan hingga era Reformasi. Dalam berbagai pandangan baik secara Hukum dan agama yang namanya korupsi adalah suatu tindakan pidana. Dalam Perspektif hukum memandang bahwa korupsi merupakan kejahatan (*crime*), koruptor adalah penjahat dan oleh karenanya yang harus dilakukan oleh pemerintah adalah menindak para koruptor dengan jerat-jerat hukum serta memberantas korupsi dengan memperkuat perangkat hukum seperti Undang-Undang dan Aparat hukum. Perspektif agama memandang bahwa korupsi terjadi sebagai dampak dari lemahnya nilai-nilai agama dalam diri individu, dan oleh karenanya upaya yang harus dilakukan adalah memperkuat internalisasi nilai-nilai keagamaan dalam diri individu dan masyarakat untuk mencegah tindak korupsi kecil (*petty corruption*), apalagi korupsi besar (*grand corruption*). Dalam pandangan ini, Alquran dan hadis harus menjadi acuan yang sakral.

Memberantas korupsi memang bukanlah pekerjaan yang gampang, memerlukan proses berlanjut yang harus dilaksanakan secara konsisten. Begitu berbahayanya korupsi, maka tidak ada jalan lain kecuali semua pihak Negara menghentikan tindak korupsi tersebut. Harus dimulai gerakan memutus mata korupsi sejak usia dini melalui pendidikan. Pendek kata, korupsi harus mulai diberangus dari akar-akarnya melalui pendidikan, khususnya pendidikan anti-korupsi.

Pendidikan anti-korupsi bukan cuma berputar pada pemberian wawasan dan pemahaman saja. Tetapi diharapkan dapat menyentuh pada ranah avektif dan psikomotorik, yakni membentuk sikap dan perilaku anti-korupsi pada anak didik. Pengajaran pendidikan anti-korupsi hendaknya menggunakan pendekatan yang bersifat terbuka, dialogis dan dikuratif sehingga mampu merangsang kemampuan intelektual anak didik dalam membentuk rasa keingintahuan, sikap kritis dan berani berpendapat.



## **BAB II**

# **SEJARAH KORUPSI DAN PEMBERANTASANNYA**

### **A. Asal Muasal Korupsi Di Indonesia**

KORUPSI DI INDONESIA sudah ‘membudaya’ sejak dulu, sebelum dan sesudah kemerdekaan, di era Orde Lama, Orde Baru, berlanjut hingga era Reformasi. Berbagai upaya telah dilakukan untuk memberantas korupsi, namun hasilnya masih jauh panggang dari api. Dilacak ke belakang, fenomena mengguritnya korupsi di Indonesia bermula dari perilaku bangsa kolonial yang amat lama menjajah kita. Pada masa kolonialisme, para penjajah dengan politik *divide et impera*-nya (adu domba) melakukan pembusukan terhadap moral bangsa dengan menjalankan perselingkuhan politik dan wanita bersama penguasa daerah dan kerajaan.<sup>1</sup> Dengan wadah VOC, mereka tidak segan-segan mendukung sekelompok orang yang ingin mendongkel sebuah kekuasaan resmi, asal mendapat keuntungan politik dan materi. Kasus pecahnya kerajaan mataram menjadi kerajaan kartasura,

---

<sup>1</sup> Kompas, *Jihat melawan Korupsi*, (Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2005), hal.108.

Yogyakarta, serta Surakarta adalah bentuk campur tangan yang dilakukan kolonial terhadap tatanan bangsa ini.

Sejarah sebelum Indonesia merdeka sudah diwarnai oleh “budaya-tradisi korupsi” yang tiada henti karena didorong oleh motif kekuasaan, kekayaan dan wanita. Kita dapat menyirnak bagaimana tradisi korupsi berjaln berkelin dan dengan perebutan kekuasaan di Kerajaan Singosari (sampai tujuh keturunan saling membalas dendam berebut kekuasaan: Anusapati-Tohjoyo-Ranggawuni-Mahesa Wongateleng dan seterusnya), Majapahit (pemberontakan Kutu, Narnbi, Suro dan lain-lain), Demak (Joko Tingkir dengan Haryo Penangsang), Banten (Sultan Haji merebut tahta dari ayahnya, Sultan Ageng Tirtoyoso), perlawanan rakyat terhadap Belanda dan seterusnya sampai terjadinya beberapa kali peralihan kekuasaan di Nusantara telah mewarnai Sejarah Korupsi dan Kekuasaan di Indonesia.

Umumnya para Sejarawan Indonesia belum mengkaji sebab ekonomi mengapa mereka saling berebut kekuasaan. Secara politik memang telah lebih luas dibahas, namun motif ekonomi memperkaya pribadi dan keluarga di antara kaum bangsawan belum tampak di permukaan “Wajah Sejarah Indonesia”.

Sebenarnya kehancuran kerajaan-kerajaan besar (Sriwijaya, Majapahit dan Mataram) adalah karena perilaku korup dari sebagian besar para bangsawannya. Sriwijaya diketahui berakhir karena tidak adanya pengganti atau penerus kerajaan sepeninggal Bala-putra Dewa. Majapahit diketahui hancur karena adanya perang saudara (perang paregreg) sepeninggal Maha Patih Gajah Mada. Sedangkan Mataram lemah dan semakin tidak punya gigi karena dipecah belah dan dipreteli gigi taringnya oleh Belanda.



Pada tahun 1755 dengan Perjanjian Giyanti, VOC memecah Mataram menjadi dua kekuasaan yaitu Kesultanan Yogyakarta dan Kasunanan Surakarta. Kemudian tahun 1757/1758 VOC memecah Kasunanan Surakarta menjadi dua daerah kekuasaan yaitu Kasunanan Surakarta dan Mangkunegaran. Baru pada beberapa tahun kemudian Kasultanan Yogyakarta juga dibagi dua menjadi Kasultanan Yogyakarta dan Pakualaman.

Benar bahwa penyebab pecah dan lemahnya Mataram lebih dikenal karena faktor intervensi dari luar, yaitu campur tangan VOC di lingkungan Kerajaan Mataram. Namun apakah sudah adayang meneliti bahwa penyebab utama mudahnya bangsa asing (Belanda) mampu menjajahIndonesia sekitar 350 tahun (versi Sejarah Nasional), lebih karena perilaku elit bangsawan yang korup, lebih suka memperkaya pribadi dan keluarga, kurang mengutamakan aspek pendidikan moral, kurang memperhatikan “*character building*”, mengabaikan hukum apalagi demokrasi. Terlebih lagi sebagianbesar penduduk di Nusantara tergolong miskin, mudah dihasut provokasi atau mudah termakan isu dan yang lebih parah mudah diadu domba.

Belanda memahami betul akar “budaya korup” yang tumbuh subur pada bangsa Indonesia, maka melalui politik “*Devide et Impera*” mereka dengan mudah menaklukkan Nusantara. Namun, bagaimanapun juga Sejarah Nusantara dengan adanya intervensi dan penetrasi Barat, rupanya tidak jauh lebih parah dan penuh tindak kecurangan, perebutan kekuasaan yang tiada berakhir, serta “berintegrasi” seperti sekarang. Gejala korupsi dan penyimpangan kekuasaan pada waktu itu masih didominasi oleh kalangan bangsawan,sultan

dan raja, sedangkan rakyat kecil nyaris “belum mengenal” atau belum memahaminya.

Perilaku “korup” bukan hanya didominasi oleh masyarakat Nusantara saja, rupanya orang-orang Portugis, Spanyol dan Belanda pun gemar “mengkorup” harta-harta Korpsnya, institusi atau pemerintahannya. Kita pun tahu kalau penyebab hancur dan runtuhnya VOC juga karena korupsi. Lebihdari 200 orang pengumpul *Liverantie* dan *Contingenten* di Batavia kedapatan korup dan dipulangkan ke negeri Belanda. Lebih dari ratusan bahkan kalau diperkirakan termasuk yang belum diketahui oleh pimpinan Belanda hampir mencapai ribuan orang Belanda juga gemar korup.

Dalam buku *History of Java* karya Thomas Stanford Raffles (Gubernur Jenderal Inggris yang memerintah Pulau Jawa tahun 1811-1816), terbit pertama tahun 1816 mendapat sambutan yang “luar biasa” baik di kalangan bangsawan lokal atau pribumi Jawa maupun bangsa Barat. Buku tersebut sangat luas memaparkan aspek budaya meliputi situasi geografi, nama-nama daerah, pelabuhan, gunung, sungai, danau, iklim, kandungan mineral, flora dan fauna, karakter dan komposisi penduduk, pengaruh budaya asing dan lain-lain.

Hal menarik dalam buku itu adalah pembahasan seputar karakter penduduk Jawa. Penduduk Jawa digambarkan sangat “nrimo” atau pasrah terhadap keadaan. Namun, di pihak lain, mempunyai keinginan untuk lebih dihargai oleh orang lain. Tidak terus terang, suka menyembunyikan persoalan, dan termasuk mengambil sesuatu keuntungan atau kesempatan dikala orang lain tidak mengetahui.

Hal menarik lainnya adalah adanya bangsawan yang gemar menumpuk harta, memelihara sanak (abdi dalem) yang pada umumnya abdi dalem lebih suka mendapat atau mencari perhatian majikannya. Akibatnya, abdi dalem lebih suka mencari muka atau berperilaku oportunistis. Dalam kalangan elit kerajaan, raja lebih suka disanjung, dihormati, dihargai dan tidak suka menerima kritik dan saran. Kritik dan saranyang disampaikan di muka umum lebih dipandang sebagai tantangan atau perlawanan terhadap kekuasaannya. Oleh karena itu budaya kekuasaan di Nusantara (khususnya Jawa) cenderung otoriter. Dalam aspek ekonomi, raja dan lingkaran kaum bangsawan mendominasi sumber-sumber ekonomi di masyarakat. Rakyat umumnya “dibiarkan” miskin, tertindas, tunduk dan harus menuruti apa kata, kemauan atau kehendak “penguasa”.

Budaya yang sangat tertutup dan penuh “keculasan” itu turut menyuburkan “budaya korupsi” di Nusantara. Tidak jarang abdi dalem juga melakukan “korup” dalam mengambil “upeti” (pajak)dari rakyat yang akan diserahkan kepada Demang (Lurah) selanjutnya oleh Demang akan diserahkan kepada Turnenggung. Abdidalem di Katemenggungan setingkat kabupaten atau provinsi juga mengkorup (walaupun sedikit) hartayang akan diserahkan kepada Raja atau Sultan.

Alasan mereka dapat mengkorup, karena satuan hitung belum ada yang standar, di samping rincian barang-barang yang pantas dikenai pajak juga masih kabur. Sebagai contoh, upeti dikenakan untuk hasil-hasil pertanian seperti Kelapa, Padi, dan Kopi. Namun ukuran dan standar upeti di beberapa daerah juga berbeda-beda baik satuan barang, volume dan beratnya, apalagi harganya. Beberapa alasan itulah yang mendorong atau menyebabkan para pengumpul pajak

cenderung berperilaku “memaksa” rakyat kecil, di pihak lain menambah “beban” kewajiban rakyat terhadap jenis atau volume komoditi yang harus diserahkan.

Kebiasaan mengambil “upeti” dari rakyat kecil yang dilakukan oleh Raja Jawa ditiru oleh Belanda ketika menguasai Nusantara (1800 - 1942) minus Zaman Inggris (1811 - 1816). Akibat kebijakan itulah banyak terjadi perlawanan-perlawanan rakyat terhadap Belanda. Sebut saja misalnya perlawanan Diponegoro (1825 -1830), Imam Bonjol (1821 - 1837), Aceh (1873 - 1904) dan lain-lain. Namun, yang lebih menyedihkan lagi yaitu penindasan atas penduduk pribumi (rakyat Indonesia yang terjajah) juga dilakukan oleh bangsa Indonesia sendiri. Sebut saja misalnya kasus penyelewengan pada pelaksanaan Sistem “Cultuur Stelsel (CS)” yang secara harfiah berarti Sistem Pembudayaan. Walaupun tujuan utama sistem itu adalah membudayakan tanaman produktif di masyarakat agar hasilnya mampu untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan memberi kontribusi ke kas Belanda, namun kenyataannya justru sangat memprihatinkan.

Isi peraturan (teori atau bunyi hukumnya) dalam CS sebenarnya sangat “manusiawi” dan sangat “beradab”, namun pelaksanaan atau praktiknya lah yang sangat tidak manusiawi, mirip Dwang Stelsel (DS), yang artinya “Sistem Pemaksaan”. Itu sebabnya mengapa sebagian besar pengajar, guru atau dosen sejarah di Indonesia mengganti sebutan CS menjadi DS. mengganti ungkapan “Sistem Pembudayaan” menjadi “Tanam Paksa”.

Seperti apakah bentuk-bentuk pelanggaran CS tersebut? Beberapa di antaranya adalah sebagai berikut:<sup>2</sup>

<sup>2</sup> Maulan Nusantara, *Sejarah Korupsi di Indonesia*, dalam <http://maulanusantara.wordpress.com/2009/12/09/sejarah-korupsi-di-indonesia/>

1. Penduduk diwajibkan menanam 1/5 dari tanah miliknya dengan tanaman yang laku dijual di pasar internasional (Kopi, Tembakau, Cengkeh, Kina, Tebu dan boleh juga Padi, bukan seperti sebelumnya yang lebih suka ditanam penduduk yaitu pete, jengkol, sayur-sayuran, padi dan lain-lain). Namun praktiknya ada yang dipaksa oleh “Belanda Item” (orang Indonesia yang bekerja untuk Belanda) menjadi 2/5, 4/5 dan ada yang seluruh lahan ditanami dengan tanaman kesukaan Belanda.
2. Tanah yang ditanami tersebut (1/5) tidak dipungut pajak, namun dalam praktiknya penduduk tetap diwajibkan membayar (meskipun yang sering meng-korup belum tentu Belanda).
3. Penduduk yang tidak mempunyai tanah diwajibkan bekerja di perkebunan atau perusahaan Belanda selama umur padi (3,5 bulan). Namun, praktiknya ada yang sampai 1 tahun, 5 tahun, 10 tahun dan bahkan ada yang sampai mati. Jika ada yang tertangkap karena berani melarikan diri maka akan mendapat hukuman cambuk (*poenali sanksi*).
4. Jika panen gagal akibat bencana alam (banjir, tanah longsor, gempa bumi) maka segala kerugian akan ditanggung pemerintah. Namun praktik di lapangan, penduduk tetap menanggung beban itu yang diperhitungkan pada tahun berikutnya.
5. Jika terjadi kelebihan hasil produksi (*over product*) dan melebihi kuota, maka kelebihannya akan dikembalikan kepada penduduk. Namun praktiknya dimakan oleh “Belanda Item” atau para pengumpul.

Proklamasi kemerdekaan dijadikan momentum kebangkitan bangsa dari segala bentuk penindasan ternyata masih

mengawetkan tradisi bangsa kolonial yang suka melakukan korupsi, kolusi, bahkan selingkuh. Ada pejabat pemerintah yang memanfaatkan situasi darurat revolusi untuk mengembangkan perdangan ilegal yang digunakan untuk menambah kesejahteraan kelompoknya.<sup>3</sup>

Rezim Orde Lama (1945-1966) dipimpin oleh oligarki Soekarno. Selama demokrasi terpimpin berlangsung, sangat sedikit terdengar selentingan suara adanya korupsi. Bukan berarti tidak ada sama sekali perbuatan buruk ini. Banyak indikator yang menunjukkan kearah pembenaran adanya korupsi masa itu, di antaranya merosotnya nilai tukar rupiah, banyak perusahaan dipimpin kalangan militer dan pemerintah sangat mencampuri urusan ekonomi rakyat. Namun, karena tidak ada yang berani mengungkapkan, pers dikontrol ketat, pejabat dan pegawai sipil berlindung dalam kekuasaan Soekarno, maka pemberitaan mengenai korupsi cenderung sayup-sayup tidak terdengar.

Perbuatan korupsi dilingkarkan pemerintahan Soekarno mencuat pada tahun 1955-an masa kabinet Ali Sastroamidjojo, salah satu tokoh Partai Nasional Indonesia. Ditemukan surat kritik saran Dr. Halim yang ditujukan kepada Presiden Soekarno tentang gejala korupsi yang melanda Indonesia. Isi surat itu pada intinya menuturkan adanya gejala yang menunjukan para pegawai rendah melakukan korupsi disebabkan gajinya kecil. Selama dua tahun kabinet Ali I, volume tindakan korupsi dikalangan pegawai negeri dan politisi meningkat secara tajam. Tindakan korupsi muncul karena inflasi tinggi yang tidak diimbangi dengan kenaikan gaji, sehingga pendapatan mereka berkurang, akibatnya dalam hitungan dua minggu gaji yang baru saja diterima

---

3 Kompas, *Jihat melawan Korupsi*, hal.109.

habis. Cara terbaik untuk menutupi kekurangan kebutuhan dapur itu adalah korupsi.

Pada masa kabinet Burhanuddin (Agustus 1965-1966), seorang tokoh Masyumi, melakukan pemberantasan korupsi dengan menahan mantan menteri kehakiman Ali I, yaitu Djody Gondokusumo karena dicurigai korupsi. Pada masa pemerintahan Burhanuddin Harahap, rancangan Undang-Undang Anti-korupsi sudah disusun. Dengan Undang-Undang ini, banyak pejabat dikalangan kabinet Burhanuddin ditangkap dan dipenjarakan. Umumnya mereka yang ditangkap dari kalangan partai politik penguasa.

Pada masa kabinet Ali II (Kabinet Ali-Roem-Idham) tindakan korupsi dikalangan anggota kabinet makin membengkak. Menteri Kehakiman Prof. Mulyatno, meneruskan rancangan Undang-Undang anti-korupsi yang dirintis Menteri Kehakiman sebelumnya, Lukman Wiradinata. Realisasi dari Undang-Undang tersebut adalah menangkap pejabat yang diduga korupsi, di antaranya Han Swie Tik dan rekannya Lie Hok Thay, Wakil direktur perusahaan uang negara. Begitu juga Menteri Luar Negeri Roeslan Abdul Ghani ditangkap Letkol. Kaliwarang, Panglima Divisi Siliwangi atas tuduhan korupsi ongkos cetak kartu suara pemilu, yang melibatkan Lie Hok Thay. Langkah pemberantasan kasus-kasus korupsi pada masa itu didukung oleh media terkemuka *Indonesia Raya* pimpinan Mochtar Lubis dan *Pedoman* pimpinan Rosihan Anwar. Dalam kampanye anti-korupsi ini terjalin kerja sama erat antara angkatan bersenjata dan pers. Namun dua pimpinan pers tersebut ditangkap dan dipenjarakan pada 1961, karena dituduh melawan kehendak politik Soekarno.

Setelah Soekarno lengser dari kursi kepresidenan sesudah laporan pertanggungjawabannya ditolak sidang parlemen,

Indonesia kemudian dipimpin oleh oligarki Soeharto (Rezim Orde Baru 1967-1998). Transperncy International (24 Maret 2004), sebuah lembaga internasional yang mengadakan riset tentang korupsi di dunia ini, menempatkan penguasa tiran ini pada posisi paling korup di dunia jauh mengungguli koruptor lainnya, dengan jumlah korupsi mencapai US\$ 15-35 miliar, setara Rp 127,5-Rp 297,5 triliun dengan kurs Rp 8.500,- global Corruption Report memberikan hasil riset TI dengan berupaya mengurutkan para koruptor terkemuka di dunia dalam catatannya; Soeharto: US\$ 15-35 miliar (Indonesia, 1967-1998), Ferdinand Marcos: \$ 5-10 miliar (Philippina, 1972-1986), Mobutu Sese Seko: \$ 5 miliar (Zaire, 1965-1997), Sani Abacha: \$ 2-5 miliar (Nigeria, 1993-1998), Slobodan Milosevic: \$ 1 miliar (Yugoslavia, 1989-2000), J.C Duvalier: \$ 300-800 juta (Haiti, 1971-1986), Alberto Fujimori: \$ 600 juta (Peru, 1990-2000). Dari data ini disimpulkan bahwa korupsi Soeharto Berjumlah antara US \$ 15-35 miliar.

Menurut Goerge Junus Aditjondro peluang Soeharto untuk melakukan korupsi sangat besar. Selama 32 tahun, ia telah berhasil membangun tiga kekuasaan oligarkinya. Kaki pertama oligarki Soeharto adalah *istana*. Istana presiden tidak hanya didiami keluarga Presiden, melainkan juga keluarga besar Presiden, meliputi kerabat dan keluarga besar yang tinggal diluar istana. Oligarki kedua Soeharto adalah “tangsi”, merupakan lingkaran pelindung pertama dari istana. Tangsi di sini terdiri dari komunitas militer dan politis dari para purnawirawan, perwira tinggi sampai para prajurit, yang bertugas memelihara kepentingan modal besar. Oligarki ketiga adalah *partai penguasa*, dimainkan oleh partai Golongan Karya. Kaki ketiga merupakan benteng pelindung kedua bagi bisnis lingkaran istana, yang sekaligus berfungsi menyamarkan



keberpihakan pada serdadu dalam melindungi kepentingan bisnis keluarga istana.

Setelah Soeharto jatuh pada tahun 1998, kemudian digantikan B.J. Habibie sebuah awal rezim orde reformasi (1998-2009) ketua MPR-RI Amien Rais kala menjabat menetapkan perlunya kejaksaan agung mengusut tuntas kasus-kasus korupsi, terutama tujuh yayasan yang paling bermasalah, yakni yayasan Dakab, Dharmais, Dana Sejahtera Mandiri, Trikora, Amal Bakti Muslim Pancasila, Gotong Royong Kemanusiaan dan Yayasan Supersemar. Tujuh yayasan ini diduga meraup uang rakyat 5 triliun rupiah.

Lewat pintu sidang istimewa MPR-RI tampuk kekuasaan dilanjutkan Abdurrahman Wahid (Gus Dur). Dalam menangani korupsi, Abdurrahman Wahid membentuk Tim Gabungan Pemberantas Tindak Pidana Korupsi (TGPTPK) dipimpin Hakim Agung Andi Andoyo. Namun dari hasil Judicial review Mahkamah Agung, TGPTPK dibubarkan begitu saja. Potret Indonesia pada masa rezim Gus Dur mengalami kemunduran terutama dalam pemberantasan korupsi. Malah pada detik-detik akhir masa jabatannya, Gus Dur sendiri didera kasus *brunaigate* dan *uloggfate* yang menjadi bola panas yang menggelinding kearah Gus Dur. Akhirnya Gus Dur harus mengakui kekuatan parlemen dan menyerahkan kekuasaan kepada Megawati.

Rezim penguasa Megawati hampir sama dengan rezim Gus Dur. Belum ada perubahan iklim dalam penanganan tindak pidana korupsi. Malah sebagian menteri dikabinetnya mencari celah kosong agar bisa meraup uang rakyat. Asumsi ini makin jelas ketika sosok Mega tergusur dalam pemilihan umum secara langsung. Sejumlah menteri terlibat kasus korupsi, salah satu di antaranya Menteri Agama Said Agil

Husein Al-Munawwar, diseret secara paksa ke pengadilan. Laksaman Sukardi Meneg BUMN, terlibat dalam penjualan sejumlah aset negara (kapal tangker milik Pertamina). Kelihatan elite politik dalam pemerintahan Mega, tidak serius menangani korupsi, kolusi dan nepotisme. Lagi-lagi Orde Reformasi terganjal kebijakan pemerintahan yang tidak tepat dan tidak berwibawa. Lembaga peradilan yang seharusnya menjadi ujung tombak upaya pemberantasan korupsi, justru dinilai sebagai lembaga paling korup.

Upaya Orde Reformasi menumpas korupsi, baru menguat Susilo Bambang Yudoyono menduduki kursi kepresidenan. Setelah memegang tampuk kekuasaan, prioritas SBY-Kalla adalah melanjutkan dan menuntaskan kasus korupsi yang disebabkan kekuasaan politik pemerintahan masa lalu, di antaranya yang melibatkan penguasa Orde Baru, Soeharto.

## **B. Sejarah Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi**

Sejarah pemberantasan korupsi yang cukup panjang di Indonesia menunjukkan bahwa pemberantasan tindak pidana korupsi memang membutuhkan penanganan yang ekstra keras dan membutuhkan kemauan politik yang sangat besar dan serius dari pemerintah yang berkuasa. Politik pemberantasan korupsi itu sendiri tercermin dari peraturan perUndang-Undangan yang dilahirkan pada periode pemerintahan tertentu. Lahirnya Undang-Undang yang secara khusus mengatur mengenai pemberantasan tindak pidana korupsi sesungguhnya tidaklah cukup untuk menunjukkan keseriusan atau komitmen pemerintah. Perlu lebih dari sekadar melahirkan suatu peraturan perUndang-Undangan, yaitu menerapkan ketentuan yang diatur di dalam Undang-Undang dengan cara mendorong aparat penegak hukum yang berwenang untuk memberantas korupsi dengan

cara-cara yang tegas, berani, dan tidak pandang bulu.

Keberadaan Undang-Undang pemberantasan korupsi hanyalah satu dari sekian banyak upaya memberantas korupsi dengan sungguh-sungguh. Di samping peraturan perUndang-Undangan yang kuat, juga diperlukan kesadaran masyarakat dalam memberantas korupsi. Kesadaran masyarakat hanya dapat timbul apabila masyarakat mempunyai pengetahuan dan pemahaman akan hakikat tindak pidana korupsi yang diatur dalam Undang-Undang. Untuk itu sosialisasi Undang-Undang pemberantasan tindak pidana korupsi, khususnya mengenai delik korupsi yang diatur di dalamnya, perlu terus dilakukan secara simultan dan konsisten. Pengetahuan masyarakat akan delik korupsi mutlak diperlukan mengingat ketidaktahuan akan adanya peraturan perUndang-Undangan tidak dapat dijadikan alasan untuk menghindar dari tanggungjawab hukum.

Berbagai upaya pemberantasan korupsi dilakukan oleh pemerintah sejak kemerdekaan, baik dengan menggunakan peraturan perUndang-Undangan yang ada maupun dengan membentuk peraturan perUndang-Undangan baru yang secara khusus mengatur mengenai pemberantasan tindak pidana korupsi. Di antara peraturan perUndang-Undangan yang pernah digunakan untuk memberantas tindak pidana korupsi adalah: Tindak pidana korupsi bukan merupakan barang baru di Indonesia. Sejak jaman kerajaan-kerajaan terdahulu, korupsi telah terjadi meski tidak secara khusus menggunakan istilah korupsi. Setelah jaman kemerdekaan, ketika Indonesia mulai membangun dan mengisi kemerdekaan, korupsi terus mengganas sehingga mengganggu jalannya pembangunan nasional.<sup>4</sup>

<sup>4</sup> Tim Penulis, *Pendidikan Anti-Korupsi Untuk Perguruan Tinggi*, (Jakarta: Kemendibud, 2011), hal.121.

Gerakan pembarantasan korupsi sudah dimulai sejak adanya produk hukum anti-korupsi yang diterbitkan penguasa militer Angkatan Darat dan Angkatan Laut tahun 1957 dengan nama Peraturan Penguasa Militer Nomor PRT/PM/06/1957. Bahkan, jaksa Agung Soeprato (1950-1959) berani melakukan langkah besar dengan memeriksa menteri dan tokoh-tokoh kunci partai politik besar terindikasi melakukan korupsi.<sup>5</sup> Tidak hanya itu, di dalam tubuh militer, pada 1958 Kepala Staf Angkatan Darat A.H. Nasution melakukan pembersihan di tubuh Angkatan Darat dengan memutasikan sejumlah Panglima Daerah yang diduga korupsi.

Pada masa ini Orde Lama sebenarnya telah dibentuk sebuah badan yang khusus menangani masalah korupsi ini. Dibentuklah Panitia Retooling Aparatur Negara atau disingkat *Paran*. Badan ini dipimpin Oleh A.H. Nasution dan dibantu oleh dua orang anggota, yakni Profesor M. Yamin dan Roeslan Abdulgani.<sup>6</sup> Kepada *Paran* inilah semua pejabat harus menyampaikan data dirinya dalam bentuk isian formulir yang telah disediakan. Namun hal ini mendapat reaksi keras dari kalangan pejabat terutama bagi mereka yang korup. Dengan doktrin pertanggungjawaban secara langsung kepada presiden. *Paran* akhirnya bubar dan menyerahkan kembali pelaksanaan tugasnya Kepada Djuanda.

Gerakan pembrantasan korupsi yang dilakukan pada periode 1950-an mengalami kemunduran sepanjang kekuasaan Orde Lama. Di era 1960-an, pertentangan antara kaum kiri dan kanan semakin tajam. Yang berhaluan kiri

<sup>5</sup> Wijayanto dan Ridwan Zachrie, *Korupsi Mengorupsi Indonesia Prespektif Hukum Pembrantasan Korupsi Di Indonesia*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2009), hal.566.

<sup>6</sup> Deni Setyawati, *KPK Pemburu Koruptor*, (Yogyakarta: Pustaka Timur, 2008), hal. 18.

mendapat patronase ekonomi dan politik. Mereka kian terlena oleh praktik korupsi. Di lain pihak, sumber-sumber bisnis dikuasai oleh TNI tetap berjalan dan tidak terkontrol. Kecenderungan politik saat itu kian memperparah kondisi perekonomian negara. Kebocoran dan penyalahgunaan kekuasaan terjadi di sejumlah sektor tanpa terkendali. Hukum disepelekan dan risiko korupsi sangatlah ringan. Bahkan, sepanjang periode ini, demi kepentingan revolusi, Presiden Soekarno dapat mencampuri urusan peradilan.

Pada era 1960-an, yakni pada tahun 1963 juga membentuk kembali sebuah lembaga baru yang dikenal dengan Operasi Budhi. A .H. Nasution ditunjuk kembali menjadi pimpinan lembaga ini dengan dibantu Wiryo Projo Dikusumo. Operasi Budhi memegang tanggung jawab untuk menyeret pelaku korupsi ke pengadilan dengan sasaran utama perusahaan-perusahaan negara serta lembaga-lembaga negara lainnya yang dianggap rawan praktik korupsi. Sama halnya dengan Paran, Operasi Budhi pun mendapat perlawanan yang sangat keras. Lembaga ini pun berakhir dan digantikan oleh Komando Tertinggi Retooling Aparat Revolusi atau disingkat *Kontrar*. *Kontrar* dipimpin langsung oleh Presiden Soekarno dengan dibantu Soebandrio dan Letjen Ahmad Yani. Tumbangnya rezim Orde Lama dan digantikan oleh Orde Baru, Berakhir pula eksistensi *Kontrar*.<sup>7</sup>

Ketika terjadi pergantian kekuasaan dari Soekarno kepada Soeharto muncul sedikit harapan untuk melakukan pemberantasan korupsi. Misalnya, melalui Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 1967 pemerintah membentuk Tim Pembrantasan Korupsi (TPK). Tim ini memiliki dua tugas dan fungsi represif dan preventif dalam pemberantasan

---

<sup>7</sup> Ibid, hal. 19.

korupsi. Berdasarkan hasil penelitian Mahmudin Muslim, tim pemberantasan korupsi mengalami kesulitan melakukan tindakan represif karena kuatnya perekonomian perkoncoan dalam tubuh pemerintah.<sup>8</sup> Tim juga tidak berdaya melakukan tindakan represif jika pelakunya adalah teman seperjuangan semasa menumbangkan Orde Lama. Selain itu, tim juga tidak berdaya menghadapi kasus-kasus korupsi yang melibatkan Orde Baru dan Pejabat ABRI.<sup>9</sup>

Sekalipun pada awal 1970-an pemerintah berhasil menetapkan Undang-Undang Nomor 3 tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU No. 3/1971), harapan pemberantasan korupsi dengan pergantian kekuasaan dari Soekarno ke Soeharto tidak pernah terwujud. Bahkan, keadaan tidak bertambah baik. Baik kehadiran UU No. 3/1971 gagal menghambat nafsu serakah para koruptor. Karenanya, sepanjang kekuasaan Soeharto, istana dan kroninya berubah menjadi rezim kleptokrasi yang menguasai hampir semua sumber ekonomi vital negara.<sup>10</sup>

Ketika Soeharto berhenti, perang melawan korupsi menjadi sebuah keniscayaan. Di era reformasi, usaha pemberantasan korupsi dimulai oleh B.J. Habibie dengan mengeluarkan UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme berikut pembentukan berbagai komisi atau badan baru, seperti Komisi Pengawas Kekayaan Pejabat Negara (KPKPN), KPPU, atau Lembaga Ombudsman. Langkah kearah itu dimulai dengan pembentukan dan pengesahan sejumlah produk

<sup>8</sup> Wijayanto dan Ridwan Zachrie, *Korupsi Mengorupsi Indonesia Prespektif Hukum Pembrantasan Korupsi Di Indonesia*, hal.577.

<sup>9</sup> Mahmudin Muslim, *Jalan Panjang Menuju KPTPK*, Gerakan Rakyat Antikorupsi Indonesia (GERAK): Jakarta.

<sup>10</sup> Wijayanto dan Ridwan Zachrie, *Korupsi Mengorupsi Indonesia Prespektif Hukum Pembrantasan Korupsi Di Indonesia*, hal.568.

hukum. Misalnya, Ketetapan MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang penyelenggara Negara yang Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Kemudian, Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bebas KKN. Di era B.J. Habibie awal rezim orde reformasi (1998-2009) –ketua MPR-RI Amien Rais kala menjabat menetapkan perlunya kejaksaan agung mengusut tuntas kasus-kasus korupsi, terutama tujuh yayasan yang paling bermasalah, yakni yayasan Dakab, Dharmais, Dana Sejahtera Mandiri, Trikora, Amal Bakti Muslim Pancasila, Gotong Royong Kemanusiaan dan Yayasan Supersemar. Tujuh yayasan ini diduga meraup uang rakyat 5 tiliyun rupiah.

Di era Abdurrahman Wahid, membentuk Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (TGPTPK) melalui Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2000. Namun, di tengah semangat menggebu-gebu untuk memberantas korupsi dari anggota tim ini, melalui suatu judicial review Mahkamah Agung, TGPTPK akhirnya dibubarkan dengan logika membenturkannya ke UU Nomor 31 Tahun 1999. Nasib serupa tapi tak sama dialami oleh KPKPN, dengan dibentuknya Komisi Pemberantasan Korupsi, tugas KPKPN melebur masuk ke dalam KPK, sehingga KPKPN sendiri hilang dan menguap. Artinya, KPK-lah lembaga pemberantasan korupsi terbaru yang masih eksis. Dukungan kearah itu tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Korupsi yang terjadi di lembaga penegak hukum (seperti kepolisian dan kejaksaan), disahkan Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Pada era Megawati sebagai Presiden, berdasarkan UU Nomor 30 Tahun 2002 dibentuk Komisi Pemberantasan

Tindak Pidana Korupsi atau Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Komisi superboddy yang memiliki 5 tugas dan 29 wewenang yang luar biasa ini dipimpin oleh Taufiqurahman Ruki, Sirajudin Rasul, Amien Sunaryadi, Erry Riyana Harjapamengkas, Tumpak Hatorang. Belum genap satu tahun berdiri, KPK telah menerima 1.452 laporan masyarakat mengenai praktek korupsi. Sepuluh kasus di antaranya ditindaklanjuti dalam proses penyidikan dan sudah dua kasus korupsi yang berhasil dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor (Abdullah Puteh dan Harun Let Let dan keduanya telah divonis). Kasus korupsi besar yang telah ditangani KPK adalah korupsi yang terjadi di Komisi Pemilihan Umum (KPU). Hasil penyelidikan dan penyidikan KPK berhasil menjebloskan ketua dan anggota KPU serta beberapa pegawai Setjen KPU ke penjara. Meskipun seringkali menuai kritik dari berbagai kalangan namun apa yang telah dilakukan oleh KPK sedikit banyak memberikan harapan bagi upaya penuntasan beberapa kasus korupsi di Indonesia.<sup>11</sup>

Akan tetapi di era Megawati sebagian menteri di kabinetnya mencari celah kosong agar bisa meraup uang rakyat. Asumsi ini makin jelas ketika sosok Mega tergusur dalam pemilihan umum secara langsung. Sejumlah menteri yang terlibat kasus korupsi, salah satu di antaranya Menteri Agama Said Agil Husein Al-Munawwar, diseret secara paksa ke pengadilan. Laksaman Sukardi Meneg BUMN, terlibat dalam penjualan sejumlah aset negara (kapal tangker milik Pertamina). Kelihatan elite politik dalam pemerintahan Mega, tidak serius menangani korupsi, kolusi dan nepotisme. Lagi-lagi Orde Reformasi terganjal kebijakan pemerintahan yang tidak tepat dan tidak berwibawa. Lembaga peradilan yang

---

<sup>11</sup> <http://dangse.wordpress.com/2009/01/17/sejarah-pemberantasan-korupsi-di-indonesia/>



seharusnya menjadi ujung tombak upaya pemberantasan korupsi, justru dinilai sebagai lembaga paling korup.

Upaya Orde Reformasi menumpas korupsi, baru menguat Susilo Bambang Yudoyono menduduki kursi kepresidenan. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), program 100 hari pemerintahannya ditandai dengan pembentukan Tim Pemburu Koruptor yang dipimpin oleh Wakil Jaksa Agung, Basrief Arief di bawah koordinasi Wakil Presiden Jusuf Kalla. Tim yang terdiri dari Kejaksaan dan Kepolisian bertugas memburu terpidana dan tersangka kasus korupsi yang melarikan diri keluar negeri. Meskipun belum terlihat hasil yang telah dicapai, namun Tim Pemburu koruptor diberitakan sudah menurunkan tim ke lima negara, yaitu Singapura, Amerika Serikat, Hongkong, Cina dan Australia. Selain itu Tim pemburu koruptor juga telah mengidentifikasi jumlah aset yang terparkir di luar negeri sebanyak Rp 6-7 triliun.

Selain itu prioritas SBY-Kalla adalah melanjutkan dan menuntaskan kasus korupsi yang disebabkan kekuasaan politik pemerintahan masa lalu, di antaranya yang melibatkan penguasa Orde Baru, Soeharto.

Di samping menyingkap kasus korupsi Soeharto, pemerintah SBY juga menyingkap dan memeriksa berbagai dugaan kasus korupsi, di antaranya, dugaan korupsi dalam Technical Assistance Contract (TAC), antara Pertamina dengan Ustaindo Petro Gas (UPG) tahun 1993 yang meliputi 4 kontrak pengeboran sumur minyak di pendoko, prabulimih, jatibarang, dan bunyu. Jumlah kerugian negara, adalah US\$ 24.8 juta. Energi di masa Orde Baru, Ginandjar Kartasasmita dan Ida Bagus Sudjana, mantan Direktur Pertamina Faisal Abda'oe serta Direktur PT. UPG Partono H Upoyo.

Berikut terbentuknya peraturan-peraturan pembrantasan korupsi;

1. Delik korupsi dalam KUHP.
2. Peraturan Pemberantasan Korupsi Penguasa Perang Pusat Nomor Prt/Peperpu/013/1950.
3. Undang-Undang No.24 (PRP) tahun 1960 tentang Tindak Pidana Korupsi.
4. Undang-Undang No.3 tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
5. TAP MPR No. XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.
6. Undang-Undang No.28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.
7. Undang-Undang No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
8. Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
9. Undang-Undang No. 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
10. Undang-Undang No. 7 tahun 2006 tentang Pengesahan United Nation Convention Against Corruption (UNCAC) 2003.
11. Peraturan Pemerintah No.71 tahun 2000 tentang Peran serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

## 12. Instruksi Presiden No. 5 tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi.

Banyaknya peraturan perundang-undangan korupsi yang pernah dibuat dan berlaku di Indonesia menarik untuk disimak tersendiri untuk mengetahui dan memahami lahirnya tiap-tiap peraturan perundang-undangan tersebut, termasuk untuk mengetahui dan memahami kekurangan dan kelebihanannya masing-masing.

### 1. Delik Korupsi dalam KUHP

KUHP yang diberlakukan di Indonesia sejak 1 Januari 1918 merupakan warisan Belanda. Ia merupakan kodifikasi dan unifikasi yang berlaku bagi semua golongan di Indonesia berdasarkan asas konkordansi, diundangkan dalam Staatblad 1915 Nomor 752 berdasarkan KB 15 Oktober 1915. Sebagai hasil saduran dari Wetboek van Strafrech Nederland 1881, berarti 34 tahun lamanya baru terjelma unifikasi berdasar asas konkordansi ini. Dengan demikian, KUHP itu pada waktu dilahirkan bukan barang baru dalam pelaksanaannya.

Diperlukan banyak penyesuaian untuk memberlakukan KUHP di Indonesia mengingat sebagai warisan Belanda terdapat banyak ketentuan yang tidak sesuai dengan kebutuhan hukum masyarakat Indonesia. Meski tidak secara khusus mengatur mengenai tindak pidana korupsi di dalamnya, KUHP telah mengatur banyak perbuatan korupsi, pengaturan mana kemudian diikuti dan ditiru oleh pembuat Undang-Undang pemberantasan korupsi hingga saat ini. Namun demikian terbuka jalan lapang untuk menerapkan hukum pidana yang sesuai dan selaras dengan tata hidup masyarakat Indonesia mengingat KUHP yang kita miliki sudah tua dan sering diberi merek kolonial.

Dalam perjalanannya KUHP telah diubah, ditambah, dan diperbaiki oleh beberapa Undang-Undang nasional seperti Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946, Undang-Undang Nomor 20 tahun 1946, dan Undang-Undang Nomor 73 tahun 1958, termasuk berbagai Undang-Undang mengenai pemberantasan korupsi yang mengatur secara lebih khusus beberapa ketentuan yang ada di KUHP.

Delik korupsi yang ada di dalam KUHP meliputi delik jabatan dan delik yang adakaitannya dengan delik jabatan. Sesuai dengan sifat dan kedudukan KUHP, delik korupsi yang diatur di dalamnya masih merupakan kejahatan biasa saja.

## **2. Peraturan Pemberantasan Korupsi Penguasa Perang Pusat Nomor Prt/Peperpu/013/1950.**

Pendapat yang menyatakan bahwa korupsi disebabkan antara lain oleh buruknya peraturan yang ada telah dikenal sejak dulu. Dengan demikian pendapat bahwa perbaikan peraturan Anti-korupsi akan membawa akibat berkurangnya korupsi tetap menjadi perdebatan. Peraturan yang secara khusus mengatur pemberantasan korupsi adalah Peraturan Pemberantasan Korupsi Penguasa Perang Pusat Nomor Prt/Peperpu/013/1950, yang kemudian diikuti dengan Peraturan Penguasa Militer tanggal 9 April 1957 Nomor Prt/PM/06/1957, tanggal 27 Mei 1957 Nomor Prt/PM/03/1957, dan tanggal 1 Juli 1957 Nomor Prt/PM/011/1957.<sup>12</sup>

Hal yang penting untuk diketahui dari peraturan-peraturan di atas adalah adanya usaha untuk pertama kali memakai istilah korupsi sebagai istilah hukum dan memberi batasan pengertian korupsi sebagai “perbuatan-perbuatan

---

<sup>12</sup> Ibid, hlm.123.

yang merugikan keuangan dan perekonomian negara". Yang menarik dari ketentuan Peraturan Penguasa Perang Pusat adalah adanya pembagian korupsi ke dalam dua perbuatan:

1) Korupsi sebagai perbuatan pidana;

- a. Perbuatan seseorang dengan atau karena melakukan suatu kejahatan atau pelanggaran memperkaya diri sendiri atau orang lain atau badan yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan atau perekonomian negara atau daerah atau merugikan suatu badan yang menerima bantuan dari keuangan negara atau badan hukum lain yang mempergunakan modal dan kelonggaran-kelonggaran masyarakat.
- b. Perbuatan seseorang yang dengan atau karena melakukan suatu kejahatan atau pelanggaran memperkaya diri sendiri atau suatu badan dan yang dilakukandengan menyalahgunakan jabatan atau kedudukan.
- c. Kejahatan-kejahatan tercantum dalam Pasal 41 sampai dengan Pasal 50 Peperpu ini dan dalam Pasal 209, 210, 418, 419, dan 420 KUHP.

2) Korupsi sebagai perbuatan lainnya;

- a. Korupsi sebagai perbuatan bukan pidana atau perbuatan lainnya dijelaskan sebagai, Perbuatan seseorang yang dengan atau karena melakukan perbuatan melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan negara atau daerah atau merugikan keuangan suatu badan yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah atau badan hukum lain yang mempergunakan modal atau kelonggaran-kelonggaran dari masyarakat.

- b. Perbuatan seseorang yang dengan atau karena melakukan perbuatan melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan dan yang dilakukan dengan menyalahgunakan jabatan atau kedudukan. Pembedaan korupsi ke dalam dua bagian tersebut mengundang banyak kritik dan reaksi di kalangan para sarjana hukum, meski harus diakui di dalam Peraturan Penguasa perang Pusat tersebut juga terdapat berbagai kelebihan seperti telah diaturnya ketentuan yang dapat menerobos kerahasiaan bank.

3.) Undang-Undang No.24 (PRP) tahun 1960 tentang Tindak Pidana Korupsi.

Dari permulaan dapat diketahui bahwa Peraturan Penguasa Perang Pusat tentang Pemberantasan Korupsi itu bersifat darurat, temporer, dan berlandaskan Undang-Undang Keadaan Bahaya. Dalam keadaan normal ia memerlukan penyesuaian. Atas dasar pertimbangan penyesuaian keadaan itulah lahir kemudian Undang-Undang Nomor 24 (PRP) tahun 1960 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang pada mulanya berbentuk Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang. Perubahan utama dari Peraturan Penguasa Perang Pusat ke dalam Undang-Undang ini adalah diubahnya istilah perbuatan menjadi tindak pidana. Namun demikian Undang-Undang ini ternyata dianggap terlalu ringan dan menguntungkan tertuduh mengingat pembuktiannya lebih sulit.

4) Undang-Undang No.3 tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Sejarah tidak mencatat banyak perkara tindak pidana korupsi pada periode 1960-1970. Tidak diketahui apakah

karena Undang-Undang tahun 1960 tersebut efektif ataukah karena pada periode lain sesudahnya memang lebih besar kuantitas maupun kualitasnya. Dalam periode 1970-an, Presiden membentuk apa yang dikenal sebagai Komisi 4 dengan maksud agar segala usaha memberantas korupsi dapat berjalan lebih efektif dan efisien. Komisi 4 ini terdiri dari beberapa orang yaitu Wilopo, S.H., I.J. Kasimo, Prof. Ir. Johannes, dan Anwar Tjokroaminoto. Adapun tugas Komisi 4 adalah:

- a. Mengadakan penelitian dan penilaian terhadap kebijakan dan hasil-hasil yang telah dicapai dalam pemberantasan korupsi.
- b. Memberikan pertimbangan kepada pemerintah mengenai kebijaksanaan yang masih diperlukan dalam pemberantasan korupsi.

Dalam penyusunannya, Undang-Undang Nomor 3 tahun 1971 ini relatif lancar tidak mengalami masalah kecuali atas beberapa hal seperti adanya pemikiran untuk memberlakukan asas pembuktian terbalik dan keinginan untuk memasukkan ketentuan berlaku surut.

5) TAP MPR No. XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

Seiring dengan gerakan reformasi yang timbul dari ketidakpuasan rakyat atas kekuasaan Orde baru selama hampir 32 tahun, keinginan untuk menyusun tatanan kehidupan baru menuju masyarakat madani berkembang di Indonesia. Keinginan untuk menyusun tatanan baru yang lebih mengedepankan *civil society* itu dimulai dengan disusunnya seperangkat peraturan perundang-undangan

yang dianggap lebih mengedepankan kepentingan rakyat sebagaimana tuntutan reformasi yang telah melengserkan Soeharto dari kursi kepresidenan.

Melalui penyelenggaraan Sidang Umum Istimewa MPR, disusunlah TAP No. XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. TAP MPR ini di dalamnya memuat banyak amanat untuk membentuk perundang-undangan yang akan mengawal pembangunan orde reformasi, termasuk amanat untuk menyelesaikan masalah hukum atas diri mantan Presiden Soeharto beserta kroni-kroninya.

6) Undang-Undang No.28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 mempunyai judul yang sama dengan TAP MPR No. XI/MPR/1998 yaitu tentang Penyelenggara negara yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Lahirnya Undang-Undang ini memperkenalkan suatu terminologi tindak pidana baru atau kriminalisasi atas pengertian Kolusi dan Nepotisme.

Dalam Undang-Undang ini diatur pengertian kolusi sebagai tindak pidana, yaitu adalah permufakatan atau kerjasama secara melawan hukum antar penyelenggara negara, atau antara penyelenggara negara dan pihak lain, yang merugikan orang lain, masyarakat, dan atau Negara. Sedangkan tindak pidana nepotisme didefinisikan sebagai setiap perbuatan penyelenggara negara secara melawan hukum yang menguntungkan kepentingan keluarganya dan atau kroninya di atas kepentingan masyarakat, bangsa, dan Negara.<sup>13</sup>

---

<sup>13</sup> Ibid, hal.125.



Dalam perjalanannya, Undang-Undang ini tidak banyak digunakan. Beberapa alasan tidak populernya Undang-Undang ini adalah terlalu luasnya ketentuan tindak pidana yang diatur di dalamnya serta adanya kebutuhan untuk menggunakan ketentuan Undang-Undang yang lebih spesifik dan tegas, yaitu Undang-Undang yang secara khusus mengatur mengenai pemberantasan korupsi.

7) Undang-Undang No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Lahirnya Undang-Undang pemberantasan korupsi Nomor 31 tahun 1999 dilatar belakangi oleh 2 alasan, yaitu pertama bahwa sesuai dengan bergulirnya orde reformasi dianggap perlu meletakkan nilai-nilai baru atas upaya pemberantasan korupsi, dan kedua Undang-Undang sebelumnya yaitu UU No. 3 tahun 1971 dianggap sudah terlalu lama dan tidak efektif lagi.

Apa yang diatur sebagai tindak pidana korupsi di dalam Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebetulnya tidak sungguh-sungguh suatu yang baru karena pembuat Undang-Undang masih banyak menggunakan ketentuan yang terdapat di dalam Undang-Undang sebelumnya. Namun demikian, semangat dan jiwa reformasi yang dianggap sebagai roh pembentukan Undang-Undang baru ini diyakini akan melahirkan suatu gebrakan baru terutama dengan diamanatkannya pembentukan suatu komisi pemberantasan tindak pidana korupsi sebagai suatu instrumen baru pemberantasan korupsi.

Harapan masyarakat bahwa Undang-Undang baru ini akan lebih tegas dan efektif sangat besar, namun pembuat Undang-Undang membuat beberapa kesalahan mendasar yang mengakibatkan perlunya dilakukan perubahan atas

Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 ini. Adapun beberapa kelemahan Undang-Undang ini antara lain:

- a. Ditariknya pasal-pasal perbuatan tertentu dari KUHP sebagai tindak pidana korupsi dengan cara menarik nomor pasal. Penarikan ini menimbulkan resiko bahwa apabila KUHP diubah akan mengakibatkan tidak sinkronnya ketentuan KUHP baru dengan ketentuan tindak pidana korupsi yang berasal dari KUHP tersebut.
- b. Adanya pengaturan mengenai alasan penjatuhan pidana mati berdasarkan suatu keadaan tertentu yang dianggap berlebihan dan tidak sesuai dengan semangat penegakan hukum.
- c. Tidak terdapatnya aturan peralihan yang secara tegas menjadi jembatan antara Undang-Undang lama dengan Undang-Undang baru, hal mana menyebabkan kekosongan hukum untuk suatu periode atau keadaan tertentu.

8) Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 merupakan Undang-Undang yang lahir semata untuk memperbaiki kelemahan dan kekurangan Undang-Undang terdahulu. Sebagaimana telah disebutkan di atas, beberapa kelemahan tersebut kemudian direvisi di dalam Undang-Undang baru.

Adapun revisi atas kelemahan Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 adalah:

- a. Penarikan pasal-pasal perbuatan tertentu dari KUHP sebagai tindak dilakukan dengan cara mengadopsi isi

pasal secara keseluruhan sehingga perubahan KUHP tidak akan mengakibatkan ketidaksinkronan.

- b. Pengaturan alasan penjatuhan pidana mati didasarkan atas perbuatan korupsi yang dilakukan atas dana-dana yang digunakan bagi penanggulangan keadaan tertentu seperti keadaan bahaya, bencana nasional, dan krisis moneter.
- c. Dicantumkannya aturan peralihan yang secara tegas menjadi jembatan antara Undang-Undang lama yang sudah tidak berlaku dengan adanya Undang-Undang baru, sehingga tidak lagi menimbulkan resiko kekosongan hukum yang dapat merugikan pemberantasan tindak pidana korupsi.

9) Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 yang menghendaki dibentuknya suatu komisi pemberantasan tindak pidana korupsi. Sebagai suatu tindak pidana yang bersifat luar biasa (*extra ordinary crime*), pemberantasan korupsi dianggap perlu dilakukan dengan cara-cara yang juga luar biasa.

Cara-cara pemberantasan korupsi yang luar biasa itu sebetulnya telah tercantum di dalam Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 di antaranya mengenai alat-alat bukti yang dapat dijadikan sebagai dasar pembuktian di pengadilan termasuk adanya beban pembuktian terbalik terbatas atau berimbang di mana pelaku tindak pidana korupsi juga dibebani kewajiban untuk membuktikan bahwa harta kekayaannya bukan hasil tindak pidana korupsi.

Namun demikian, pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi tetap dianggap sebagai penjelmaan upaya luar biasa dari pemberantasan korupsi, utamanya dengan mengingat bahwa KPK diberikan kewenangan yang lebih besar dibanding institusi pemberantasan korupsi yang telah ada sebelumnya yaitu Kepolisian dan Kejaksaan.

Secara historis, tuntutan dibentuknya KPK adalah sebagai bentuk ketidakpercayaan masyarakat atas kinerja Kepolisian dan Kejaksaan dalam memberantas korupsi. Kedua institusi itu terlanjur dianggap masyarakat sebagai tempat terjadinya korupsi baru, baik dalam penanganan perkara-perkara korupsi maupun dalam penanganan perkara-perkara lainnya. KPK diharapkan menjadi *trigger mechanism*, yaitu pemicu (terutama) bagi Kepolisian dan Kejaksaan dalam melakukan pemberantasan korupsi.

Di antara kewenangan luar biasa yang tidak dimiliki oleh Kepolisian dan Kejaksaan yang dimiliki KPK adalah kewenangan melakukan penyadapan pembicaraan telepon. KPK juga diberi kewenangan untuk menjadi supervisi bagi Kepolisian dan Kejaksaan, selain ia juga dapat mengambil alih perkara korupsi yang ditangani Kepolisian dan Kejaksaan apabila penanganan suatu perkara oleh kedua institusi itu dianggap tidak memiliki perkembangan yang signifikan. Luasnya kewenangan KPK tidak berarti tanpa batas. Pembatasan kewenangan KPK terutama menyangkut perkara yang dapat ditanganinya, yaitu:

- a. Yang menyangkut kerugian negara sebesar Rp. 1 miliar atau lebih.
- b. Perkara yang menarik perhatian publik.

- c. Perkara yang dilakukan oleh penyelenggara negara dan atau khususnya penegak hukum.

10) Peraturan Pemerintah No.71 tahun 2000 tentang Peranserta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2000 merupakan amanat Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 yang mengatur adanya peran serta masyarakat dalam pemberantasan korupsi.

Adapun latar belakang diaturnya peran serta masyarakat dalam Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 adalah karena korupsi menyebabkan krisis kepercayaan. Korupsi diberbagai bidang pemerintahan menyebabkan kepercayaan dan dukungan rakyat progam perbaikan dalam bentuk apapun tidak akan berhasil. Sebaliknya jika rakyat meiliki kepercayaan dan mendukung pemerintah serta berperan serta dalam pemberantasan korupsi maka korupsi bisa ditekan semaksimal mungkin.

Ketentuan Pasal 41-42 Undang-Undang No. 31/1999 Tentang Pemberantasan Tindak Korupsi, Menyatakan Bahwa “Masyarakat Dapat Berperan Serta Membantu Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi” PP No. 71 tahun 2000 dibentuk untuk mengatur lebih jauh tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat sehingga apa yang diatur di dalam Undang-Undang dan peraturan pemerintah tersebut pada dasarnya memberikan hak kepada masyarakat untuk mencari, memperoleh, dan memberikan informasi tentang dugaan korupsi serta menyampaikan saran dan pendapat maupun pengaduan kepada penegak hukum (polisi, jaksa, hakim, advokat, atau kepada KPK).

Di samping itu PP ini juga memberikan semacam penghargaan kepada anggota masyarakat yang telah berperan serta memberantas tindak pidana korupsi yaitu dengan cara memberikan penghargaan dan semacam premi.

Beberapa bentuk dukungan masyarakat yang diatur dalam PP ini adalah:

- a. Mengasingkan dan menolak keberadaan koruptor.
- b. Memboikot dan memasukkan nama koruptor dalam daftar hitam.
- c. Melakukan pengawasan lingkungan.
- d. Melaporkan adanya gratifikasi.
- e. Melaporkan adanya penyelewengan penyelenggaraan negara.
- f. Berani memberi kesaksian.
- g. Tidak asal lapor atau fitnah.



## BAB III

# PENDIDIKAN ANTI-KORUPSI

### A. Pengertian Korupsi

ISTILAH KORUPSI berasal dari bahasa latin yaitu “*corruptive*” atau “*corruptus*” selanjutnya. Kata *corruption* berasal dari kata *corrumpore* (suatu kata latin yang tua). Dari bahasa latin inilah yang kemudian diikuti dalam bahasa Eropa seperti Inggris: *corruption, corrupt*; Perancis: *corruption*; Belanda; *Corruptie (korruptie)*. Dalam ensiklopedia Indonesia disebutkan bahwa korupsi (dari latin *corruption* = penyuapan; dan *corrumpore* = merusak) yaitu gejala bahwa para pejabat badan-badan Negara menyalahgunakan terjadinya penyuapan, pemalsuan serta ketidakberesan lainnya.<sup>1</sup>

Secara Etimologi korupsi bermakna orang-orang yang memiliki kekuasaan berkeinginan melakukan kecurangan secara tidak sah untuk memperoleh uang atau keuntungan pribadi (*derog (esp of people with authority of power) willing to act dishonestly or illegally in return for money or person gain*). Juga bermakna kejahatan, kerusakan, kebusukan, keburukan, kecurangan, penyimpangan, kebejatan, ketidakjujuran, menyuap, penipuan, tidak bermoral, penyimpangan dari

<sup>1</sup> IGM Nurdjana, *Sistem Hukum Pidana dan Bahaya Laten Korupsi “Perspektif Tegaknya Keadilan Melawan Mafia Hukum*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar , 2010), hal. 14.

kata kesucian, kata-kata atau ucapan yang menghina atau memfitnah, seperti yang terungkap dalam *The Lexion Webster Dictionery*:

“Corruption The act of corrupting, or the state of being corrupt; putrefactive, decomposition, putrid matter, moral perversion; depravity Corruption The act of corrupting, or the state of being corrupt; putrefactive, decomposition, putrid matter, moral perversion; depravit, perversion of integrity, corrupt or dishonest proceedings; bribery; perversion from a state of purity, debasement, as of a language, a debased from of a word” (the lexion, 1987).

Secara terminologis korupsi diistilahkan oleh bank pembangunan Asia dan Lembaga Transparansi Internasional sebagai perilaku-perilaku mereka-mereka yang bekerja di sektor publik dan swasta, baik politisi maupun pegawai negeri, yang secara tidak wajar dan tidak legal memperkaya diri dan atau memperkaya mereka yang berdekatan dengannya, atau merangsang orang lain berbuat serupa dengan menyalahgunakan kedudukan yang mereka emban.

Pengertian korupsi secara harfiah dapat berupa:

- a. Kejahatan, kebusukan, dapat disuap, tidak bermoral, kejahatan dan ketidak jujuran.
- b. Perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok dan sebagainya.

Perbuatan yang kenyataannya menimbulkan keadaan yang bersifat buruk; -Prilaku jahat dan *tercela*, atau kejahatan moral; -Penyuapan dan bentuk-bentuk ketidakjujuran; - Sesuatu yang dikorup, seperti kata yang diubah atau diganti secara tidak tepat dalam satu kalimat; - Pengaruh-pengaruh yang korup.<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup> Ibid, hal. 15.



Robert Klitgaard mendefinisikan “*corruption is the abuse of publik power of private benefit*” (korupsi adalah penyalahgunaan kekuasaan publik untuk keuntungan pribadi dan golongan). Tidak jauh berbeda dengan yang dikemukakan oleh Kitgaard, Unesco Courier (1996) mendefinisikan korupsi sebagai tindakan penyimpangan jabatan publik demi keuntungan pribadi dan golongan (*misuse of office for personal gain*). Begitu pula pengakuan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), bahwa korupsi adalah setiap perilaku yang mengarah untuk merugikan masyarakat dan perilaku untuk memperkaya diri sendiri.<sup>3</sup>

Untuk lebih memahami korupsi mari kita bahas dari pengertian korupsi terlebih dahulu. Banyak kita temukan rumusan tentang korupsi, serta banyak kita temukan istilah yang berkonotasi dengan kata korupsi seperti kolusi, suap, pungli, manipulasi dan lain-lain. Akan tetapi korupsi itu menurut Dr. Andi Hamzah SH. Dalam “Kamus Hukum” yang dikutip oleh Soesilo.<sup>4</sup>

Korupsi adalah masalah dunia. Tetapi di berbagai Negara di dunia, korupsi paling banyak dijumpai di tingkatan lokal, dalam pemerintah daerah apalagi di tingkat elit. Sebagai contoh, menurut sebuah penelitian di Jepang, jumlah pegawai pemerintah provinsi tiga kali lipat jumlah pegawai pemerintah pusat, tetapi tindak korupsi yang dilaporkan lima belas kali lipat dari jumlah pejabat danyang ditangkap empat kali lipat.<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup> Hakim Muda Harahap, *Ayat-Ayat Korupsi*, (Yogyakarta: Gama Media, 2009), hal.11-12.

<sup>4</sup> Soesilo, *Korupsi Refleksi Zaman Edan*, (Malang: Yayasan “Yusula”, 2008), hal. 72.

<sup>5</sup> Robert Klitgaard, Ronald Maclean-Abaroa, dan Lindsey Parris, *Penuntut Pemberantas Korupsi dalam Pemerintah Daerah*, (Jakarta: Dea Grafis, 2002), hal. 1.

Korupsi *dalam* pengertian tradisional dianggap wajar dan tidak dimasalahkan karena suatu hak dimonopoli secara sepihak oleh pengusaha, sehingga tidak ada kekuatan kontrol secara eksternal. Oleh karena itu, korupsi dapat berlangsung terus dalam puluhan abad. Sampai sekarang pun korupsi masih belum dirasakan sebagai sesuatu yang begitu merugikan publik karena semua property dianggap miliknya sendiri, jadi *semau gue* bebas untuk melakukan apa saja seperti miliknya sendiri.<sup>6</sup>

Menurut perspektif hukum, definisi korupsi secara gambling telah menjelaskan dalam tiga buah pasal dalam UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001. Berdasarkan pasal tersebut, korupsi dirumuskan ke dalam tiga puluh bentuk atau jenis tindak pidana korupsi. Pasal-pasal tersebut menerangkan secara terprincimengenai perbuatan yang bisa dikenakan pidana penjara karena korupsi.<sup>7</sup>

Dalam dunia akademis khususnya perguruan tinggi, lahirnya sebuah matakuliah baru akan memerlukan penempatan ranah keilmuan yang tepat. Demikian pula halnya dengan *matakuliah* Anti-korupsi. Dari pengalaman beberapa universitas yang telah menyelenggarakan matakuliah ini, selalu muncul pertanyaan, diskusi hingga perdebatan mengenai berada di ranah keilmuan manakah matakuliah Anti-korupsi. Perdebatan biasanya berlangsung di antara beberapa bidang keilmuan, dan berujung pada kesulitan untuk memperoleh titik temu, oleh karena setiap keilmuan cenderung mempertahankan perspektifnya masing-masing.

---

<sup>6</sup> Suhartono W. Pranoto, *Bandit Berdasi Korupsi Berjamaah Merangkai hasil Kejahatan Pasca-Reformasi*, (Yogyakarta: IMPULSE (Instute for Multiculturalism and Pluralism Studies, 2008), hal. 80.

<sup>7</sup> Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), *Memahami Untuk Membasmi*, (Jakarta Selatan: MPRCons Indonesia, 2006), hal. 19.

Sebuah topik yang diangkat dalam sebuah matakuliah atau bahkan menjadi penamaan dari sebuah matakuliah tidak selalu berasal dari keilmuan itu sendiri, namun sangat mungkin lahir sebagai respon atas perkembangan fenomena yang terjadi. Begitu pula matakuliah Anti-korupsi yang bisa dikatakan lahir dari adanya fenomena semakin parahnyadisintegritas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, yang diindikasikan oleh terjadinya berbagai tindak korupsi yang tiada henti, sehingga memerlukan upaya-upaya *sistematis* dalam membasminya. Dampak korupsi yang telah terbukti melemahkan sumber daya, meresahkan kehidupan sosial, menggerogoti potensi negara-bangsa dan bahkan sudah menjadi masalah internasional, harus didiseminasikan kepada seluruh masyarakat melalui pendidikan; sehingga diharapkan akan menumbuhkan tekad bersama untuk menghentikan korupsi dimasa mendatang.

Korupsi dan Anti-korupsi itu sendiri merupakan sebuah fenomena yang kompleks, bisa dilihat dari berbagai *perspektif* yang pada hakikatnya saling melengkapi. Kepingan-kepingan perspektif tersebut kemudian dieksplorasi dalam bermacam-macam. Berikut adalah beberapa pengalaman praktik yang sudah terjadi di Indonesia:

1. Perspektif hukum memandang bahwa korupsi merupakan kejahatan (*crime*), koruptor adalah penjahat dan oleh karenanya yang harus dilakukan oleh pemerintah adalah menindak para koruptor dengan jerat-jerat hukum serta memberantas korupsi dengan memperkuat perangkat hukum seperti Undang-Undang dan aparat hukum. Perspektif ini kemudian melahirkan matakuliah semacam Hukum Pidana Korupsi pada sejumlah Fakultas Hukum.<sup>8</sup>

<sup>8</sup> IGM Nurdjana, *Sistem Hukum Pidana dan Bahaya Laten Korupsi "Perspektif Tegaknya Keadilan Melawan Mafia Hukum*, hal. 92.

2. Perspektif politik memandang bahwa korupsi cenderung terjadi di ranah politik, khususnya korupsi besar (*grand corruption*) dilakukan oleh para politisi yang menyalahgunakan kekuasaan mereka dalam birokrasi. Perspektif ini kemudian melahirkan mata kuliah semacam Korupsi Birokrasi atau Korupsi Politik pada sejumlah Fakultas Ilmu Politik.<sup>9</sup>
3. Perspektif sosiologi memandang bahwa korupsi adalah sebuah masalah gerakan sosial, masalah institusional dan masalah struktural. Korupsi terjadi di semua sektor dan dilakukan oleh sebagian besar lapisan masyarakat, maka dianggap sebagai penyakit sosial.<sup>10</sup>
4. Perspektif agama memandang bahwa korupsi terjadi sebagai dampak dari lemahnya nilai-nilai agama dalam diri individu, dan oleh karenanya upaya yang harus dilakukan adalah memperkuat internalisasi nilai-nilai keagamaan dalam diri individu dan masyarakat untuk mencegah tindak korupsi kecil (*petty corruption*), apalagi korupsi besar (*grand corruption*). Dalam pandangan ini, Alquran dan hadis harus menjadi acuan yang sakral.<sup>11</sup>
5. Dari segi hukum agama maupun hukum positif, kolusi adalah perbuatan yang sama-sama melawan hukum, etika keagamaan dan etika sosial, tapi pada sisi praktiknya, kolusi sedikit berbeda dengan korupsi. Perbuatan korupsi merupakan sebuah proses tawar-menawar kepentingan untuk meraih keuntungan, rahasia dan penuh misteri, manipulasi prosedur birokrasi, pemaksaan keputusan

---

<sup>9</sup> Ian Shapiro, *Asas Moral dalam Politik*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2006), hal. 220.

<sup>10</sup> Nanang Martono, *Sosiologi Perubahan Sosial*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2011), hal. 232.

<sup>11</sup> Zainuddin, *Pemikiran Politik Islam*, (Jakarta: Grafika Indah, 2004), hal. 59.

atau kebijakan (pemerintah, perusahaan, swasta, atau masyarakat) secara struktural. Tindakan kolusi dapat terjadi melalui kesepakatan 'surat sakti' atau mengancam dengan kekerasan terhadap bawahan bila enggan meluluskan kepentingan atasan.<sup>12</sup>

6. Beberapa perspektif lain yang menggarisbawahi fenomena korupsi dari sudut pandang tertentu dapat menjadi fokus dari sebuah matakuliah. Menurut Kementerian Pendidikan Nasional (kemdiknas), yang dikutip oleh Wibowo, bahwa korupsi merupakan fenomena sosial yang bersifat kompleks, sehingga sulit untuk didefinisikan secara tepat ruang lingkupnya. Pengamatan dalam kehidupan sehari-hari fenomena korupsi dapat terjadi secara tidak kentara (*subtle*) antara dua hubungan individu sampai dengan hubungan yang kompleks seperti dalam suatu korporasi. Pada tingkat hubungan antar individu, korupsi terjadi ketika salah satu individu melakukan penipuan (*cheating*) terhadap individu lainnya.<sup>13</sup>

Alatas menyatakan sebuah korupsi yang dikutip oleh Wibowo, bahwa tindak korupsi adalah jika pegawai negeri menerima pemberian yang disodorkan oleh seorang swasta, dengan maksud mempengaruhinya agar memberikan perhatian istimewa terhadap kepentingan si pemberi. Lebih lanjut Alatas menyebut tiga fenomena yang termasuk dalam korupsi yaitu: *bribery*, *extortion*, dan *nepotism*. Berdasarkan pendapat Alatas dapat disimpulkan bahwa korupsi merupakan gejala salah pakai, dan salah urus dari kekuasaan, demi keuntungan pribadi, salah urus dan kesewenangan

---

<sup>12</sup> Pius A Partanto dan Dahlan al-Barry, *Kamus Ilmiah Populer*, (Surabaya: Arkola, 2010), hal. 350.

<sup>13</sup> Agus Wibowo, *Pendidikan Antikorupsi di Sekolah*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2013), hal. 17.

terhadap sumber-sumber kekayaan Negara dan menggunakan wewenang atau kekuasaan dan kekuatan-kekuatan formal (misalnya dengan alasan hukum dan kekuatan senjata) untuk memperkaya diri sendiri.<sup>14</sup>

## B. Penyebab Korupsi

Korupsi di tanah negeri, ibarat “warisan haram” tanpa surat wasiat. Ia tetap lestari sekalipun diharamkan oleh aturan hukum yang berlaku dalam tiap orde yang datang silih berganti. Hampir semua segi kehidupan terjangkit korupsi. Apabila disederhanakan penyebab korupsi meliputi dua faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal merupakan penyebab korupsi yang datang dari diri pribadi sedang faktor eksternal adalah faktor penyebab terjadinya korupsi karena sebab-sebab dari luar.

Faktor internal terdiri dari aspek moral, misalnya lemahnya keimanan, kejujuran, rasa malu, aspek sikap atau perilaku misalnya pola hidup konsumtif dan aspek sosial seperti keluarga yang dapat mendorong seseorang untuk berperilaku korup. Faktor eksternal bisa dilacak dari aspek ekonomi misalnya pendapatan atau gaji tidak mencukupi kebutuhan, aspek politis misalnya instabilitas politik, kepentingan politis, meraih dan mempertahankan kekuasaan, aspek manajemen & organisasi yaitu ketiadaan akuntabilitas dan transparansi, aspek hukum, terlihat dalam buruknya wujud perundang-undangan dan lemahnya penegakan hukum serta aspek sosial yaitu lingkungan atau masyarakat yang kurang mendukung perilaku Anti-korupsi.

Membaca data mengenai praktik korupsi di Negara ini, kita sudah pasti *ter-enyuh* dan mengelus dada. Betapa tidak bangsa kita yang sejak bertahun-tahun dikenal begitu

<sup>14</sup> Ibid, hal. 20.

religius (agamis) ternyata saat ini sebagian besar menjadi koruptor. Pertanyaan yang muncul kemudian, apa yang menyebabkan seseorang melakukan korupsi? Apa yang memicu terjadinya praktik korupsi?

Korupsi menyebabkan terjadinya keresahan baik berasal dari dalam diri pelaku atau dari luar pelaku. Ketika perilaku materialistik dan konsumtif masyarakat serta sistem politik yang masih “mendewakan” materi maka dapat “memaksa” terjadinya permainan uang dan korupsi. Dengan kondisi itu hampir dapat dipastikan seluruh pejabat kemudian terpaksa penyebab seseorang melakukan korupsi adalah karena ketergodaannya akan dunia materi atau kekayaan yang tidak mampu ditahannya. Ketika dorongan untuk menjadi kaya tidak mampu ditahan sementara akses ke arah kekayaan bisa diperoleh melalui cara berkorupsi, maka jadilah seseorang akan melakukan korupsi. Dengan demikian, jika menggunakan sudut pandang penyebab korupsi seperti ini, maka salah satu penyebab korupsi adalah cara pandang terhadap kekayaan. Cara pandang terhadap kekayaan yang salah akan menyebabkan cara yang salah dalam mengakses kekayaan.

Banyak faktor yang menyebabkan terjadinya tindak korupsi. Menurut penelitian yang dilakukan Singh yang ada dalam bukunya Wibowo, di India praktik korupsi tidak hanya disebabkan oleh kelemahan moral saja (sekitar 41,3 persen), tetapi juga dipicu oleh tekanan ekonomi (23,8 persen), hambatan struktur administrasi (17,2 persen), dan hambatan struktur sosial (7,08 persen). Berdasarkan penelitian Singh kita dapat menyimpulkan betapa kompleksnya aspek-aspek yang mendorong orang melakukan korupsi.<sup>15</sup>

---

<sup>15</sup> Ibid, hal. 30.

Dalam pandangan ilmu psikologi, penyebab suatu perbuatan ialah adanya interaksi antara faktor yang ada dalam diri seseorang dalam faktor yang ada di luar dirinya. Kedua faktor ini berinteraksi satu sama lain dalam wadah budaya yang lebih luas. Faktor dari dalam diri adalah sesuatu yang disebut sebagai ciri kepribadian. Ciri kepribadian ini cenderung membuat orang lebih mudah tergoda untuk melakukan korupsi. Kecenderungan ini disebabkan oleh tidak adanya sesuatu yang membentengi dirinya, sehingga yang mempunyai kemauan adalah nafsu. Sedangkan faktor diluar diri adalah kondisi-kondisi diluar yang mempermudah orang melakukan perbuatan korupsi. Seperti faktor kebudayaan, faktor struktur kekuasaan, faktor ekonomi, dan faktor kelemahan hukum. Keempat faktor ekstrem ini akan diuraikan lebih detail di bawah ini:

### 1. Kekuasaan Politik

Ada dua gabungan kata yang perlu diketahui maksudnya, yaitu politik dan kekuasaan. Kata politik berasal dari kata bahasa Inggris *politic* yang menunjukkan sifat pribadi atau perbuatan. Secara leksikal, kata asal tersebut berarti *acting or judging wisely, well judged, prudent*. Kata politik terambil dari kata latin *politicus* dan bahasa Yunani *politicos* yang berarti *relating to a citizen*. Kata politik kemudian diserap kedalam bahasa Indonesia dalam tiga arti, yaitu: segala urusan dan tindakan (kebijaksanaan, siasat dan sebagainya) mengenai pemerintahan suatu negara atau terhadap negara lain, tipu muslihat atau kelicikan, dan juga dipergunakan sebagai nama bagi sebuah disiplin pengetahuan, yaitu ilmu politik.

Dari beberapa definisi yang ada ditemukan beberapa kecenderungan ruang pendefinisian politik. *Pertama*, pandangan yang mengaitkan politik dengan negara, yakni



dengan urusan pemerintahan pusat atau pemerintahan daerah. *Kedua*, pandangan yang mengaitkannya dengan masalah kekuasaan, otoritas dan atau konflik.

Dalam kaitan dengan kegiatan-kegiatan politik, Gabriel Almond telah mengungkapkan kegiatan-kegiatan politik sebagai fungsi-fungsi politik dalam dua kategori; fungsi masukan (*input function*) dan fungsi-fungsi keluaran (*output function*). Fungsi masukan adalah fungsi paling urgen menentukan kerja sistem yang diperlukan untuk membuat dan melaksanakan kebijaksanaan dalam sistem politik. Fungsi-fungsi ini berciri sebagai berikut:

- a. *Sosialisasi politik*. Sosialisasi diartikan sebagai proses sosial yang memungkinkan seseorang menjadi anggota kelompoknya. Dalam hal ini ia harus mempelajari kebudayaan kelompoknya dan peranaannya dalam kelompok.
- b. *Rekrutmen politik*. Yang dimaksud adalah proses seleksi warga masyarakat untuk menduduki jabatan politik dan administrasi. Dalam sistem politik tradisional seseorang dari golongan masyarakat dapat menduduki jabatan atau dapat diangkat menjadi pegawai bila kekuasaan politiknya lebih mementingkan silsilah keturunan atau dalam kata lain nepotisme.
- c. *Artikulasi kepentingan*. Fungsi ini merupakan proses penentuan kepentingan yang dikehendaki dari sistem politik. Dalam hal ini rakyat menyatakan kepentingan mereka kepada lembaga-lembaga politik melalui kelompok-kelompok kepentingan yang mereka bentuk bersama.
- d. *Komunikasi politik*. Fungsi ini merupakan alat untuk penyelenggaraan fungsi-fungsi lainnya.

Yang kedua, fungsi-fungsi keluaran yang meliputi fungsi; pembuatan aturan, pelaksanaan aturan-aturan hukum, dan pengawasan atas pelaksanaan aturan-aturan hukum.

Adapun istilah 'kekuasaan' terbentuk dari kata kuasa dengan imbuhan berawalan *ke-* dan akhiran *-an*. Dalam kamus, kata *kekuasaan* diberi arti dengan kuasa; kemampuan; kesanggupan; dan kekuatan. Sedangkan kata *kuasa* sendiri diberi arti dengan; 1) kemampuan atau kesanggupan (untuk berbuat sesuatu) kekuasaan; 2) kewenangan atas sesuatu.

Robert A. Dahl mengemukakan bahwa istilah kekuasaan mencakup kategori hubungan kemanusiaan yang luas, misalnya hubungan yang berisi pengaruh, otoritas, persuasi, kekerasan, tekanan dan kekuatan fisik. Jadi esensi kekuasaan adalah kemampuan yang memungkinkan seseorang dapat menjadikan orang lain melaksanakan sesuatu yang biasanya ia tidak akan melakukannya dengan kehendaknya sendiri. Kemampuan yang dimaksud ini dapat bersumber dari kekuatan, kekayaan, kedudukan, kualitas pribadi, organisasi dan ideologi.

Jika pengertian politik di atas dikaitkan dengan konsep politik terdahulu, maka kekuasaan politik mencakup segala kewenangan dan kemampuan untuk menyelenggarakan aktivitas politik. Pada masa dulu, berdasarkan informasi Alquran, faktor kekuasaan politik yang meliputi adanya kewenangan, kekuatan, kekayaan maupun kedudukan menjadi salah satu faktor penyebab munculnya perilaku-perilaku korupsi, nepotisme ataupun kolusi. Pesan moral Alquran yang tergambar dalam kisah rencana penyuaipan Ratu Saba' kepada Nabi Sulaiman menjadi indikator pertama adanya korupsi.

Ratu Saba' sebagai penguasa tunggal, berhak dan berkuasa penuh untuk mengeluarkan kebijakan meski bertentangan dengan para menterinya. Walau bertentangan, para mentrinya tidak berani menolak ajakan atasannya. Dengan kekuasaan ditangan kanan dan kekayaan ditangan kiri, Ratu Saba' berusaha bernegosiasi dengan menyuap Nabi Sulaiman untuk menghindari kontak senjata. Namun karena Sulaiman di samping memiliki moralitas yang begitu kuat, karena seorang nabi, juga dibekali kekuasaan dan kekayaan, maka iapun menolak tawaran itu.<sup>16</sup>

Apabila dihubungkan dengan konteks kekinian, faktor kekuasaan politik paling mendominasi dalam menyebabkan seseorang memiliki mental korupsi. Rumusan penyelewengan penggunaan uang negara disebabkan faktor kekuasaan sudah lama dipopulerkan Jhon Emerich Edward Dalberg Acton; *"power tend to corrupt, but absolute power corrupts absolutely"* (kekuasaan lebih cenderung korupsi, tetapi kekuasaan yang berlebihan mengakibatkan korupsi berlebihan pula).<sup>17</sup>

Guna memahami sebab-sebab korupsi sebagai suatu kejahatan dapat dikaji melalui proses analisis teori kriminologi terutama digunakan untuk memberikan petunjuk bagaimana masyarakat berperan serta menaggulangi korupsi dan lebih-lebih mencegahnya. Bagian dari teori atau ilmu pengetahuan krimonologi untuk mengungkap seba-sebab kejahatan korupsi, disebut pendekatan sosiologi kriminil yaitu pengetahuan tentang kejahatan sebagai gejala masyarakat atau sampai di mana letak sebab-sebab kejahatan dalam masyarakat (*etilogi sosial*).<sup>18</sup>

---

<sup>16</sup> QS.Al-Naml[27]:36-37.

<sup>17</sup> Hakim Muda Harahap, *Ayat-ayat Korupsi*, hal.25.

<sup>18</sup> Bongar , WA, *Pengantar Tentang Krimonologi*, (Jakarta: PT.Pembangunan Alika Indonesia, 1981), hal. 27.

Permasalahan korupsi merupakan permasalahan yang sangat sulit untuk diberantas oleh karena sangat kompleks yang menurut Barda Nawawi Arif bahwa hal tersebut disebabkan karena korupsi berkaitan erat dengan kompleksitas masalah lain seperti:

Masalah sikap mental atau moral, masalah pola atau sikap hidup dan budaya sosial, masalah kebutuhan atau tuntutan ekonomi dan struktur atau sistem ekonomi, masalah lingkungan hidup atau sosial dan kesenjangan sosial-ekonomi, masalah struktur atau budaya politik, masalah peluang yang ada di dalam mekanisme pembangunan atau kelemahan birokrasi atau prosedur administrasi (termasuk sistem pengawasan) di bidang keuangan dan pelayanan umum.

Berkaitan dengan perkembangan korupsi di Indonesia selain dapat diselidiki fenomena sosial dalam praktik dengan mencermati secara etologi sosial maka faktor-faktor penyebab korupsi antara lain:<sup>19</sup>

- a. Masih melekatnya budaya *feudal*, dengan perilaku *upetisme*, *premodialisme* dan *nepotisme* yang mementingkan keluarga atau kroninya yang mendorong perbuatan korupsi.
- b. Kesenjangan dalam sistem penggajian dan kesejahteraan dalam bentuk *politic risk* dan *economy risk* sebagai dukungan anggaran, sarana fasilitas materiil karyawan yang tak layak sesuai standar minimal kebutuhan hidup sehingga menjadi potensial dengan elemen perbuatan korupsi.
- c. Lemahnya manajemen kepemimpinan institusi pemerintahan termasuk para pelaku bisnis seperti BUMN, Koperasi, Swasta atau Pengusaha yang tidak memberikan

---

<sup>19</sup> IGM Nurdjana, *Sistem Hukum Pidana dan Bahaya Laten Korupsi*, hal. 30

keteladanan, kesederhanaan atau pola hidup sederhana sehingga kurangnya fungsi kontrol melalui pengawasan melekat sehingga menjadi sangat toleran dengan perbuatan korupsi.

- d. Terjadinya erosi moral pada setiap lapisan sosial masyarakat, rendahnya kadar keimanan moralitas ajaran-ajaran agama dan etika yang hasilnya terjebak dengan mental pengabdian yang buruk dalam perilaku sebagai pegawai, karyawan serta pelaku bisnis lainnya dengan cara korupsi karena ego kepentingan pribadi jauh lebih tinggi daripada kepentingan umum, bangsa dan negara.
- e. Gaya hidup yang konsumtif, sebagai pengaruh negatif yang sangat kuat dari pola kehidupan *eforia neo liberism*, sehingga menjadi terlalu *interes* dan individualitas bahwa nepotisme dan kepentingan keluarga di atas segalanya.

Penyebab, atau pendorong seseorang untuk melakukan tindakan korupsi sebenarnya bervariasi dan beraneka ragam. Akan tetapi, secara umum dapatlah dirumuskan, sesuai dengan pengertian kerja dengan bagan I bahwa *tindakan korupsi dilakukan dengan tujuan mendapatkan keuntungan pribadi atau kelompok atau golongan sendiri*. Dengan berdasarkan pada motif keuntungan pribadi atau golongan ini, dapatlah dipahami korupsi terdapat di mana-mana dan terjadi kapan saja karena masalah korupsi selalu terkait dengan motif yang ada pada setiap insan manusia untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau golongan.

Cara yang ditempuh norma-norma yang berlaku merupakan usaha yang bersifat halal dan ridha. Cara korupsi yang dilakukan untuk memperoleh keuntungan tidak mengikuti dan didasari norma-norma yang berlaku, jelas bahwa hal ini tidak halal dan tidak diridhai. Apabila

tindakan atau usaha ini dilakukan dengan penggunaan dan atau penyalahgunaan kekuasaan atau wewenang atau kesempatan serta lain-lain persyaratan dirumuskan dalam pengertian kerja, usaha dimaksud adalah tindakan korupsi.

Karena masalah korupsi pada dasarnya merupakan masalah umat manusia yang dalam usaha mendapatkan kebutuhan dan atau keinginannya yang dilakukan dengan cara yang tidak mengikuti atau melanggar norma-norma yang berlaku, unsur agama serta pendidikan budi pekerti sangat besar peranannya dalam rangka usaha penanggulangan dan pemberantasan korupsi. Dengan menunjuk kepada pengertian absolute, usaha ke arah penanggulangan atau pemberantasan korupsi perlu dihubungkan dengan motif untuk mendapatkan rezeki, nafkah, atau keuntungan yang berdasarkan pada keseimbangan keserasian, dan keselarasan antara kepentingan lahir dan batin, antara kepentingan jasmani dan rohani. Masalah moral ini sesungguhnya tidak hanya berlaku pada pejabat atau pegawai negeri, tetapi juga terkait dengan pengusaha dan masyarakat pada umumnya, terutama pada diri pimpinan atau pemuka dalam rangka pelaksanaan keteladanan yang baik.

Banyak faktor yang mempengaruhi motif untuk melakukan tindakan korupsi yang menginginkan keuntungan pribadi atau golongan dimaksud. Menurut komisi IV, terdapat tiga indikasi yang menyebabkan meluasnya korupsi di Indonesia, yakni:<sup>20</sup>

- a. Pendapatan gaji yang tidak mencukupi,
- b. Penyalahgunaan kesempatan untuk memperkaya diri, dan

---

<sup>20</sup>Ibid, hal. 32.

c. Penyalahgunaan kekuasaan untuk memperkaya diri.

Komisi IV juga menyatakan kemungkinan meluasnya perbuatan korupsi berhubungan dengan meningkatnya kegiatan dalam bidang ekonomi pembangunan, seperti perluasan pengkreditan, bantuan luar negeri, dan penanaman modal asing. Bagaimana sebenarnya keadaan korupsi di Indonesia? A.S. Harris Sumaridia menjawab bahwa korupsi lahir karena ambruknya nilai-nilai sosial, korupsi kambuh karena adanya penyalahgunaan tujuan wewenang dan kekuasaan, dan korupsi hidup karena sikap dan mental pejabat yang bobrok, baik pejabat tinggi maupun pejabat rendahan. Pendekatan lain, Dr. Andi Hamzah dalam disertasinya menginventarisasikan beberapa penyebab korupsi, yakni:<sup>21</sup>

- a. Kurangnya gaji pegawai negeri dibandingkan dengan kebutuhan yang makin hari makin meningkat;
- b. Latar belakang kebudayaan atau kultur Indonesia yang merupakan sumber atau sebab meluasnya korupsi;
- c. Manajemen yang kurang baik dan control yang kurang efektif dan efisien, yang akan memberi peluang orang untuk korupsi.
- d. Modernisasi mengembangkan korupsi.

Dengan memperhatikan penyebab yang melekat pada setiap orang untuk memperoleh nafkah, rezeki, atau keuntungan, tinggallah pada pertimbangan tentang cara memperolehnya, apakah sesuai dengan norma-norma yang berlaku, baik hukum, etika maupun moral keagamaan atautkah dengan melanggar atau melawan norma ini. Karena masalahnya selalu terkait dengan pribadi perorangan, masalah korupsi ini dapat berkembang pada “dongeng rakyat

---

<sup>21</sup> Ibid, hal. 33.

tentang korupsi”, yakni apabila keadaan telah menunjukkan korupsi dianggap sebagai hal yang sudah biasa. Mengenai hal ini, Gunnar Myrdal<sup>22</sup> mengemukakan bahwa orang-orang yang jelas melakukan perbuatan korupsi masih dapat terus-menerus berbuat demikian tanpa takut akan mendapat hukuman, akan memperkuat keyakinan bahwa bentuk tingkah laku sosial ini sudah lazim di masyarakat.

### C. Dampak Korupsi

Berbagai studi komprehensif mengenai dampak korupsi terhadap ekonomi serta variabel-variabelnya telah banyak dilakukan hingga saat ini. Dari hasil studi tersebut jelas terlihat berbagai dampak negatif akibat korupsi. Korupsi memperlemah investasi dan pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya dalam penelitian yang lebih elaborative dilaporkan bahwa korupsi mengakibatkan penurunan tingkat produktivitas yang dapat diukur melalui berbagai indikator fisik, seperti kualitas jalan raya. Korupsi tidak hanya berdampak terhadap satu aspek kehidupan saja. Korupsi menimbulkan efek domino yang meluas terhadap eksistensi bangsa dan negara.

Meluasnya praktik korupsi di suatu negara akan memperburuk kondisi ekonomi bangsa, misalnya harga barang menjadi mahal dengan kualitas yang buruk, akses rakyat terhadap pendidikan dan kesehatan menjadi sulit, keamanan suatu negara terancam, kerusakan lingkungan hidup, dan citra pemerintahan yang buruk di mata internasional sehingga menggoyahkan sendi-sendi kepercayaan pemilik modal asing, krisis ekonomi yang berkepanjangan, dan Negara pun menjadi semakin terperosok dalam kemiskinan. Berdasarkan Laporan Bank Dunia, Indonesia dikategorikan

---

<sup>22</sup> Ibid, hal. 34



sebagai negara yang utangnya parah, berpenghasilan rendah (*severely indebted low income country*) dan termasuk dalam kategori negara-negara termiskin di dunia seperti Mali dan Ethiopia. Berbagai dampak masif korupsi yang merongrong berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara akan diuraikan di bawah ini.<sup>23</sup>

### 1. Pemusatan Ekonomi pada Elit Kekuasaan

Elit kekuasaan yang dimaksud adalah lingkaran eksekutif, legislatif, dan yudikatif yang berkolaborasi dengan pengusaha, baik dalam lingkaran kekuasaan dipusat maupun di daerah untuk melakukan aktivitas ekonomi. Pengusaha sebagai pemegang kekuasaan modal bagaimanapun juga ingin agar aktivitas ekonomi yang dijalankan mendapat untung sebanyak-banyaknya dengan modal sekecil-kecilnya. Salah satu cara yang dilakukan ialah melalui jalan pintas praktik sogok atau suap untuk memperoleh fasilitas-fasilitas tertentu yang mengaburkan tegaknya aturan yang buat lembaga eksekutif, legislatif, maupun yudikatif.<sup>24</sup>

#### a. Lesunya Pertumbuhan Ekonomi dan Investasi

Korupsi bertanggung jawab terhadap lesunya pertumbuhan ekonomi dan investasi dalam negeri. Korupsi juga mempersulit pembangunan ekonomi dengan membuat distorsi dan ketidak efisienan yang tinggi. Dalam sektor privat, korupsi meningkatkan ongkos niaga karena kerugian dari pembayaran ilegal, ongkos manajemen dalam negosiasi dengan pejabat korup, dan resiko pembatalan perjanjian atau karena penyelidikan. Penanaman modal yang dilakukan oleh

---

<sup>23</sup> Tim Penulis, *Pendidikan Anti-Korupsi Untuk Perguruan Tinggi*, (Jakarta: Kemendibud, 2011), hal. 55.

<sup>24</sup> Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, *Fikih Antikorupsi*, (Jakarta: Pusat Studi Agama dan Peradaban, 2006), hal. 27.

pihak dalam negeri (PMDN) dan asing (PMA) yang semestinya bisa digunakan untuk pembangunan negara menjadi sulit sekali terlaksana, karena permasalahan kepercayaan dan kepastian hukum dalam melakukan investasi, selain masalah stabilitas.

Dari laporan yang diberikan oleh PERC (Political and Economic Risk Consultancy) pada akhirnya hal ini akan menyulitkan pertumbuhan investasi di Indonesia, khususnya investasi asing karena iklim yang ada tidak kondusif. Hal ini jelas karena terjadinya tindak korupsi yang sampai tingkat mengkhawatirkan yang secara langsung maupun tidak mengakibatkan ketidakpercayaan dan ketakutan pihak investor asing untuk menanamkan investasinya ke Indonesia.

Perlu disadari bahwa multinasional sudah terikat pada kode etik internasional dari ICC (International Commerce) yang bersepakat untuk tidak melakukan praktik-praktik korupsi dalam bisnis internasional. Selanjutnya ICC bersama dengan OECD (Organization for Economic Cooperation and Development) mengawasi dan menyerahkan kasus-kasus korupsi yang terjadi untuk diadili di Negara perusahaan tersebut berasal.

Kondisi negara yang korup akan membuat pengusaha multinasional meninggalkannya, karena investasi di Negara yang korup akan merugikan dirinya karena memiliki 'biaya siluman' yang tinggi dalam studinya, Paulo Mauro mengungkapkan dampak korupsi pada pertumbuhan investasi dan belanja pemerintah bahwa korupsi secara langsung dan tidak langsung adalah penghambat pertumbuhan investasi. Berbagai organisasi ekonomi dan pengusaha asing di seluruh dunia menyadari bahwa suburnya korupsi di suatu Negara adalah ancaman serius bagi investasi yang ditanam.

### b. Penurunan Produktifitas

Dengan semakin lesunya pertumbuhan ekonomi dan investasi, maka tidak dapat disanggah lagi, bahwa produktifitas akan semakin menurun. Hal ini terjadi seiring dengan terhambatnya sektor industri dan produksi untuk bisa berkembang lebih baik atau melakukan pengembangan kapasitas. Program peningkatan produksi dengan berbagai upaya seperti pendirian pabrik-pabrik dan usaha produktif baru atau usaha untuk memperbesar kapasitas produksi untuk usaha yang sudah ada menjadi terkendala dengan tidak adanya investasi.

Penurunan produktifitas ini juga akan menyebabkan permasalahan yang lain, seperti tingginya angka PHK dan meningkatnya angka pengangguran. Ujung dari penurunan produktifitas ini adalah kemiskinan masyarakat.

### c. Rendahnya Kualitas Barang dan Jasa Bagi Publik

Ini adalah sepenggal kisah sedih yang dialami masyarakat kita yang tidak perlu terjadi apabila kualitas jalan raya baik sehingga tidak membahayakan pengendara yang melintasinya. Hal ini mungkin juga tidak terjadi apabila tersedia sarana angkutan umum yang baik, manusiawi dan terjangkau. Ironinya pemerintah dan departemen yang bersangkutan tidak merasa bersalah dengan kondisi yang ada, selalu berkelit bahwa mereka telah bekerja sesuai dengan prosedur yang ditetapkan.

Rusaknya jalan-jalan, ambruknya jembatan, tergulingnya kereta api, beras murah yang tidak layak makan, tabung gas yang meledak, bahan bakar yang merusak kendaraan masyarakat, tidak layak dan tidak nyamannya angkutan umum, ambruknya bangunan sekolah, merupakan

serangkaian kenyataan rendahnya kualitas barang dan jasa sebagai akibat korupsi. Korupsi menimbulkan berbagai kekacauan di dalam sektor publik dengan mengalihkan investasi publik ke proyek-proyek lain yang mana sogokan dan upah tersedia lebih banyak.

Pejabat birokrasi yang korup akan menambah kompleksitas proyek tersebut untuk menyembunyikan berbagai praktek korupsi yang terjadi. Pada akhirnya korupsi berakibat menurunkan kualitas barang dan jasa bagi publik dengan cara mengurangi pemenuhan syarat-syarat keamanan bangunan, syarat-syarat material dan produksi, syarat-syarat kesehatan, lingkungan hidup, atau aturan-aturan lain. Korupsi juga mengurangi kualitas pelayanan pemerintahan dan infrastruktur dan menambahkan tekanan-tekanan terhadap anggaran pemerintah.

#### d. Menurunnya Pendapatan Negara

Dari Sektor Pajak Sebagian besar negara di dunia ini mempunyai sistem pajak yang menjadi perangkat penting untuk membiayai pengeluaran pemerintahnya dalam menyediakan barang dan jasa publik, sehingga boleh dikatakan bahwa pajak adalah sesuatu yang penting bagi negara.

Di Indonesia, dikenal beberapa jenis pajak seperti Pajak penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPn), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Meterai (BM), dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan atau Bangunan (BPHTB). Di tingkat pemerintah daerah, dikenal juga beberapa macam pajak seperti Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Pajak Restoran, dan lain-lain. Pada saat ini APBN sekitar 70% dibiayai oleh pajak di mana Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak

Pertambahan Nilai (PPn) merupakan jenis pajak yang paling banyak menyumbang. Pajak berfungsi sebagai stabilisasi harga sehingga dapat digunakan untuk mengendalikan inflasi, di sisi lain pajak juga mempunyai fungsi redistribusi pendapatan, di mana pajak yang dipungut oleh negara selanjutnya akan digunakan untuk pembangunan, dan pembukaan kesempatan kerja yang pada akhirnya akan menyejahterakan masyarakat.

Pajak sangat penting bagi kelangsungan pembangunan negara dan kesejahteraan masyarakat juga pada akhirnya. Kondisi penurunan pendapatan dari sektor pajak diperparah dengan kenyataan bahwa banyak sekali pegawai dan pejabat pajak yang bermain untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan memperkaya diri sendiri. Kita tidak bisa membayangkan apabila ketidakpercayaan masyarakat terhadap pajak ini berlangsung lama, tentunya akan berakibat juga pada percepatan pembangunan, yang rugi juga masyarakat sendiri, inilah letak ketidakadilan tersebut.

#### e. Meningkatnya Hutang Negara

Kondisi perekonomian dunia yang mengalami resesi dan hampir melanda semua Negara termasuk Amerika Serikat dan negara-negara Eropa, memaksa negara-negara tersebut untuk melakukan hutang untuk mendorong perekonomiannya yang sedang melambat karena resesi dan menutup biaya anggaran yang defisit, atau untuk membangun infrastruktur penting. Bagaimana dengan hutang Indonesia?

Korupsi yang terjadi di Indonesia akan meningkatkan hutang luar negeri yang semakin besar. Dari data yang diambil dari Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutang, Kementerian Keuangan RI, disebutkan bahwa total hutang pemerintah per

31 Mei 2011 mencapai US\$201,07 miliar atau setara dengan Rp. 1.716,56 triliun, sebuah angka yang fantastis. Hutang tersebut terbagi atas dua sumber, yaitu pinjaman sebesar US\$69,03 miliar (pinjaman luar negeri US\$68,97 miliar) dan Surat Berharga Negara (SBN) sebesar US\$132,05 miliar.

Berdasarkan jenis mata uang, utang sebesar US\$201,1 miliar tersebut terbagi atas Rp956 triliun, US\$42,4 miliar, 2.679,5 miliar Yen dan 5,3 miliar Euro. Posisi utang pemerintah terus meningkat dari tahun ke tahun. Pada 2009, jumlah utang yang dibukukan pemerintah sebesar US\$169,22 miliar (Rp1.590,66 triliun). Tahun 2010, jumlahnya kembali naik hingga mencapai US\$186,50 miliar (Rp1.676,85 triliun). Posisi utang pemerintah saat ini juga naik dari posisi per April 2011 yang sebesar US\$197,97 miliar. Jika menggunakan PDB Indonesia yang sebesar Rp6.422,9 triliun, maka rasio hutang Indonesia tercatat sebesar 26%.<sup>25</sup>

## 2. Diskriminasi Kebijakan

Para pengusaha yang dekat dengan elit kekuasaan seringkali mendapatkan perlindungan khusus bagi kepentingan usahanya, sehingga muncullah diskriminasi perlakuan elit kekuasaan terhadap warga masyarakat. Diskriminasi ini terkait erat dengan proses penegakan hukum yang diberlakukan. Contoh yang paling konkrit adalah perlakuan pemerintah terhadap PKL (pedagang kaki lima) liar, gelandangan, dan anak-anak jalan yang harus di gusur karena tidak mematuhi aturan pemerintah, sementara para pengusaha yang menyalahi izin usaha dibiarkan tanpa proses hukum.

Polisi dan jaksa mempersalahkan aktivitas PKL yang hanya mencari sesuap nasi untuk menghidupi keluarganya,

<sup>25</sup> Tim Penulis, *Pendidikan Anti-korupsi Untuk Perguruan Tinggi*, hal.56-58.

namun pada sisi lain membiarkan korupsi dan manipulasi yang dilakukan para pengusaha maupun pejabat tinggi. Pada hal ini, penegak hukum terlihat hanya menegakkan *street justice* (keadilan jalan), dengan sasaran rakyat kecil yang tidak memiliki kekuasaan dan modal.

### 3. Pembangunan Yang Tidak Transparan

Kewajiban warga Negara untuk membayar pajak adalah agar proses pembangunan dapat berkelanjutan, namun dengan birokrasi pemerintahan yang korup, maka pajak tersebut tidak dikembalikan kepada rakyat dalam bentuk pembangunan tetapi dipakai untuk menumpuk kekayaan pribadi pejabat beserta kroninya.

Selain itu, akibat korupsi, dana pembangunan untuk proyek pembangunan fisik maupun peningkatan SDM disunat, atau dimanipulasi dengan menggunakan data fiktif. Karena anggaran pembangunan telah disunat, maka kualitas pembangunan menjadi menurun. Yang terjadi adalah rapuhnya bangunan sekolah, jembatan, gedung-gedung, dan proyek-proyek lainnya. Karena kualitas bangunan rendah dan cepat rusak, maka perlu dilakukan renovasi, padahal semestinya dana itu bisa dialokasikan bagi pembangunan proyek lain.<sup>26</sup>

### 4. Terhambatnya Pertumbuhan Ekonomi

Beberapa studi menunjukkan bahwa korupsi mempunyai efek negatif terhadap pertumbuhan ekonomi.<sup>27</sup> Karena birokrasi yang korup, maka pemilik modal luar negeri mengalami berbagai hambatan untuk berinvestasi di dalam negeri. Demikian juga dengan investasi yang telah ada,

<sup>26</sup> Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, *Fikih Antikorupsi*, hal. 27-28.

<sup>27</sup> Tim editor Kompas, "belajar dari cina", dalam *Buku Surga Para Koruptor*, (Jakarta: Kompas, 2004).

maka memilih untuk memindahkan modalnya ke Negara lain yang lebih ramah terhadap investasi luar negeri. Karena terjadi pelarian modal keluar negeri (*capital outflow*), maka pertumbuhan ekonomi akan terlambat, karena masuknya investasi luar negeri (*capital outflow*) sebenarnya sangat bermanfaat untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi rakyat.

## 5. Ekonomi Biaya Tinggi

Aktivitas ekonomi yang dibangun oleh sebuah sistem yang korup akan berdampak pada tingginya biaya yang harus dikeluarkan oleh para pelaku ekonomi. Biaya yang semestinya dapat ditekan, akhirnya harus ditambah dengan biaya yang dikeluarkan untuk menyuap pejabat atau membayar birokrasi. Akibatnya, pengusaha tidak bisa lagi berfikir tentang peningkatan kualitas produk dan efisiensi perubahan. Dan semua beban tersebut akan ditanggung oleh konsumen (rakyat umum).<sup>28</sup>

## 6. Kesejahteraan Pegawai dan Dampak Sosial Kemiskinan Rakyat

Dampak langsung korupsi bagi kesejahteraan pegawai adalah ketidakmampuan pemerintah untuk menggaji para pegawai secara layak. Korupsi politik (kompromi politik untuk membuat kebijakan yang tidak memihak kepada rakyat) yang dilakukan oleh anggota legislatif dan eksekutif membuat mereka bersepakat untuk menaikkan gaji dan tunjangan bagi pejabat tinggi dan wakil rakyat, sedangkan kesejahteraan pegawai kecil terabaikan. Akhirnya terjadi kesenjangan pendapatan antara elite birokrasi dengan pegawai rendahan. Betapa mewahnya pegawai elite birokrasi diseluruh departemen dan instansi pemerintahan, sementara pegawai rendahan harus hidup dengan gaji yang pas-pasan.

<sup>28</sup> Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, *Fikih Antikorupsi*, Hal. 28-29.



Korupsi pada akhirnya tidak hanya membuat pelayanan publik menjadi buruk, akan tetapi juga menimbulkan dampak sosial lainnya. Korupsi dalam bidang kesehatan, misalnya tidak hanya membuat biaya kesehatan menjadi tinggi sehingga orang miskin tidak dapat jaminan kesehatan yang memadai, tetapi akibat lebih jauh adalah banyaknya jumlah masyarakat yang tidak sehat dan bahkan kekurangan gizi (gizi buruk, busung lapar, lumpuh layuh). Contoh lain, korupsi dalam bidang pendidikan tidak hanya akan membuat biaya pendidikan menjadi mahal sehingga orang miskin sulit untuk menyekolahkan anaknya dan banyaknya angka putus sekolah, tetapi akibat lebih jauh adalah tingginya angka buta huruf, dan rendahnya kualitas sumberdaya manusia (SDM).

Jika terjadi demikian, bukan saja indeks pembangunan manusia Indonesia akan semakin rendah, akan tetapi akibat lebih jauh adalah dalam jangka sepuluh sampai dua puluh tahun kedepan kita akan kehilangan generasi (*lost generation*) yang berkualitas. Dapat dibayangkan, dalam kompetensi dunia global yang akan datang, Sumber Daya Manusia akan diisi oleh mereka yang memiliki tingkat pendidikan dan kesehatan sangat rendah.<sup>29</sup>

Bagi masyarakat miskin korupsi mengakibatkan dampak yang luar biasa dan saling bertaut satu sama lain. Pertama, dampak langsung yang dirasakan oleh orang miskin yakni semakinmahalnya jasa berbagai pelayanan publik, rendahnya kualitas pelayanan, dan pembatasanakses terhadap berbagai pelayanan vital seperti air, kesehatan, dan pendidikan. Kedua,dampak tidak langsung terhadap orang miskin yakni pengalihan sumber daya milik publik untuk kepentingan pribadi dan kelompok, yang seharusnya diperuntukkan guna

---

<sup>29</sup> Ibid, hal. 29-30

kemajuan sektor sosial dan orang miskin, melalui pembatasan pembangunan. Hal ini secara langsung memiliki pengaruh kepada langgengnya kemiskinan.

a. Mahalnya Harga Jasa dan Pelayanan Publik

Praktek korupsi yang terjadi menciptakan ekonomi biaya tinggi. Beban yang ditanggung para pelaku ekonomi akibat korupsi disebut *high cost economy*. Dari istilah pertama di atas terlihat bahwa potensi korupsi akan sangat besar terjadi di Negara-negara yang menerapkan kontrol pemerintah secara ketat dalam praktek perekonomian. Alias memiliki kekuatan monopoli yang besar, karena rentan sekali terhadap penyalahgunaan. Yang disalahgunakan adalah perangkat-perangkat publik atau pemerintahan dan yang diuntungkan adalah kepentingan-kepentingan yang bersifat pribadi.

Kondisi ekonomi biaya tinggi ini berimbas pada mahalanya harga jasa dan pelayanan publik, karena harga yang ditetapkan harus dapat menutupi kerugian pelaku ekonomi akibat besarnya modal yang dilakukan karena penyelewengan yang mengarah ke tindak korupsi.

b. Pengentasan Kemiskinan Berjalan Lambat

Jumlah penduduk miskin (hidup di bawah garis kemiskinan) di Indonesia pada Maret 2011 mencapai 30,02 juta orang (12,49 persen), turun 1,00 juta orang (0,84 persen) dibandingkan dengan penduduk miskin pada Maret 2010 yang sebesar 31,02 juta orang (13,33 persen). Selama periode Maret 2010-Maret 2011, penduduk miskin di daerah perkotaan berkurang sekitar 0,05 juta orang (dari 11,10 juta orang pada Maret 2010 menjadi 11,05 juta orang pada Maret 2011), sementara di daerah perdesaan

berkurang sekitar 0,95 juta orang (dari 19,93 juta orang pada Maret 2010 menjadi 18,97 juta orang pada Maret 2011) (BPS: 1 Juli 2011).

Jumlah Penduduk Miskin Menurut Daerah Maret 2010 – Maret 2011

DAERAH/TAHUN	JUMLAH PENDUDUK MISKIN (JUTA ORANG)	PERSENTASE PENDUDUK MISKIN
1	2	3
<b>Perkotaan</b>		
Maret 2010	11,10	9,87
Maret 2011	11,05	9,23
<b>Perdesaan</b>		
Maret 2010	19,93	16,56
Marett 2011	18,97	15,72
<b>Kota dan Desa</b>		
Maret 2010	31,02	13,33
Maret 2011	30,02	12,49

Sumber : Data Susenas Maret 2010-Maret 2011

Pengentasan kemiskinan dirasakan sangat lambat. Hal ini terjadi karena berbagai sebabseperti lemahnya koordinasi dan pendataan, pendanaan dan lembaga. Karena korupsi dan permasalahan kemiskinan itu sendiri yang pada akhirnya akan membuat masyarakat sulit untuk mendapatkan akses ke lapangan kerja yang disebabkan latar belakang pendidikan, sedangkan untuk membuat pekerjaan sendiri banyak terkendala oleh kemampuan, masalah teknis dan pendanaan.

#### a. Terbatasnya Akses Bagi Masyarakat Miskin

Korupsi yang telah menggurita dan terjadi di setiap aspek kehidupan mengakibatkan *high-cost economy*, di mana semua harga-harga melambung tinggi dan semakin tidak terjangkau oleh rakyat miskin. Kondisi ini mengakibatkan rakyat miskin semakin tidak bisa mendapatkan berbagai macam akses dalam kehidupannya. Harga bahan pokok seperti beras, gula, minyak, susu dan sebagainya saat ini

sangat tinggi. Kondisi ini mengakibatkan penderitaan khususnya bagi bayi dan anak-anak karena ketercukupan gizinya kurang. Untuk mendapatkan bahan pokok ini rakyat miskin harus mengalokasikan sejumlah besar uang dari sedikit pendapatan yang dimilikinya.

Rakyat miskin tidak bisa mengakses jasa dengan mudah seperti: pendidikan, kesehatan, rumah layak huni, informasi, hukum dsb. Rakyat miskin lebih mendahulukan mendapatkan bahan pokok untuk hidup daripada untuk sekolah. Kondisi ini akan semakin menyudutkan rakyat miskin karena mengalami kebodohan. Dengan tidak bersekolah, maka akses untuk mendapatkan pekerjaan yang layak menjadi sangat terbatas, yang pada akhirnya rakyat miskin tidak mempunyai pekerjaan dan selalu dalam kondisi yang miskin seumur hidup. Situasi ini layak disebut sebagai lingkaran setan.

#### b. Meningkatnya Angka Kriminalitas

Dampak korupsi, tidak diragukan lagi dapat menyuburkan berbagai jenis kejahatan dalam masyarakat. Melalui praktik korupsi, sindikat kejahatan atau penjahat perseorangan dapat leluasa melanggar hukum, menyusupi berbagai organisasi negara dan mencapai kehormatan. Di India, para penyelundup yang populer, sukses menyusup ke dalam tubuh partai dan memegang jabatan penting. Di Amerika Serikat, melalui suap, polisi korup menyediakan proteksi kepada organisasi-organisasi kejahatan dengan pemerintahan yang korup.

Semakin tinggi tingkat korupsi, semakin besar pula kejahatan.

Menurut Transparency International, terdapat pertalian erat antara korupsi dan kualitas serta kuantitas kejahatan. Rasionya, ketika korupsi meningkat, angka kejahatan yang

terjadi juga meningkat. Sebaliknya, ketika korupsi berhasil dikurangi, maka kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum (*law enforcement*) juga meningkat. Jadi bisa dikatakan, mengurangi korupsi dapat juga (secara tidak langsung) mengurangi kejahatan lain dalam masyarakat.

Bahwa penegakan hukum di suatu negara selain tergantung dari hukum itu sendiri, profesionalisme aparat, sarana dan prasarana, juga tergantung pada kesadaran hukum masyarakat. Memang secara ideal, angka kejahatan akan berkurang jika timbul kesadaran masyarakat (*marginal deterrence*). Kondisi ini hanya terwujud jika tingkat kesadaran hukum dan kesejahteraan masyarakat sudah memadai.

c. Solidaritas Sosial Semakin Langka dan Demoralisasi

Korupsi yang begitu masif yang terjadi membuat masyarakat merasa tidak mempunyai pegangan yang jelas untuk menjalankan kehidupannya sehari-hari. Kepastian masa depan yang tidak jelas serta himpitan hidup yang semakin kuat membuat sifat kebersamaan dan kegotong-royongan yang selama ini dilakukan hanya menjadi retorika saja. Masyarakat semakin lama menjadi semakin individualis yang hanya mementingkan dirinya sendiri dan keluarganya saja.

Mengapa masyarakat melakukan hal ini dapat dimengerti, karena memang sudah tidak ada lagi kepercayaan kepada pemerintah, sistem, hukum bahkan antar masyarakat sendiri. Orang semakin segan membantu sesamanya yang terkena musibah atau bencana, karena tidak yakin bantuan yang diberikan akan sampai kepada yang membutuhkan dengan optimal. Ujungnya mereka yang terkena musibah akan semakin menderita.

Di lain sisi, partai-partai politik berlomba-lomba mendirikan posko bantuan yang tujuan utamanya adalah sekadar mencari dukungan suara dari masyarakat yang terkena musibah atau bencana, bukan secara tulus meringankan penderitaan dan membantu agar lebih baik. Solidaritas yang ditunjukkan adalah solidaritas palsu. Sudah tidak ada lagi keikhlasan, bantuan yang tulus, solidaritas yang jujur apa adanya. Kondisi ini akan menciptakan demoralisasi, kemerosotan moral dan akhlak khususnya bagi generasi muda yang terus menerus terpapar oleh kepalsuan yang ditunjukkan oleh para elit politik, pejabat penguasa, penegak hukum, artis dan selebritis yang setiap hari bisa dilihat dari berbagai macam media.<sup>30</sup>

## 7. Runtuhnya Otoritas Pemerintah

### a. Matinya Etika Sosial Politik

Korupsi bukan suatu bentuk tindak pidana biasa karena ia merusak sendi-sendi kehidupan yang paling dasar yaitu etika sosial bahkan kemanusiaan. Kejujuran sudah tidak ditegakkan lagi dan yang paradoks adalah siapapun yang meniadakan kejujuran justru akan diberikan sanksi sosial dan politik oleh otoritas menteri, aparat penguasa bahkan oleh masyarakat sendiri. Kejujuran yang dihadapi dengan kekuatan politik adalah sesuatu yang tidak mendidik dan justru bertentangan dengan etika dan moralitas.

Pada saat ini kekuatan politik sangat dominan, sehingga suatu kelompok politik akan rela melindungi anggotanya dengan segala cara, meskipun anggotanya tersebut jelas-jelas bersalah atau melakukan korupsi. Hal ini sangat melukai nurani masyarakat, padahal mereka adalah wakil rakyat yang seharusnya melindungi kepentingan rakyat.

<sup>30</sup> Tim Penulis, *Pendidikan Anti-Korupsi Untuk Perguruan Tinggi*, hal. 59-61.

Melindungi seorang koruptor dengan kekuatan politik adalah salah satu indikasi besar runtuhnya etika sosial dan politik. Gejala ini semakin lama semakin menguat, masyarakat dengan jelas dapat menilai dari berbagai pemberitaan media masa siapa yang bersalah siapa yang benar, namun semua itu dikaburkan dengan politik yang sangat licik, dengan berbagai alasan seperti demi keamanan negara atau keselamatan petinggi negara.

Ketika nilai-nilai kejujuran dan nurani dicampakkan, maka tak pelak lagi kebangkrutan etika akan berimbas kepada seluruh sendi kehidupan masyarakat secara umum. Banyak pejabat negara, wakil rakyat atau petinggi partai politik yang tertangkap karena korupsi namun tidak menunjukkan perasaan bersalah, malu ataupun jera di depan umum. Mereka bertindak seolah-olah selebritis dengan tetap melambaikan tangan atau tersenyum lebar seolah-olah tidak bersalah. Hal ini terjadi karena anggapan bahwa mereka akan bebas dari tuduhan atau akan dengan mudah bebas dengan memberikan upeti kepada penegak hukum yang mengadilinya. Sungguh tidak mempunyai nurani.

b. Tidak Efektifnya Peraturan dan Perundang-undangan

Secara umum peraturan dan perundang-undangan berfungsi untuk mengatur sesuatu yang substansial dan merupakan instrumen kebijakan (*beleids instrument*) yang berguna untuk memecahkan suatu masalah yang ada di dalam masyarakat. Dengan adanya peraturan dan perundang-undangan diharapkan berbagai permasalahan yang terjadi di masyarakat dapat dipecahkan dengan baik, jelas dan berkeadilan, yang pada akhirnya akan memuaskan semua pihak. Di lain sisi dalam masyarakat

muncul berbagai kemungkinan apabila dihadapkan dalam suatu permasalahan.

Secara alamiah seseorang selalu ingin dimenangkan dalam suatu perkara atau masalah atau diposisikan dalam keadaan benar. Oleh sebab itu banyak upaya yang dilakukan oleh seseorang dalam memenangkan perkara dan masalahnya di depan hukum, dari upaya yang positif dengan mengumpulkan berbagai barang bukti dan saksi yang menguatkan sampai kepada hal-hal lain yang negatif dan berlawanan dengan hukum, seperti menyuap, memberikan iming-iming, gratifikasi bahkan sampai kepada ancaman nyawa.

Di sisi sebaliknya, aparat hukum yang semestinya menyelesaikan masalah dengan fair dan tanpa adanya unsur pemihakan, seringkali harus mengalahkan integritasnya dengan menerima suap, iming-iming, gratifikasi atau apapun untuk memberikan kemenangan. Kondisi ini sudah semakin merata melanda aparat hukum yang ada di negeri ini, sehingga memunculkan anekdot di masyarakat bahwa hukum itu hanya adil bagi yang memiliki uang untuk menyuap, sedangkan bagi masyarakat miskin keadilan hanyalah angan-angan saja. Peraturan dan perundang-undangan yang berlaku menjadi mandul karena setiap perkara selalu diselesaikan dengan korupsi.

#### c. Birokrasi Tidak Efisien

Survei terbaru yang dilakukan oleh PERC menunjukkan, bahwa tiga Negara Indonesia, India, dan Filipina adalah negara dengan performa birokrasi yang paling buruk di Asia. Sedang Singapura dan Hong Kong adalah yang paling efisien. PERC menilai buruknya kinerja birokrasi di



ketiga Negara ini tidak hanya perlakuan terhadap warga negaranya sendiri, tetapi juga asing. Tidak efisiennya birokrasi ini dianggap sebagai faktor yang masuk menghalangi investasi asing masuk ke Negara tersebut.

Dalam peringkat PERC ini, Indonesia menempati posisi nomor dua terburuk di Asia setelah India. Dalam standar angka 1 terbaik sampai 10 terburuk, India teratas dengan skor 9,41, diikuti oleh Indonesia (8,59), Filipina (8,37), Vietnam (8,13), dan Cina (7,93). Malaysia di tempat keenam dari bawah dengan skor 6,97, diikuti oleh Taiwan (6,60), Jepang (6,57), Korea Selatan (6,13), dan Thailand (5,53). Singapura menduduki peringkat telah memiliki birokrasi yang paling efisien, dengan skor 2,53, diikuti oleh Hong Kong. Kondisi ini sebenarnya sangat berlawanan dengan tujuan dan fungsi birokrasi diadakan yaitu untuk memberikan pelayanan kepada publik.

Dalam konteks ini birokrasi memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan pemerintahan dalam menjalankan program dan kebijakannya untuk dirasakan publik. Pemerintahan dalam konteks birokrasi diharapkan mempunyai organisasi birokrasi yang memiliki keunggulan teknis bentuk organisasi, ketepatan, kecepatan dan kejelasan, pengurangan friksi dan biaya material maupun personal dalam titik optimal.

Dalam kenyataan yang terjadi dalam birokrasi ini adalah ketidak efisienan. Banyak investor yang tertarik untuk menanamkan modalnya ke Indonesia, namun untuk mendapatkan perizinan usaha dan investasi harus melalui birokrasi yang panjang dan berbelit. Ada 10-12 prosedur (meja) yang harus dilewati dan ketidakjelasan waktu penyelesaian pengurusan menjadi sangat rentan terhadap

tindakan korupsi. Pada akhirnya suap adalah jalan yang banyak ditempuh untuk itu.

Itu hanya sekadar contoh birokrasi dalam pengurusan izin usaha dan investasi, bagaimana dengan yang lain, seperti birokrasi politik dan sebagainya? Birokrasi seharusnya berorientasi kepada rakyat dengan mengutamakan kepentingan rakyat. Apabila birokrasi masih mengedepankan kepentingan sendiri atau kelompok, maka tidak pernah ada jaminan bahwa birokrasi akan menjadi efisien.<sup>31</sup>

#### 8. Dampak terhadap Politik dan Demokrasi

Dalam masyarakat yang permisif terhadap korupsi, sistem politik juga akan terkena dampak yang sangat dahsyat. Misalnya, jika semua proses pemilihan umum (nasional, daerah, legislatif, eksekutif) tidak dapat terhindar dari yang namanya *money politics*, penggelembungan suara, dan penggandaan kertas suara, maka pemilu tersebut akan menghasilkan orang-orang (anggota DPR, DPD, DPRD, presiden, wakil presiden, gubernur, bupati, walikota, dan sebagainya) yang secara legitimasi, moralitas, dan kualitas dipertanyakan. Kandidat yang terpilih belum tentu yang terbaik dalam proses pemilihan yang koruptif, karena kemampuan finansial sangat menentukan.

Jika proses pemilu menjadi mahal (untuk membeli suara dan dukungan), maka hanya kandidat yang mempunyai kemampuan finansial tinggi yang mempunyai kesempatan lebih besar untuk memenangkan pemilihan. Jika tidak memilih kemampuan finansial tinggi, seorang kandidat akan mencari “Bandar” (biasanya pengusaha tidak bersih) yang bersedia membiayai proses pencalonannya. Jika calon seperti ini yang menang, maka dipastikan ia akan memberikan

<sup>31</sup> Ibid, hal. 61-63.

konpensasi kepada “bandar” berupa proyek-proyek yang dimenangkan tanpa melalui proses tender atau lelang yang transparan.

Dari sinilah muncul yang namanya kolusi antara pejabat dan pengusaha. Dengan kolusi ini, maka sistem politisi dan birokrasi Negara tidak akan berjalan sebagaimana mestinya. Tingginya angka korupsi di Indonesia telah menyebabkan sistem politik dan ketatanegaraan rusak, karena praktik korupsi telah berlangsung secara merata dan membuat larut hampir semua elit politik. Sejarah mencatat runtuhnya rezim Orde Baru serta jatuhnya presiden Abdurrahman Wahid salah satunya adalah karena isu KKN.

Selain itu, korupsi juga membuat seekor pertahanan dan keamanan menjadi rapuh. Hal ini disebabkan oleh dua hal. *Pertama*, porsi besar anggaran militer berasal dari dana non-budgeter. Dana nonbudgeter tersebut bisa berasal dari sumber yang jelas, seperti bisnis militer, dan juga sumber yang tidak jelas, seperti pungutan liar atau suka rela dari sektor-sektor illegal (perjudian, tempat hiburan, dan sebagainya). Dana non-budgeter tersebut sulit dilacak dan tidak transparan. *Kedua*, sebagian pengadaan peralatan militer berbiaya tinggi tetapi berkualitas rendah. Akibatnya, sistem pertahanan kita tidak memadai untuk menjaga luas wilayah Indonesia.<sup>32</sup>

#### a. Munculnya Kepemimpinan Korup

Kondisi politik yang carut marut dan cenderung sangat koruptif menghasilkan masyarakat yang tidak demokratis. Perilaku koruptif dan tindak korupsi dilakukan dari tingkat yang paling bawah. Konstituen didapatkan dan berjalan karena adanya suap yang diberikan oleh calon-

---

<sup>32</sup> Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, *Fikih Antikorupsi*, hal. 30-31.

calon pemimpin partai, bukan karena simpati atau percaya terhadap kemampuan dan kepemimpinannya.

Hubungan transaksional sudah berjalan dari dulu yang pada akhirnya pun memunculkan pemimpin yang korup juga karena proses yang dilakukan juga transaksional. Masyarakat juga seolah-olah digiring untuk memilih pemimpin yang korup dan diberikan mimpi-mimpi dan janji akan kesejahteraan yang menjadi dambaan rakyat sekaligus menerima suap dari calon pemimpin tersebut.

b. Hilangnya Kepercayaan Publik pada Demokrasi

Demokrasi yang diterapkan di Indonesia sedang menghadapi cobaan berat yakni berkurangnya kepercayaan masyarakat terhadap demokrasi. Hal ini dikarenakan terjadinya tindak korupsi besar-besarnya yang dilakukan oleh petinggi pemerintah, legislatif atau petinggi partai politik. Kondisi ini mengakibatkan berkurangnya bahkan hilangnya kepercayaan publik terhadap pemerintahan yang sedang berjalan. Masyarakat akan semakin apatis dengan apa yang dilakukan dan diputuskan oleh pemerintah. Kapatisme yang terjadi ini seakan memisahkan antara masyarakat dan pemerintah yang akan terkesan berjalan sendiri-sendiri.

Hal ini benar-benar harus diatasi dengan kepemimpinan yang baik, jujur bersih dan adil. Sistem demokrasi yang dijalankan Indonesia masih sangat muda, walaupun kelihatannya stabil namun menyimpan berbagai kerentanan. Tersebar kekuasaan ditangan banyak orang ternyata dijadikan peluang bagi merajalelanya penyuapan. Reformasi yang dilakukan tanpa ada landasan hukum yang kuat justru melibatkan pembukaan sejumlah lokus ekonomi

bagi penyuapan, yang dalam praktiknya melibatkan para broker bahkan menumbuhkan mafia.

c. Menguatnya Plutokrasi

Korupsi yang sudah menyandera pemerintahan pada akhirnya akan menghasilkan konsekuensi menguatnya plutokrasi (sistem politik yang dikuasai oleh pemilik modal atau kapitalis) karena sebagian orang atau perusahaan besar melakukan 'transaksi' dengan pemerintah, sehingga pada suatu saat merekalah yang mengendalikan dan menjadi penguasa di negeri ini.

Perusahaan-perusahaan besar ternyata juga ada hubungannya dengan partai-partai yang ada di kancah perpolitikan negeri ini, bahkan beberapa pengusaha besar menjadi ketua sebuah partai politik. Tak urung antara kepentingan partai dengan kepentingan perusahaan menjadi sangat ambigu.

Perusahaan-perusahaan tersebut menguasai berbagai hajat hidup orang banyak, seperti; bahan bakar dan energi, bahan makanan dasar dan olahan, transportasi, perumahan, keuangan dan perbankan, bahkan media masa di mana pada saat ini setiap stasiun televisi dikuasai oleh oligarki tersebut. Kondisi ini membuat informasi yang disebar luaskan selalu mempunyai tendensi politik tertentu dan ini bisa memecah belah rakyat karena begitu biasanya informasi.

d. Hancurnya Kedaulatan Rakyat

Dengan semakin jelasnya plutokrasi yang terjadi, kekayaan negara ini hanya dinikmati oleh sekelompok tertentu bukan oleh rakyat yang seharusnya. Perusahaan besar mengendalikan politik dan sebaliknya juga politik digunakan untuk keuntungan perusahaan besar.

Bila kita melihat sisi lain politik, seharusnya kedaulatan ada di tangan rakyat. Namun yang terjadi sekarang ini adalah kedaulatan ada di tangan partai politik, karena anggapan bahwa partailah bentuk representasi rakyat. Partai adalah dari rakyat dan mewakili rakyat, sehingga banyak orang yang menganggap bahwa wajar apabila sesuatu yang didapat dari Negara dinikmati oleh partai (rakyat).

Kita melihat pertarungan keras partai-partai politik untuk memenangkan pemilu, karena yang menanglah yang akan menguasai semuanya (*the winner takes all*). Tapi bukannya sudah jelas bahwa partai politik dengan kendaraan perusahaan besar sejalan yang di atas kertas akan memenangkan pertarungan tersebut. Artinya sekali lagi, hanya akan ada sekelompok orang saja yang menang dan menikmati kekayaan yang ada. Hal ini akan terus berulang dari masa ke masa. Rakyat terus terombang-ambing dalam kemiskinan dan ketidakjelasan masa depan.<sup>33</sup>

## 9. Moral Masyarakat

Dampak paling nyata dari korupsi adalah munculnya moral masyarakat. Bagaimana korupsi mampu merubah pandangan hidup masyarakat yang penuh semangat gotong royong dan kekeluargaan berubah menjadi masyarakat yang berpaham kebendaan. Dari masyarakat yang suka menolong menjadi masyarakat yang selalu mengharap pamrih atas setiap bantuan yang diberikan. Perubahan pola sikap yang demikian membawa ruang sendiri pada korupsi untuk terus-menerus menjadi bagian dari sistem moral masyarakat Indonesia. Di antara dampak korupsi bagi moral masyarakat sebagai berikut:<sup>34</sup>

---

<sup>33</sup> Tim Penulis, *Pendidikan Anti-Korupsi Untuk Perguruan Tinggi*, hal. 63-64.

<sup>34</sup> Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, *Fikih Antikorupsi*, hal. 35.

a. Menciptakan Moral Masyarakat yang Munafik

Ketika seseorang membutuhkan surat keterangan dari kantor pemerintah dan surat itu sudah selesai dibuat, maka yang bersangkutan langsung bertanya, “Berapa uangnya, Pak?” pernyataan itu mencerminkan betapa untuk memperoleh pelayanan publik seseorang harus membayar dengan harga yang ditentukan sendiri oleh aparat pemerintah, padahal yang bersangkutan telah digaji oleh Negara untuk melakukan tugas-tugasnya itu.

b. Menyuburkan Budaya Menjilat

Ketika korupsi sudah menjadi bagian dalam kehidupan sosial masyarakat, yang terjadi selanjutnya adalah korupsi menjadi penopang dalam setiap pengambilan keputusan. Pada masyarakat yang korup, tidak ada lagi istilah halal dan haram ataupun baik dan buruk. Yang ada adalah bagaimana sesuatu yang dilakukan berhasil dan sesuai dengan keinginan meskipun bertabrakan dengan norma-norma luhur yang berkembang dalam masyarakat. Sehingga banyak orang yang mau merendahkan diri sendiri asal sang pejabat atau pemimpin mau mengakomodasi kepentingannya.

Dalam hubungannya dengan atasan, koruptor selalu memposisikan diri sebagai bawahan yang tunduk dan patuh atas tugas-tugas yang dibebankan atasan, padahal sang atasan memanfaatkan tugas tersebut untuk kepentingan dirinya. Model orang seperti ini sudah tidak malu lagi untuk menjilat di muka atasan. Tidak ada lagi rasionalitas yang mampu mengendalikan untuk berkata “Tidak” kepada atasan yang mempunyai jabatan basah.

c. Mendidik Masyarakat Menjadi Penipu

Ciri yang cukup menonjol dari seorang koruptor adalah sikapnya yang tidak jujur, terhadap orang lain maupun terhadap dirinya sendiri. Semakin ketidakjujuran itu diketahui orang lain, semakin banyak orang yang ditipu atas perbuatannya. Ketika koruptor adalah pejabat publik yang diwajibkan oleh Undang-Undang untuk menyerahkan daftar kekayaan kepada Komisi Penyidikan Kekayaan Pejabat, yang terjadi adalah bahwa orang yang bersangkutan tidak mengembalikan daftar kekayaannya atau dia melakukan kebohongan publik dengan menutupi daftar kekayaan yang sesungguhnya.

Tidak dapat diragukan bahwa semua agama pasti mengajarkan sikap Anti-korupsi dan oleh sebab itu korupsi harus dilawan dan diperangi. Korupsi jelas-jelas merusak moral masyarakat yang berkeadaban. Perilaku korupsi telah menciptakan *sptil personality* bagi pelakunya.<sup>35</sup>

D. Apa itu Pendidikan Antikorupsi ?

Korupsi sebagaimana telah diuraikan, merupakan bentuk tindakan yang merugikan berbagai pihak, khususnya rakyat kecil, lantaran memakai dana pemerintah hanya untuk kepentingan pribadi. Begitu berbahayanya korupsi, maka tidak ada jalan lain kecuali semua pihak Negara menghentikan tindak korupsi tersebut. Harus dimulai gerakan memutus mata korupsi sejak usia dini melalui pendidikan. Pendek kata, korupsi harus mulai diberangus dari akar-akarnya melalui pendidikan, khususnya pendidikan Anti-korupsi.<sup>36</sup>

---

<sup>35</sup> Ibid, hal. 35-37.

<sup>36</sup> Agus Wibowo, *Pendidikan Antikorupsi di Sekolah*, hal. 34.



Dalam tujuan pendidikan di Indonesia sudah jelas, bahwa bertujuan untuk membentuk manusia seutuhnya, dalam artianya berkembangnya potensi-potensi individu secara harmonis, berimbang, dan terintegrasi. Secara keseluruhan dapat dikatakan bahwa tujuan pendidikan merupakan masalah yang inti dalam pendidikan, dan merupakan sari pati dari seluruh faktor yang sangat menentukan jalannya pendidikan sehingga harus dirumuskan dengan sebaik-baiknya agar pendidikan terlaksana sesuai dengan harapan.<sup>37</sup> Selain itu pendidikan mempunyai fungsi (1) menyiapkan sebagian manusia, (2) menyiapkan tenaga kerja, dan (3) menyiapkan warga Negara yang baik.<sup>38</sup>

Pendidikan merupakan proses di mana suatu bangsa mempersiapkan generasi mudanya untuk meneruskan tujuan pendidikan. Sebagaimana Ki Hadjar Dewantara memberikan pernyataan, bahwa pendidikan umumnya berarti daya upaya untuk memajukan budi pekerti, pikiran, dan jasmani. Sehingga mampu menjadi anggota masyarakat yang baik. Artinya, pendidikan menurut segala kekuatan kodrat yang ada pada diri anak-anak, agar meraka sebagai manusia sekaligus anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya.<sup>39</sup>

Selain itu, pendidikan merupakan upaya normatif yang mengacu pada nilai-nilai mulia yang menjadi bagian dari kehidupan bangsa, yang dengannya nilai tersebut dapat dilanjutkan melalui nilai transfer pendidikan baik aspek kognitif, sikap (afektif), maupun keterampilan (psikomotorik). Pendidikan membimbing menjadi manusia yang manusiawi

---

<sup>37</sup> Binti Maunah, *Ilmu Pendidikan*, (Yogyakarta: Teras, 2009), hal. 37.

<sup>38</sup> Dwi Siswono, *Ilmu Pendidikan*, (Yogyakarta: UNY Press, 2007), hal. 79.

<sup>39</sup> Wiji Suworo, *Dasar-dasar Ilmu Pendidikan*, (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2006), hal. 21.

yang makin dewasa secara intelektual, moral dan sosial, dalam konteks ini pendidikan merupakan pemelihara budaya. Dalam konteks perubahan yang begitu cepat dewasa ini, pendidikan tidak cukup berperan sebagaimana telah diuraikan, tetapi juga harus mampu melakukan transformasi nilai dalam tataran instrumental sesuai dengan tuntutan perubahan dengan tetap menjadikan nilai dasar sebagai fondasi.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat kita simpulkan bahwa pendidikan mampu menjadi upaya prefentif bagi berkembangnya sikap, prilaku dan budaya korupsi, meskipun secara empiris jelas tidak cukup mengingat faktor *pressure* sosial politik yang dapat juga mendistorsi peran normatif tersebut. Kendati demikian jika ada kemauan keras dari segenap komponen bangsa untuk menjadikan pendidikan sebagai panglima melawan korupsi, jelas bukan hal mustahil direalisasikan.<sup>40</sup>

Apalagi, saat ini telah diterapkan pendidikan karakter diberbagai tingkatan atau jenjang pendidikan.<sup>41</sup> Sebenarnya di Indonesia, pendidikan karakter bangsa telah berlangsung lama, sejauh sebelum Indonesia merdeka.<sup>42</sup> Sebagaimana pandangan Ki Hajar Dewantara sebagai pahlawan pendidikan nasional memiliki pandangan tentang pendidikan karakter sebagai asas taman siswa, yang dikutip oleh Mulyasa, dengan tujuan prinsip sebagai berikut;

- a. Hak seseorang untuk mengatur diri sendiri dengan tujuan terbitnya persatuan dalam kehidupan umum.

---

<sup>40</sup> Agus Wibowo, *Pendidikan Antikorupsi di Sekolah*, hal. 35-36.

<sup>41</sup> Ibid, hal. 36.

<sup>42</sup> Mulyasa, *Manajemen Pendidikan Karakter*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2011), hal. 6.

- b. Pengajaran berarti mendidik anak agar merdeka batinnya, pikirannya, dan tenaganya.
- c. Pendidikan harus selaras dengan kehidupan.
- d. Kultur sendiri yang selaras dengan kodrat harus dapat memberi kedamaian hidup.
- e. Harus bekerja menurut kekuatan sendiri.
- f. Perlu hidup dengan berdiri sendiri.
- g. Dengan tidak terikat, lahir batin dipersiapkan untuk memberikan pelayanan kepada peserta didik.<sup>43</sup>

Pada tahun 1946, taman siswa memiliki Panca Dharma, yaitu kemerdekaan, kodrat alam, kebudayaan, kebangsaan, dan kemanusiaan. Oleh sebab itu pendidikan sebagai proses pembudayaan kodrat alam setiap individu dengan kemampuan untuk mempertahankan hidup, yang teruju pada terciptanya kemerdekaan lahir batin sehingga memperoleh keselamatan, keamanan, kenyamanan, dan kebahagiaan lahir batin. Selain itu, dikemukakan juga bahwa pendidikan mencakup tujuan personal dan tujuan sosial.

Tujuan personal berkaitan dengan tokohnya tiang-tiang kemerdekaan yang mewarnai kehidupan dalam diri setiap individu, sedangkan tujuan sosial adalah terciptanya kebersamaan untuk membangun masyarakat yang berbudaya dan berkebangsaan yang khas berdasarkan kemanusiaan, sehingga terwujud kehidupan yang tertib, damai, aman, nyaman, dan sejahtera.

Dalam asas pendidikan Taman Siswa, Dewantara ingin mendidik manusia Indonesia secara utuh (kaffah), yang dapat hidup sendiri, efektif, efisien, produktif dan akuntabel.

---

<sup>43</sup> Ibid, hal 6.

Untuk kepentingan tersebut, masyarakat khususnya peserta didik perlu dibekali dasar-dasar kehidupan agar memiliki kesadaran, pemahan, kepedulian, dan komitmen yang tinggi, menuju masyarakat yang aman, tertib, dan damai.<sup>44</sup>

Sejalan dengan Syafei, K.H Hasyim Asy'ari dalam terjemahan kitabnya "*Adab Al-'Alim Wa Al-Muta'allim*" didalam bukunya Rosidin, bahwa beliaujuga menekankan kosepnya pada pendidikan karakter, bahwa belajar diartikan sebagai ibadah untuk mencari ridho Allah, dalam rangka mengantarkan manusia memperoleh kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat, serta untuk melestarikan nilai-nilai (budaya) Islam, dan tidak sekedar menghilangkan kebodohan. Lebih lanjut, dalam sejarah pesantren Tebuireng yang didirikannya, sejak awal berdirinya telah diselaraskan dengan tujuan untuk membentuk karakter dan kemandirian santri.<sup>45</sup>

Ini sebuah gambaran pendidikan yang konkrit dalam membentuk budaya dan karakter yang mempunyai landasan islami, sehingga peserta didik mempunyai karakter yang mandiri sesuai ajaran Islam.<sup>46</sup> Masalahnya, pendidikan sendiri masih berhadapan dengan kondisi kejumudan dan terdapat hambatan-hambatan budaya mendidik maupun kultur dalam dunia pendidikan. Hal ini menjadi dunia pendidikan kurang menghasilkan capaian yang maksimal untuk menghasilkan budaya yang produktif dan kepekaan sosial yang tinggi bagi manusia Indonesia.<sup>47</sup>

---

<sup>44</sup> Ibid, hal. 6-7.

<sup>45</sup> Rosidin, *Pendidikan Karakter Pesanteren*, (Malang: Litera Ulul Albab, 2013) Hal. 43

<sup>46</sup> Ibid, hal. 44.

<sup>47</sup> Nurani Soyomukti, *Teori-teori Pendidikan*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media Group, 2010), hal. 139.

Gerakan Anti-korupsi di Indonesia seakan mencapai puncaknya dalam Hari Peringatan Hari Anti-korupsi Sedunia yang dirayakan oleh para aktivis gerakan Anti-korupsi pada 9 Desember. Aksi damai itu menjadi penting dan bermakna karena pemberantasan korupsi di Indonesia dianggap masih belum dilakukan secara serius. Pemberantasan korupsi masih sebatas pidato dan retorika. Yang terakhir, kasus Bank Century menjadi suatu hal yang dipertaruhkan oleh kepemimpinan Presiden Yudhoyono karena diduga melibatkan Wakil Presiden Boediyono dan mentrinya, Sri Mulyani.

Akan tetapi, yang paling penting untuk dicatat dari berbagai aksi Anti-korupsi, yang belakangan semarak setelah para aktivis mencurigai bahwa telah terjadi upaya menggerogoti lembaga pemberantas korupsi yang sah (KPK). Telah muncul kesadaran tentang bagaimana kekuatan koruptor di Indonesia. Rekaman pembicaraan antara oknum Jaksa Agung dan Kepolisian dengan mafia hukum, telah membuat rakyat menyadari bahwa para koruptor adalah orang yang memiliki kekuatan yang luar biasa agar ia terbebas dari hukuman pidana. Mereka memiliki hubungan dengan para mafia kasus (Markus) yang merupakan orang kuat, namanya saja Mafia. Yang mampu membuat perkara diatasi sesuai dengan keinginan koruptor untuk bebas dari kasus kejahatan luar biasa (*Ekstra-Ordinary Crime*) bernama korupsi.<sup>48</sup>

Pembahasan tentang “Korupsi Sebagai Masalah Regional” telah menampilkan fakta-fakta bahwa korupsi telah tersebar ke seluruh dunia pada seluruh tingkatan masyarakat. Meskipun berbagai faktor mempengaruhi jenis korupsi yang umum, tetapi sikap rakus, tamak, dan menguntungkan

---

<sup>48</sup> Ibid, hal. 133-134.

pribadi atas biaya orang lain merupakan sumber yang menjadi penyebabnya.<sup>49</sup>

Pendidikan Anti-korupsi bukan cuma berputar pada pemberian wawasan dan pemahaman saja. Tetapi diharapkan dapat menyentuh pada ranah afektif dan psikomotorik, yakni membentuk sikap dan perilaku Anti-korupsi pada anak didik. Pengajaran pendidikan Anti-korupsi hendaknya menggunakan pendekatan yang bersifat terbuka, dialogis dan diskurtif sehingga mampu merangsang kemampuan intelektual anak didik dalam membentuk rasa keingintahuan, sikap kritis dan berani berpendapat.

Agar pendidikan Anti-korupsi ini bisa optimal, menurut Kemendikbud dalam bukunya Wibowo, perlu dukungan dari segenap elemen bangsa. Pemerintah daerah, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), serta masyarakat diharapkan peduli dan memantau mekanisme pengelolaan manajemen sekolah. Sebab, dalam manajemen sekolah yang tidak transparan dan akuntabel, korupsi bisa terjadi dan berkembang pesat.<sup>50</sup>

### E. Urgensi Pendidikan Anti-korupsi

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, pendidikan yakni menjadi akar dalam menyelesaikan setiap kasus kehidupan. Termasuk permasalahan yang selalu menyedot perhatian publik sekaligus uang di Negara ini, Korupsi. Pendidikan itu berfungsi menjadikan manusia seutuhnya. Utuh berarti tidak terpisah antara sikap dan pikiran. Dan keduanya harus mampu menyatu sehingga melahirkan sebuah kepribadian yang mapan dan menjadi manusia yang

---

<sup>49</sup> Singgih, *Dunia pun Memerangi Korupsi*, (Jakarta: Pusat Studi Hukum Bisnis, 2002), hal. 25.

<sup>50</sup> Agus Wibowo, *Pendidikan Antikorupsi di Sekolah*, hal. 39.

Kamil. Hal ini, sebagai pemicu untuk mengantisipasi adanya tindakan-tindakan yang merugikan diri sendiri dan orang lain pada umumnya.

Pendidikan di sekolah selama ini lebih dominan mengembangkan pendidikan IPTEK (Ilmu Pengetahuan dan Teknologi). Maka untuk mewujudkan pendidikan Anti-korupsi, pendidikan di sekolah harus diorientasikan pada tataran *moral action*, agar peserta didik tidak hanya berhenti pada kompetensi (*Competence*) saja, tetapi sampai memiliki kemauan (*Will*) dan kebiasaan (*Habit*) dalam mewujudkan nilai-nilai dalam kehidupan sehari-hari.

Ada beberapa alasan betapa pentingnya pendidikan Anti-korupsi segera diaplikasikan di dalam sekolah hingga perguruan tinggi kita. Beberapa urgensi diterapkannya pendidikan Anti-korupsi itu di antaranya: *Pertama*, dunia pendidikan khususnya lembaga pendidikan pada umumnya memiliki seperangkat pengetahuan (*Knowledge*), untuk memberikan pencerahan terhadap berbagai kesalahan pemahaman dalam usaha pemberantasan korupsi. Itu karena sampai saat ini definisi korupsi baru sebatas pada pengertian yang bersifat legal-formal. Sementara berbagai bentuk praktek korupsi telah tumbuh subur dan menggurat akar di tengah-tengah masyarakat kita. Dalam situasi seperti ini, lembaga pendidikan dengan sumber daya yang dimiliki, dapat menjadi refrensi untuk mencerahkan problematika praktik korupsi.

Sebagai contoh, budaya suap-menyuap yang merupakan salah satu bentuk korupsi, telah dipahami secara berbeda oleh masyarakat. Sebagian menyatakan bahwa dalam kasus suap-menyuap sesungguhnya tidak ada pihak yang dirugikan. Pihak yang disuap beruntung karena mendapat tambahan

penghasilan diluar yang semestinya. Pihak penyuap pun merasa beruntung karena memperoleh kemudahan dalam mengurus persoalan.

Sepintas jalan pikiran sebagaimana telah disebutkan benar. Tetapi, jika diamati maka dapat dikemukakan bahwa dalam kasus suap-menyuap itu yang paling dirugikan adalah sistem. Hal ini karena budaya suap-menyuap dapat merusak sistem sehingga tidak dapat berjalan sesuai dengan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik (*clean and good governance*). Akibatnya, hanya orang berduit yang dapat mengakses kemudahan dalam pelayanan publik. Sementara mereka yang tidak memiliki uang harus memperoleh perlakuan berbeda.

*Kedua*, lembaga pendidikan penting dilibatkan dalam pemberantasan korupsi karena memiliki jaringan (*networking*) yang kuat hingga ke seluruh penjuru tanah air. Pelibatan lembaga pendidikan mulai tingkat dasar, menengah, hingga pendidikan tinggi akan menjadikan usaha pemberantasan korupsi dapat menjelma sebagai gerakan yang bersifat massif. Dengan gerakan yang massif ini diharapkan bahwa pada saatnya bangsa Indonesia dapat keluar dari problem korupsi.

*Ketiga*, jika ditelisik latar belakang sosial satu persatu pelaku tindak korupsi maka dapat dikatakan bahwa mayoritas mereka adalah alumni perguruan tinggi. Mereka rata-rata bergelar sarjana. Ini berarti secara sosial mereka tergolong berpendidikan cukup mapan. Persoalannya, mengapa mereka melakukan tindakan yang melanggar hukum? Jawabnya, selain faktor kesengajaan untuk memperkaya diri, sangat mungkin perbuatan tersebut dilakukan karena mereka tidak mengetahui seluk beluk tindak pidana yang dapat dikategorikan korupsi.<sup>51</sup>

---

<sup>51</sup> Ibid, hal. 40-42.



Mengacu pada berbagai aspek yang dapat menjadi penyebab terjadinya korupsi sebagaimana telah dipaparkan dalam pembahasan sebelumnya, dapat dikatakan bahwa penyebab korupsi terdiri atas faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal merupakan penyebab korupsi yang datangnya dari diri pribadi atau individu, sedangkan faktor eksternal berasal dari lingkungan atau sistem. Upaya pencegahan korupsi pada dasarnya dapat dilakukan dengan menghilangkan, atau setidaknya mengurangi kedua faktor penyebab korupsi tersebut.

Faktor internal sangat ditentukan oleh kuat tidaknya nilai-nilai Anti-korupsi tertanam dalam diri setiap individu. Nilai-nilai Anti-korupsi tersebut antara lain meliputi kejujuran, kemandirian, kedisiplinan, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, keberanian, dan keadilan. Nilai-nilai Anti-korupsi itu perlu diterapkan oleh setiap individu untuk dapat mengatasi faktor eksternal agar korupsi tidak terjadi. Untuk mencegah terjadinya faktor eksternal, selain memiliki nilai-nilai Anti-korupsi, setiap individu perlu memahami dengan mendalam prinsip-prinsip Anti-korupsi yaitu akuntabilitas, transparansi, kewajaran, kebijakan, dan kontrol kebijakan dalam suatu organisasi, institusi dan masyarakat. Oleh karena itu hubungan antara prinsip-prinsip dan nilai-nilai Anti-korupsi merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.

Dalam hal ini pendidikan Anti-korupsi harus menerapkan nilai-nilai dan prinsip sebagai menetralkan adanya tindakan korupsi yang sangat miris dalam kehidupan sosial, baik dalam kalangan masyarakat maupun kalangan pejabat elit atas.

#### a) Nilai-nilai Anti-korupsi

Nilai-nilai Anti-korupsi yang akan dibahas meliputi kejujuran, kepedulian, kemandirian, kedisiplinan, pertang-

gungjawaban, kerja keras, kesederhanaan, keberanian, dan keadilan. Nilai-nilai inilah yang akan mendukung prinsip-prinsip Anti-korupsi untuk dapat dijalankan dengan baik.

### 1. Kejujuran

Menurut Sugono, kejujuran didefinisikan sebagai lurus hati, tidak berbohong, dan tidak curang. Jujur adalah salah satu sifat yang sangat penting bagi kehidupan mahasiswa, tanpa sifat jujur mahasiswa tidak akan dipercaya dalam kehidupan sosialnya.<sup>52</sup> Nilai kejujuran dalam kehidupan kampus yang diwarnai dengan budaya akademik sangatlah diperlukan. Nilai kejujuran ibaratnya seperti mata uang yang berlaku di mana-mana termasuk dalam kehidupan di kampus. Jika mahasiswa terbukti melakukan tindakan yang tidak jujur, baik pada lingkup akademik maupun sosial, maka selamanya orang lain akan selalu merasa ragu untuk mempercayai mahasiswa tersebut. Sebagai akibatnya mahasiswa akan selalu mengalami kesulitan dalam menjalin hubungan dengan orang lain.

Hal ini juga akan menyebabkan ketidaknyamanan bagi orang lain karena selalu merasa curiga terhadap mahasiswa tersebut yang terlihat selalu berbuat curang atau tidak jujur. Selain itu jika seorang mahasiswa pernah melakukan kecurangan ataupun kebohongan, akan sulit untuk dapat memperoleh kembali kepercayaan dari mahasiswa lainnya. Sebaliknya jika terbukti bahwa mahasiswa tersebut tidak pernah melakukan tindakan kecurangan maupun kebohongan maka mahasiswa tersebut tidak akan mengalami kesulitan yang disebabkan tindakan tercela tersebut. Prinsip kejujuran harus dapat dipegang teguh oleh setiap mahasiswa sejak

---

<sup>52</sup> Dendi sugiono, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008), hal.28.

masa-masa ini untuk memupuk dan membentuk karakter mulia didalam setiap pribadi mahasiswa.<sup>53</sup>

## 2. Kepedulian

Menurut Sugono definisi kata peduli adalah mengindahkan, memperhatikan dan menghiraukan.<sup>54</sup> Nilai kepedulian sangat penting bagi seorang mahasiswa dalam kehidupan di kampus dan di masyarakat. Sebagai calon pemimpin masa depan, seorang mahasiswa perlu memiliki rasa kepedulian terhadap lingkungannya, baik lingkungan di dalam kampus maupun lingkungan di luar kampus. Rasa kepedulian seorang mahasiswa harus mulai ditumbuhkan sejak berada di kampus. Oleh karena itu, upaya untuk mengembangkan sikap peduli dikalangan mahasiswa sebagai subjek didik sangat penting.

Seorang mahasiswa dituntut untuk peduli terhadap proses belajar mengajar di kampus, terhadap pengelolaan sumber daya di kampus secara efektif dan efisien, serta terhadap berbagai hal yang berkembang di dalam kampus. Mahasiswa juga dituntut untuk peduli terhadap lingkungan di luar kampus, terhadap kiprah alumni dan kualitas produk ilmiah yang dihasilkan oleh perguruan tingginya. Beberapa upaya yang bisa dilakukan sebagai wujud kepedulian di antaranya adalah dengan menciptakan suasana kampus sebagai rumah kedua. Hal ini dimaksudkan agar kampus menjadi tempat untuk mahasiswa berkarya, baik kurikuler maupun ekstra-kurikuler, tanpa adanya batasan ruang gerak.

Selain itu dengan memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mengembangkan potensi yang dimilikinya sebagai manusia yang utuh dengan berbagai kegiatan di

---

<sup>53</sup> Ibid, hal. 28.

<sup>54</sup> Ibid, hal. 28

kampus, Kegiatan-kegiatan tersebut dapat meningkatkan interaksi antara mahasiswa satu dengan mahasiswa yang lainnya sehingga hubungan saling mengenal dan saling belajar dapat dicapai lebih dalam. Hal ini akan sangat berguna bagi para mahasiswa untuk mengembangkan karir dan reputasi mereka pada masa yang akan datang. Upaya lain yang dapat dilakukan adalah memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk menggalang dana guna memberikan bantuan biaya pendidikan bagi mahasiswa yang membutuhkan.

Dengan adanya aksi tersebut, maka interaksi mahasiswa satu dengan lainnya akan semakin erat. Tindakan lainnya adalah dengan memperluas akses mahasiswa kepada dosen di luar jam kuliah melalui pemanfaatan internet dan juga meningkatkan peran dosen sebagai fasilitator, dinamisator dan motivator. Ini penting dilakukan karena hubungan baik mahasiswa dengan dosen akan memberikan dampak positif bagi tertanamnya nilai kepedulian. Pengembangan dari tindakan ini juga dapat diterapkan dengan mengadakan kelas-kelas kecil yang memungkinkan untuk memberikan perhatian dan asistensi lebih intensif.

Dengan adanya kelas-kelas ini, maka bukan hanya hubungan antara mahasiswa dengan dosen tetapi hubungan antara mahasiswa dengan banyak mahasiswa yang saling interaktif dan positif juga dapat terjalin dengan baik dan di situ mahasiswa dapat memberikan pelajaran, perhatian, dan perbaikan terus menerus. Dengan demikian perhatian dan perbaikan kepada setiap mahasiswa tersebut dapat memberikan kesempatan belajar yang baik.

### 3. Kemandirian

Menurut Supardi, Kondisi mandiri bagi mahasiswa dapat diartikan sebagai proses mendewasakan diri yaitu dengan tidak

bergantung kepada orang lain untuk mengerjakan tugas dan tanggung jawabnya. Hal ini penting untuk masa depannya di mana mahasiswa tersebut harus mengatur kehidupannya dan orang-orang yang berada di bawah tanggung jawabnya sebab tidak mungkin orang tidak mandiri (mengatur dirinya sendiri) akan mampu mengatur hidup orang lain. Dengan karakter kemandirian tersebut mahasiswa dituntut untuk mengerjakan semua tanggung jawab dengan usahanya sendiri dan bukan orang lain.<sup>55</sup>

#### 4. Kedisiplinan

Menurut Sugono definisi kata disiplin adalah ketaatan (kepatuhan) kepada peraturan.<sup>56</sup> Dalam mengatur kehidupan kampus baik akademik maupun sosial mahasiswa perlu hidup disiplin. Hidup disiplin tidak berarti harus hidup seperti pola militer di barak militer namun hidup disiplin bagi mahasiswa adalah dapat mengatur dan mengelola waktu yang ada untuk dipergunakan dengan sebaik-baiknya untuk menyelesaikan tugas baik dalam lingkup akademik maupun sosial kampus. Manfaat dari hidup yang disiplin adalah mahasiswa dapat mencapai tujuan hidupnya dengan waktu yang lebih efisien.

Disiplin juga membuat orang lain percaya dalam mengelola suatu kepercayaan. Misalnya orang tua akan lebih percaya pada anaknya yang hidup disiplin untuk belajar dikota lain dibanding dengan anak yang tidak disiplin. Selain itu disiplin dalam belajar perlu dimiliki oleh mahasiswa agar diperoleh hasil pembelajaran yang maksimal.

---

<sup>55</sup> Endang Supardi, *Kewirausahaan SMK: Kiat mengembangkan sikap mandiri*, (Bandung: Direktorat Pendidikan Menengah Kejuruan, Pendidikan Dasar dan Menengah, Departemen Pendidikan Nasional, 2004), hal. 77.

<sup>56</sup> Dendi sugiono, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, hal. 29.

Tidak jarang dijumpai perilaku dan kebiasaan peserta didik menghambat dan tidak menunjang proses pembelajaran. Misalnya, sering kita jumpai mahasiswa yang malas, sering absen, motivasi yang kurang dalam belajar, tidak mengerjakan tugas, melanggar tata tertib kampus, dan lain-lain. Hal tersebut menunjukkan masih banyak mahasiswa yang tidak memiliki kedisiplinan. Dengan kondisi demikian, dosen dituntut untuk dapat mengembangkan sikap disiplin mahasiswa dalam belajar dan berperilaku di kampus. Mendisiplinkan mahasiswa harus dilakukan dengan cara-cara yang dapat diterima oleh jiwa dan perasaan mahasiswa, yaitu dengan bentuk penerapan kasih sayang. Disiplin dengan cara kasih sayang ini dapat membantu mahasiswa agar mereka dapat berdiri sendiri atau mandiri.

Saat ini perilaku dan kebiasaan yang buruk/negatif dari mahasiswa cenderung mengarah kepada suatu tindakan kriminalitas suatu tindakan yang melawan hukum. Kenakalan mahasiswa dapat dikatakan dalam batas kewajaran apabila dilakukan dalam keterangan mencari identitas diri/jati diri dan tidak merugikan orang lain. Peranan dosen dalam menanamkan nilai disiplin, yaitu mengarahkan dan berbuat baik, menjadi teladan/contoh, sabar dan penuh pengertian. Dosen diharuskan mampu mendisiplinkan mahasiswa dengan kasih sayang, khususnya disiplin diri (*self discipline*). Dalam usaha tersebut, dosen perlu memperhatikan dan melakukan:

- a. Membantu mahasiswa mengembangkan pola perilaku untuk dirinya. Misalnya, waktu belajar di rumah, lama mahasiswa harus membaca atau mengerjakan tugas.
- b. Menggunakan pelaksanaan aturan akademik sebagai alat dan cara untuk menegakan disiplin, misalnya menerapkan *reward and punishment* secara adil.<sup>57</sup>

<sup>57</sup> Tim Penulis, *Pendidikan Anti-Korupsi Untuk Perguruan Tinggi*, hal. 78.

## 5. Tanggung jawab

Menurut Sugono definisi kata tanggung jawab adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (kalau terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan dan diperkarakan).<sup>58</sup> Mahasiswa adalah sebuah status yang ada pada diri seseorang yang telah lulus dari pendidikan terakhirnya yang berkelanjutan melanjutkan pendidikan dalam sebuah lembaga yang bernama universitas. Mahasiswa yang memiliki rasa tanggungjawab akan memiliki kecenderungan menyelesaikan tugas lebih baik dibanding mahasiswa yang tidak memiliki rasa tanggungjawab.

Mahasiswa yang memiliki rasa tanggungjawab akan mengerjakan tugas dengan sepenuh hati karena berpikir bahwa jika suatu tugas tidak dapat diselesaikan dengan baik dapat merusak citra namanya di depan orang lain. Mahasiswa yang dapat diberikan tanggungjawab yang kecil dan berhasil melaksanakannya dengan baik berhak untuk mendapatkan tanggungjawab yang lebih besar lagi sebagai hasil dari kepercayaan orang lain terhadap mahasiswa tersebut.

Mahasiswa yang memiliki rasa tanggungjawab yang tinggi mudah untuk dipercaya orang lain dalam masyarakat misalnya dalam memimpin suatu kepanitiaan di kampus. Tanggungjawab adalah menerima segala sesuatu dari sebuah perbuatan yang salah baik itu disengaja maupun tidak sengaja. Tanggung jawab tersebut berupa perwujudan kesadaran akan kewajiban menerima dan menyelesaikan semua masalah yang telah dilakukan. Tanggungjawab juga merupakan suatu pengabdian dan pengorbanan. Maksudnya pengabdian adalah perbuatan baik yang berupa pikiran, pendapat ataupun tenaga sebagai perwujudan kesetiaan,

---

<sup>58</sup> Dendi sugiono, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, hal. 30.

cinta kasih sayang, norma, atau satu ikatan dari semua itu dilakukan dengan ikhlas.

Mahasiswa mempunyai banyak kewajiban yang harus dipertanggungjawabkan. Misalnya tugas-tugas yang diberikan oleh dosen, tanggung jawab untuk belajar, tanggungjawabuntuk menyelesaikan perkuliahan sampai lulus, tanggungjawab menjaga diri sendiri. Sebagai seorang mahasiswa kita sudah dilatih oleh orang tua untuk lebih mandiri dalammenjaga diri kita sendiri, karena dalam perkuliahan kita diajarkan untukmelakukan apa-apa sendiri. Oleh sebab itu orang tua sudah tidak bisa mengontrol aktifitas keseharian anak-anaknya. Jadi sebagai mahasiswa harus bisa bertanggungjawab dalam menjaga dirinya sendiri.

#### 6. Kerja Keras

Bekerja keras didasari dengan adanya kemauan. Kata "kemauan" menimbulkanasosiasi dengan ketekadan, ketekunan, daya tahan, tujuan jelas, daya kerja, pendirian, pengendalian diri, keberanian, ketabahan, keteguhan, tenaga, kekuatan, kelaki-lakian dan pantang mundur. Penting bahwa kemauan mahasiswa harus berkembang ke taraf yang lebih tinggi karena harus menguasai diri sepenuhnya lebih dulu untuk bisa menguasai orang lain. Setiap kali seseorang penuh dengan harapan dan percaya, maka akan menjadi lebih kuat dalam melaksanakan pekerjaannya. Jika interaksi antara individu mahasiswa dapat dicapai bersama dengan usaha kerja keras maka hasil yang akandicapai akan semakin optimum.

Bekerja keras merupakan hal yang penting guna tercapainya hasil yang sesuai dengan target. Akan tetapi bekerja keras akan menjadi tidak berguna jika tanpa adanya



pengetahuan. Didalam kampus, para mahasiswa dilengkapi dengan berbagai ilmu pengetahuan. Disitulah para pengajar memiliki peran yang penting agar setiap usaha kerja keras mahasiswa dan juga arahan-arahan kepada mahasiswa tidak menjadi sia-sia.

## 7. Sederhana

Gaya hidup mahasiswa merupakan hal yang penting dalam interaksi dengan masyarakat di sekitarnya. Gaya hidup sederhana sebaiknya perlu dikembangkan sejak mahasiswa mengenyam masa pendidikannya. Dengan gaya hidup sederhana, setiap mahasiswa dibiasakan untuk tidak hidup boros, hidup sesuai dengan kemampuannya dan dapat memenuhi semua kebutuhannya. Kerap kali kebutuhan diidentikkan dengan keinginan semata, padahal tidak selalu kebutuhan sesuai dengan keinginan dan sebaliknya.

Dengan menerapkan prinsip hidup sederhana, mahasiswa dibina untuk memprioritaskan kebutuhan di atas keinginannya. Prinsip hidup sederhana ini merupakan parameter penting dalam menjalin hubungan antara sesama mahasiswa karena prinsip ini akan mengatasi permasalahan kesenjangan sosial, iri, dengki, tamak, egois, dan yang sikap-sikap negatif lainnya. Prinsip hidup sederhana juga menghindari seseorang dari keinginan yang berlebihan.<sup>59</sup>

## 8. Keberanian

Keberanian adalah mempunyai hati yang mantap dan rasa percaya diri yang besar dalam menghadapi bahaya, kesulitan dan sebagainya.<sup>60</sup>Jika kita temui di dalam kampus, ada banyak mahasiswa yang sedang mengalami kesulitan

---

<sup>59</sup> Tim Penulis, *Pendidikan Anti-Korupsi Untuk Perguruan Tinggi*, hal. 79

<sup>60</sup> Agus Wibowo, *Pendidikan Antikorupsi di Sekolah*, hal. 46.

dan kekecewaan. Meskipun demikian, untuk menumbuhkan sikap keberanian, mahasiswa dituntut untuk tetap berpegang teguh pada tujuan. Terkadang mahasiswa tetap diberikan pekerjaan-pekerjaan yang sukar untuk menambahkan sikap keberaniannya.

Kebanyakan kesukaran dan kesulitan yang paling hebat lenyap karena kepercayaan kepada diri sendiri. Mahasiswa memerlukan keberanian untuk mencapai kesuksesan. Tentu saja keberanian mahasiswa akan semakin matang diiringi dengan keyakinannya. Untuk mengembangkan sikap keberanian demi mempertahankan pendirian dan keyakinan mahasiswa, terutama sekali mahasiswa harus mempertimbangkan berbagai masalah dengan sebaik-baiknya.

Pengetahuan yang mendalam menimbulkan perasaan percaya kepada diri sendiri. Jika mahasiswa menguasai masalah yang dia hadapi, dia pun akan menguasai diri sendiri. Di mana pun dan dalam kondisi apa pun sering kali harus diambil keputusan yang cepat dan harus dilaksanakan dengan cepat pula. Salah satu kesempatan terbaik untuk membentuk suatu pendapat atau penilaian yang sebaik-baiknya adalah dalam kesunyian di mana dia bisa berpikir tanpa diganggu.

Rasa percaya kepada diri sendiri adalah mutlak perlu, karena mahasiswa harus memelihara rasa percaya kepada diri sendiri secara terus menerus, supaya bisa memperkuat sifat-sifat lainnya. Jika mahasiswa percaya kepada diri sendiri, maka hal ini akan terwujud dalam segala tingkah laku mahasiswa.

Seorang mahasiswa perlu mengenali perilakunya, sikap, dan sistem nilai yang membentuk kepribadiannya. Pengetahuan mengenai kepribadian dan kemampuan sendiri

perlu dikaitkan dengan pengetahuan mengenai lingkungan karena mahasiswa senantiasa berada dalam lingkungan kampus yang merupakan tempat berinteraksi dengan mahasiswa lainnya. Di lingkungan tersebut mahasiswa akan mendapat sentuhan kreativitas dan inovasi yang akan menghasilkan nilai tambah dalam masa perkuliahannya.<sup>61</sup>

## 9. Keadilan

Perbuatan tidak memihak, tidak berat sebelah, sesuai dengan nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, berat ringan hukuman sesuai dengan berat ringan kesalahan.<sup>62</sup> Adil adalah sama berat, tidak berat sebelah, tidak memihak. Bagi mahasiswa karakter adil ini perlu sekali dibina sejak masa perkuliahannya agar mahasiswa dapat belajar mempertimbangkan dan mengambil keputusan secara adil dan benar.

Di dalam kehidupan sehari-hari, pemikiran-pemikiran sebagai dasar pertimbangan untuk menghasilkan keputusan akan terus berkembang seiring dengan pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki seseorang. Dalam masa perkuliahan setiap mahasiswa perlu didorong untuk mencari pengalaman dan pengetahuan melalui interaksinya dengan sesama mahasiswa lainnya. Dengan demikian mahasiswa diharapkan dapat semakin bijaksana dalam mengambil keputusan di mana permasalahannya semakin lama semakin kompleks atau rumit untuk diselesaikan.<sup>63</sup>

---

<sup>61</sup> Tim Penulis, *Pendidikan Anti-Korupsi Untuk Perguruan Tinggi*, hal. 80.

<sup>62</sup> Riduan Syahrani, *Kata-Kata Kunci Mempelajari Ilmu Hukum*, (Bandung: PT. Alumni), hal. 4..

<sup>63</sup> Tim Penulis, *Pendidikan Anti-Korupsi Untuk Perguruan Tinggi*, hal. 81

Tabel Nilai-nilai Acuan dalam Pendidikan Anti-korupsi (Diambil dari Dikdosmenkemdikbud)<sup>64</sup>

Pendidikan Antikorupsi		
No.	Dimensi dan Indikator	Nilai Acuan
1.	<b>POLITIK:</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>Membuat kebijakan berdasarkan pada kepentingan umum/bersama (adil, berani)</li> <li>Melaksanakan kebijakan didasari pada sikap menjunjung tinggi kebenaran (jujur, berani)</li> <li>Melaksanakan pengawasan kebijakan secara tidak terbang pilih (jujur, berani)</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li><b>SPORTIF:</b> bersifat kesatria, jujur, tegak (tetap pendirian, tetap memegang keadilan).</li> <li><b>TANGGUNG JAWAB:</b> Keadaan wajib menanggung keadaan sesuatu (kalau terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan, dsb. Misalnya berani dan siap menerima resiko, amanah, tidak mengelah, dan berbuat yang terbaik), hak fungsi menerima pembebanan sebagai akibat sikap pihak sendiri atau pihak lain, melaksanakan dan menyelesaikan tugas dengan sungguh-sungguh.</li> </ol>
2.	<b>SOSIOLOGI:</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>Menepati janji (tanggungjawab)</li> <li>Tidak diskriminatif dalam memberikan layanan (adil)</li> <li>Tidak nepotisme (adil, mandiri)</li> <li>Tidak kolusi (jujur, mandiri)</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li><b>DISIPLIN:</b> Tata tertib, ketaatan pada peraturan, tepat waktu, tertib, dan konsisten.</li> </ol>
3.	<b>EKONOMI:</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>Melakukan persaingan secara sehat (tanggungjawab, jujur, kerja keras)</li> <li>Tidak menyuap (jujur)</li> <li>Tidak boros dalam menggunakan sumber daya (sederhana, tanggungjawab)</li> <li>Tidak melakukan penyimpangan alokasi dan distribusi (jujur, peduli, tanggungjawab)</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li><b>JUJUR:</b> Lurus hati, tidak curang, tulus, dapat dipercaya, berkata dan bertindak benar, mengungkapkan sesuatu sesuai kenyataan, dan punya niat yang lurus terhadap setiap tindakan.</li> <li><b>SEDERHAN:</b> Bersahaja, sikap dan perilaku yang tidak berlebihan, tidak banyak pernik, lugas, apa adanya, hemat, sesuai kebutuhan, dan rendah hati.</li> </ol>
4.	<b>HUKUM:</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>Tidak melakukan penggelapan dana, pajak, barang, dan sebagainya (jujur dan tanggungjawab).</li> <li>Tidak melakukan pemalsuan dokumen, surat, tanda tangan, dan sebagainya (jujur, tanggungjawab).</li> <li>Tidak melakukan pencurian dana, barang, waktu, ukuran yang merugikan pihak lain, dan sebagainya (jujur, tanggungjawab, disiplin).</li> <li>Tidak melakukan penipuan terhadap pihak lain (jujur).</li> <li>Tidak melakukan persekongkolan dalam membuat keputusan (tanggungjawab).</li> <li>Tidak melakukan kerusakan terhadap barang milik Negara (tanggungjawab, peduli).</li> <li>Tidak memberikan atau menerima gratifikasi (jujur, sederhana)</li> <li>Tidak menyalai atau melanggar aturan (disiplin, tanggungjawab).</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li><b>KERJA KERAS:</b> Kegiatan melakukan sesuatu dengan sungguh-sungguh, pantang menyerah dan semangat dalam berusaha.</li> <li><b>MANDIRI:</b> Dalam keadaan dapat berdiri sendiri, tidak bergantung pada orang lain, percaya kepada kemampuan diri sendiri, mampu mengatur dirinya sendiri, dan mengambil inisiatif.</li> <li><b>ADIL:</b> Sama berat, tidak berat sebelah, tidak memihak atau tidak pilih kasih, berpegang pada kebenaran, seimbang, netral, objektif, dan proposional.</li> <li><b>BERANI:</b> Mempunyai hati yang mantap dan rasa percaya diri yang besar dalam menghadapi bahaya, kesulitan, dan lain sebagainya.</li> <li><b>PEDULI:</b> Mengindahkan, memperhatikan, menolong, toleran, setia kawan, membela, memahami, menghargai, dan memperlakukan orang lain sebaik-baiknya.</li> </ol>

<sup>64</sup> Agus Wibowo, *Pendidikan Antikorupsi di Sekolah*, Hal. 47

## b) Prinsip-prinsip Anti-korupsi

Setelah memahami nilai-nilai Anti-korupsi yang penting untuk mencegah faktor internal terjadinya korupsi, berikut akan dibahas prinsip-prinsip Anti-korupsi yang meliputi akuntabilitas, transparansi, kewajaran, kebijakan, dan kontrol kebijakan, untuk mencegah faktor eksternal penyebab korupsi.

### 1. Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah kesesuaian antara aturan dan pelaksanaan kerja. Semua lembaga mempertanggungjawabkan kinerjanya sesuai aturan main baik dalam bentuk konvensi (*de facto*) maupun konstitusi (*de jure*), baik pada level budaya (individu dengan individu) maupun pada level lembaga.<sup>65</sup> Lembaga-lembaga tersebut berperan dalam sektor bisnis, masyarakat, publik, maupun interaksi antara ketiga sektor.<sup>66</sup>

Akuntabilitas publik secara tradisional dipahami sebagai alat yang digunakan untuk mengawasi dan mengarahkan perilaku administrasi dengan cara memberikan kewajiban untuk dapat memberikan jawaban kepada sejumlah otoritas eksternal. Selain itu akuntabilitas publik dalam arti yang paling fundamental merujuk kepada kemampuan menjawab kepada seseorang terkait dengan kinerja yang diharapkan. Seseorang yang diberikan jawaban ini haruslah seseorang yang memiliki legitimasi untuk melakukan pengawasan dan mengharapkin kinerja.

---

<sup>65</sup> BAPPENAS RI, *Publik Good Governance: Sebuah Paparan Singkat*, (Jakarta: Bappenas, 2002), hal. 49.

<sup>66</sup> Tim Penulis, *Pendidikan Anti-Korupsi Untuk Perguruan Tinggi*, hal. 81.

Akuntabilitas publik memiliki pola-pola tertentu dalam mekanismenya, antara lain adalah akuntabilitas program, akuntabilitas proses, akuntabilitas keuangan, akuntabilitas outcome, akuntabilitas hukum, dan akuntabilitas politik. Dalam pelaksanaannya, akuntabilitas harus dapat diukur dan dipertanggungjawabkan melalui mekanisme pelaporan dan pertanggungjawaban atas semua kegiatan yang dilakukan. Evaluasi atas kinerja administrasi, proses pelaksanaan, dampak dan manfaat yang diperoleh masyarakat baik secara langsung maupun manfaat jangka panjang dari sebuah kegiatan.

Terkait dengan penjelasan tersebut maka mata kuliah ini memiliki peran penting dalam rangka pengembangan sumber daya manusia. Oleh karena itu mahasiswa sebagai bagian dari civitas akademika pemilik masa depan merupakan target penegakan pelaku penegakan akuntabilitas masa kini dan masa depan. Dengan harapan bahwa integritas atau kesuaian antara aturan dengan pelaksanaan kerja pada diri mahasiswa dapat semakin ditingkatkan.<sup>67</sup>

## 2. Transparansi

Salah satu prinsip penting Anti-korupsi lainnya adalah transparansi.<sup>68</sup> Prinsip transparansi ini penting karena pemberantasan korupsi dimulai dari transparansi dan mengharuskan semua proses kebijakan dilakukan secara terbuka, sehingga segala bentuk penyimpangan dapat diketahui oleh publik. Selain itu transparansi menjadi pintu masuk sekaligus kontrol bagi seluruh proses dinamika struktural kelembagaan.

---

<sup>67</sup> BAPPENAS RI, *Publik Good Governance: Sebuah Paparan Singkat*, hal. 70.

<sup>68</sup> Kompas, *Jihat Melawan Korupsi*, hal. 103.

Dalam bentuk yang paling sederhana, transparansi mengacu pada keterbukaan dan kejujuran untuk saling menjunjung tinggi kepercayaan (*trust*) karena kepercayaan, keterbukaan, dan kejujuran ini merupakan modal awal yang sangat berharga bagi para mahasiswa untuk dapat melanjutkan tugas dan tanggungjawabnya pada masa kini dan masa mendatang. Dalam prosesnya, transparansi dibagi menjadi lima yaitu proses penganggaran, proses penyusunan kegiatan, proses pembahasan, proses pengawasan, dan proses evaluasi. Proses penganggaran bersifat *bottom up*, mulai dari perencanaan, implementasi, laporan pertanggungjawaban dan penilaian (evaluasi) terhadap kinerja anggaran.

Di dalam proses penyusunan kegiatan atau proyek pembangunan terkait dengan proses pembahasan tentang sumber-sumber pendanaan (anggaran pendapatan) dan alokasi anggaran. Proses pembahasan membahas tentang pembuatan rancangan peraturan yang berkaitan dengan strategi penggalangan (pemungutan) dana, mekanisme pengelolaan proyek mulai dari pelaksanaan tender, pengerjaan teknis, pelaporan finansial dan pertanggungjawaban secara teknis.

Proses pengawasan dalam pelaksanaan program dan proyek pembangunan berkaitan dengan kepentingan publik dan yang lebih khusus lagi adalah proyek-proyek yang diusulkan oleh masyarakat sendiri. Proses lainnya yang penting adalah proses evaluasi. Proses evaluasi ini berlaku terhadap penyelenggaraan proyek dijalankan secara terbuka dan bukan hanya pertanggungjawaban secara administratif, tetapi juga secara teknis dan fisik dari setiap output kerja-kerja pembangunan.

Hal-hal tersebut merupakan panduan bagi mahasiswa untuk dapat melaksanakan kegiatannya agar lebih baik. Setelah pembahasan prinsip ini, mahasiswa sebagai individu dan juga bagian dari masyarakat atau organisasi ataupun institusi diharapkan dapat mengimplementasikan prinsip transparansi di dalam kehidupan keseharian mahasiswa.<sup>69</sup>

### 3. Kewajaran

Prinsip Anti-korupsi lainnya adalah prinsip kewajaran. Prinsip *fairness* atau kewajaran ini ditunjukkan untuk mencegah terjadinya manipulasi (ketidakwajaran) dalam penganggaran, baik dalam bentuk *mark up* maupun ketidakwajaran lainnya. Sifat-sifat prinsip kewajaran ini terdiri dari lima hal yang penting yaitu komprehensif dan disiplin, fleksibilitas terprediksi, kejujuran, dan informatif.

Komprehensif dan disiplin berarti mempertimbangkan keseluruhan aspek, berkesinambungan, taat asas, prinsip pembebanan pengeluaran dan tidak melampaui batas (*off budget*) sedangkan fleksibilitas artinya adalah adanya kebijakan tertentu untuk mencapai efisiensi dan efektifitas. Terprediksi berarti adanya ketetapan dalam perencanaan atas dasar asas *value for money* untuk menghindari defisit dalam tahun anggaran berjalan. Anggaran yang terprediksi merupakan cerminan dari adanya prinsip *fairness* di dalam proses perencanaan pembangunan. Selain itu, sifat penting lainnya adalah kejujuran.

Kejujuran tersebut mengandung arti tidak adanya bias perkiraan penerimaan maupun pengeluaran

---

<sup>69</sup> Ibid, hal. 82.



yang disengaja, yang berasal dari pertimbangan teknis maupun politis. Kejujuran merupakan bagian pokok dari prinsip *fairness*. Sifat yang terakhir dalam prinsip kewajaran adalah informatif. Tujuan dari sifat ini adalah dapat tercapainya sistem informasi pelaporan yang teratur dan informatif. Sifat informatif ini dijadikan sebagai dasar penilaian kinerja, kejujuran dan proses pengambilan keputusan selain itu sifat ini merupakan ciri khas dari kejujuran.

Dalam penerapannya pada mahasiswa, prinsip ini dapat dijadikan rambu-rambu agar dapat bersikap lebih waspada dalam mengatur beberapa aspek kehidupan mahasiswa seperti penganggaran, perkuliahan, sistem belajar maupun dalam organisasi. Selain itu, setelah pembahasan ini, mahasiswa juga diharapkan memiliki kualitas moral yang lebih baik di mana kejujuran merupakan bagian pokok dalam prinsip ini.

#### 4. Kebijakan

Prinsip Anti-korupsi yang keempat adalah prinsip kebijakan. Pembahasan mengenai prinsip ini ditujukan agar mahasiswa dapat mengetahui dan memahami kebijakan Anti-korupsi. Kebijakan ini berperan untuk mengatur tata interaksi agar tidak terjadi penyimpangan yang dapat merugikan Negara dan masyarakat. Kebijakan Anti-korupsi ini tidak selalu identik dengan Undang-Undang Anti-korupsi, namun bisa berupa Undang-Undang kebebasan mengakses informasi, Undang-Undang desentralisasi, Undang-Undang Anti-korupsi maupun lainnya yang dapat memudahkan masyarakat mengetahui sekaligus mengontrol terhadap kinerja dan penggunaan anggaran negara oleh para pejabat negara.

Aspek-aspek kebijakan terdiri dari isi kebijakan, pembuat kebijakan, pelaksana kebijakan, kultur kebijakan. Kebijakan Anti-korupsi akan efektif apabila di dalamnya terkandung unsur-unsur yang terkait dengan persoalan korupsi dan kualitas dari isi kebijakan tergantung pada kualitas dan integritas pembuatnya. Kebijakan yang telah dibuat dapat berfungsi apabila didukung oleh aktor-aktor penegak kebijakan yaitu kepolisian, kejaksaan, pengadilan, pengacara, dan lembaga permasyarakatan. Eksistensi sebuah kebijakan tersebut terkait dengan nilai-nilai, pemahaman, sikap, persepsi, dan kesadaran masyarakat terhadap hukum atau Undang-Undang Anti-korupsi. Lebih jauh lagi, kultur kebijakan ini akan menentukan tingkat partisipasi masyarakat dalam pemberantasan korupsi.

#### 5. Control Kebijakan

Prinsip terakhir antikorupsi adalah kontrol kebijakan. Kontrol kebijakan merupakan upaya agar kebijakan yang dibuat betul-betul efektif dan mengeliminasi semua bentuk korupsi. Pada prinsip ini, akan dibahas mengenai lembaga-lembaga pengawasan di Indonesia, *seff-evaluating organization*, reformasi sistem pengawasan di Indonesia, problematika pengawasan di Indonesia. Bentuk control kebijakan berupa partisipasi, evolusi dan reformasi.

Kontrol kebijakan berupa partisipasi yaitu melakukan kontrol terhadap kebijakan dengan ikut serta dalam penyusunan dan pelaksanaannya dan kontrol kebijakan berupa oposisi yaitu mengontrol dengan menawarkan alternatif kebijakan baru yang dianggap lebih layak. Sedangkan control kebijakan berupa revolusi yaitu

mengontrol dengan mengganti kebijakanyang dianggap tidak sesuai.

Setelah memahami prinsip yang terakhir ini, mahasiswa kemudian diarahkan agar dapat berperan aktif dalam melakukan tindakan kontrol kebijakan baik berupa partisipasi, evolusi maupun reformasi pada kebijakan-kebijakan kehidupan mahasiswa di mana peran mahasiswa adalah sebagai individu dan juga sebagai bagian dari masyarakat, organisasi, maupun institusi.<sup>70</sup>

## F. Upaya Pemberantasan Korupsi

Di muka telah dijelaskan pengertian korupsi, faktor-faktor penyebab korupsi, dampak korupsi serta prinsip-prinsip atau nilai-nilai yang perlu dikembangkan untuk mencegah seseorang melakukan korupsi atau perbuatan-perbuatan koruptif. Dalam bab ini, akan diuraikan upaya pemberantasan korupsi. Ada yang mengatakan bahwa upaya yang paling tepat untuk memberantas korupsi adalah menghukum seberat-beratnya pelaku korupsi. Dengan demikian, bidang hukum khususnya hukum pidana akan dianggap sebagai jawaban yang paling tepat untuk memberantas korupsi.<sup>71</sup>

Sebuah realita bahwa kita sudah memiliki berbagai perangkat hukum untuk memberantas korupsi yaitu peraturan perundang-undangan. Kita memiliki lembaga serta aparat hukum yang mengabdikan untuk menjalankan peraturan tersebut baik kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Kita bahkan memiliki sebuah lembaga independen yang bernama KPK yang kesemuanya dibentuk salah satunya untuk memberantas korupsi. Namun apa yang terjadi? Korupsi tetap tumbuh subur dan berkembang dengan pesat.

<sup>70</sup> Ibid, hal. 82-84.

<sup>71</sup> Tim Penulis, *Pendidikan Anti-Korupsi Untuk Perguruan Tinggi*, hal. 89.

Sedihnya lagi, dalam realita ternyata lembaga dan aparat yang ditunjuk tersebut dalam beberapa kasus justru ikut menumbuhsuburkan korupsi yang terjadi di Indonesia.

Memang harus diakui, menggempur tradisi korupsi tak ubahnya mencabut pohon bambu dari ujung daun karena korupsi telah menjadi bagian dari intrinsik budaya, gaya hidup, sekaligus kebanggaan identitas kebanggaan yang sulit dikikis. Memberantas korupsi terdengar bombastis manakala korupsi telah bermetamorfosis menjadi sebuah ideologi yang mengendap dalam kesadaran kosmologis terdalam tiap kepala orang Indonesia. Karena itu, bahaya korupsi jauh lebih laten ketimbang sekadar paham komunis yang tanpa diperangi pun akan mati dengan sendirinya.<sup>72</sup>

Ada pula pendapat yang mengatakan bahwa bekal pendidikan (termasuk Pendidikan Agama) memegang peranan yang sangat penting untuk mencegah korupsi. Benarkah demikian? Yang cukup mengejutkan, negara-negara yang tingkat korupsinya cenderung tinggi, justru adalah Negara-negara yang masyarakatnya dapat dikatakan cukup taat beragama. Ada yang mengatakan bahwa untuk memberantas korupsi, sistem dan lembaga pemerintahan serta lembaga-lembaga negara harus direformasi. Reformasi ini meliputi reformasi terhadap sistem, kelembagaan maupun pejabat publiknya. Ruang untuk korupsi harus diperkecil. Transparansi dan akuntabilitas serta akses untuk mempertanyakan apa yang dilakukan pejabat publik harus ditingkatkan.

Penting pula untuk membentuk lembaga independen yang bertugas mencegah dan memberantas korupsi. Lembaga ini harus mempertanggungjawabkan apa yang dilakukannya

---

<sup>72</sup> Masdar Hilmy, *Jihad Melawan Korupsi*, hal. 103.

kepada rakyat. Ruang gerak serta kebebasan menyatakan pendapat untuk masyarakat sipil (*civil society*) harus ditingkatkan, termasuk di dalamnya mengembangkan pers yang bebas dan independen. Pada bagian ini, akan dipaparkan berbagai upaya pemberantasan korupsi yang dapat dan telah dipraktekkan di berbagai negara. Ada beberapa bahan menarik yang dapat didiskusikan bersama untuk melihat upaya yang dapat kita lakukan untuk memberantas korupsi.<sup>73</sup>

Selain itu, *publik good* yang dilayani oleh Negara, ada beberapa pelayanan publik yang disediakan oleh lembaga privat atau swasta (*substitute publik goods*). Contoh dari layanan ini adalah penyelenggaraan pendidikan kesehatan. Walau dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas) disebutkan bahwa Negara mewajibkan pendidikan dasar 9 tahun dan Negara bertanggung jawab untuk menyelenggarakannya, sekolah swasta tetap diperkenankan beroperasi. Begitu pula dengan kesehatan, pasien dapat memilih berobat ke rumah sakit pemerintah atau swasta.

Jika kita cermati, terdapat perbedaan antara pelayanan publik yang diberikan oleh institusi publik (pemerintah) dan lembaga swasta. Perbedaan yang mendasar adalah dari segi peran. Dari segi ini Negara wajib mengelola sumber daya yang dimiliki dan mengalokasikannya demi kesejahteraan warga melalui pelayanan publik dan subsidi. Secara klasik peran Negara dijabarkan sebagai otoritas membuat kebijakan publik dan perundangan, pengelola dan pengalokasi anggaran, dan pendistribusi kesejahteraan hash pengelolaan sumber daya (*redistributive*). Karena itu, Negara diberi mandat untuk memberikan pelayanan guna memahami hak-hak warga.<sup>74</sup>

<sup>73</sup> Tim Penulis, *Pendidikan Anti-Korupsi Untuk Perguruan Tinggi*, hal. 89.

<sup>74</sup> Danang Widoyoko, Luki Djani Dkk, *Saatnya Warga Melawan Korupsi Citizen Report Card Untuk Pendidikan*, (Jakarta: Indonesia Corruption Watch, 2006), hal. 1-2.

Dari segi pertanggung gugatan, institusi pelayanan publik bertanggungjawab kepada otoritas politik dan hukum karena pemerintah mendapatkan mandat melalui proses politik serta pendanaannya berasal dari pemegang saham sehingga pertanggungjawabannya pun hanya kepada pemegang saham. Selain itu, berbeda dengan lembaga politik, orientasi pertama lembaga swasta adalah mencari keuntungan sehingga pelayanan yang diberikan pun dikompensasikan kepada biaya layanan. Berikut ini merupakan perbandingan institusi publik dan swasta;<sup>75</sup>

SEGI PERBANDINGAN	PUBLIK	SWASTA
1. Peran/ karakteristik	Regulator Publik Service Delivery Compliance	Orientasi Profit
2. Sumber Pendanaan	APBN Hutang Luar Negeri Obligasi	Pemegang Saham Standar Mutu
3. Jenis Akuntabilitas	Politik Keuangan Teknis (efektivitas dan efesiensi)	Keuangan Standar Mutu
4. Sasaran Akuntabilitas	UUD/U Undang- Undang Otoritas Politik (parlemen) BPK/BPKB	Pemegang Saham Konsumen
5. Klien	Tidak Jelas	Konsumen Barang dan Jasa
6. Indikator Keberhasilan	Sesuai dengan mandate politik efektivitas dan efesiensi	Profit bagi Perusahaan Produk di Pasar Kepuasan konsumen
7. Acuan Aktivitas	Mandat GBHN Undang-Undang Kebijakan Publik	Corporate Strategy Market Research

#### a. Konsep Pemberantasan Korupsi

Diseluruh dunia pemberantasan korupsi sudah menjadi prioritas nomor satu. Mengapa? Sulit menjawab pertanyaan ini. Ada beberapa alasan yang dikemukakan orang. Salah

<sup>75</sup> Danang Widoyoko, Luki Djani Dkk, *Saatnya Warga Melawan Korupsi Citizen Report Card Untuk Pendidikan*, hal. 3.

satunya adalah korupsi sudah demikian merajalela, sehingga menimbulkan amarah yang luar biasa dipihak warga masyarakat dan membangkitkan tekad baru dikalangan politisi untuk memberantasnya. Tetapi mengapa korupsi semakin merajalela? Salah satu sebab yang dikemukakan adalah perkembangan yang cepat dalam perdagangan internasional dan komunikasi internasional menyebabkan bangsa-bangsa di dunia mudah tergoda oleh perolehan ekonomi, dibandingkan dengan dimasa yang sudah-sudah.<sup>76</sup>

It is always necessary to relate anti-corruption strategies to characteristics of the actors involved (and the environment they operate in). There is no single concept and program of good governance for all countries and organizations, there is no 'one right way'. There are many initiatives and most are tailored to specific contexts. Societies and organizations will have to seek their own solutions.

Dari pernyataan di atas dapat dipahami bahwa sangat penting untuk menghubungkan strategi atau upaya pemberantasan korupsi dengan melihat karakteristik dari berbagai pihak yang terlibat serta lingkungan di mana mereka bekerja atau beroperasi. Tidak ada jawaban, konsep atau program tunggal untuk setiap negara atau organisasi. Ada begitu banyak strategi, cara atau upaya yang kesemuanya harus disesuaikan dengan konteks, masyarakat maupun organisasi yang dituju. Setiap negara, masyarakat maupun organisasi harus mencari cara mereka sendiri untuk menemukan solusinya.

Di atas telah dipaparkan bahwa upaya yang paling tepat untuk memberantas korupsi adalah dengan memberikan pidana atau menghukum seberat-beratnya pelaku korupsi.

---

<sup>76</sup> Robert Klitgaard, Ronald Maclean-Abaroa, dan Lindsey Parris, *Penuntut Pemberantas Korupsi dalam Pemerintah Daerah*, hal. 9.

Dengan demikian bidang hukum khususnya hukum pidana akan dianggap sebagai jawaban yang paling tepat untuk memberantas korupsi. Benarkah demikian?<sup>77</sup>

b. Upaya Penanggulangan Kejahatan (Korupsi) dengan Hukum Pidana

Dalam pandangan Nawawi Arief, yang dikutip oleh tim penulis pendidikan Anti-korupsi untuk perguruan tinggi. Bahwa, ada hal penting yang patut dipikirkan dalam menggunakan upaya penanggulangan korupsi. Hal ini didasarkan pada pertimbangan bahwa sarana memiliki 'keterbatasan' dan mengandung beberapa 'kelemahan' (sisi negatif) sehingga fungsinya seharusnya hanya digunakan secara 'subsidiar'. Sebagaimana berikut ini;

1. Dilihat secara dogmatis, sanksi pidana merupakan jenis sanksi yang paling tajam dalam bidang hukum, sehingga harus digunakan sebagai ultimum remedium (obat yang terakhir apabila cara lain atau bidang hukum lain sudah tidak dapat digunakan lagi);
2. Dilihat secara fungsional atau pragmatis, operasionalisasi dan aplikasinya menuntut biaya yang tinggi;
3. Sanksi pidana mengandung sifat kontradiktif atau paradoksial yang mengandung efek samping yang negatif. Hal ini dapat dilihat dari kondisi overload Lembaga Pemasyarakatan;
4. Penggunaan hukum pidana dalam menanggulangi kejahatan hanya merupakan 'kurierenam symptom' (menyembuhkan gejala), ia hanya merupakan pengobatan simptomatik bukan pengobatan kausatif karena sebab-

---

<sup>77</sup> Tim Penulis, *Pendidikan Anti-Korupsi Untuk Perguruan Tinggi*, hal. 90.



sebab kejahatan demikian kompleks dan berada di luar jangkauan hukum pidana;

5. Hukum pidana hanya merupakan bagian kecil (subsistem) dari sarana kontrol sosial lainnya yang tidak mungkin mengatasi kejahatan sebagai masalah kemanusiaan dan kemasyarakatan yang sangat kompleks;
6. Sistem pemidanaan bersifat fragmentair dan individual atau personal, tidak bersifat struktural atau fungsional;
7. Efektifitas pidana (hukuman) bergantung pada banyak faktor dan masih sering diperdebatkan oleh para ahli.<sup>78</sup>

c. Merumuskan strategi Anti-korupsi

Apa strategi Anti-korupsi itu? Jawaban awalnya adalah strategi berfokus pada sistem yang korup, bukan (hanya) pada manusia-manusia yang korup. Dengan kata lain, kita jangan hendaknya berfikir mengenai korupsi dari sisi manusia tidak bermoral yang melanggar hukum dan mengkhianati kepercayaan yang diberikan kepadanya (meskipun ini memang benar). Kita harus berfikir mengenai sistem yang mudah dihindangi berbagai kegiatan yang melanggar hukum.<sup>79</sup>

Bahwa dibutuhkan sebuah *strategi* untuk memerangi korupsi mungkin sudah jelas, tetapi sering terjadi upaya Anti-korupsi tidak memiliki strategi. Korupsi jangan dilihat sebagai sekadar penyimpangan atau ulah orang-orang tidak berakhlak. Kunci untuk mencapai hasil dalam mengadakan perubahan adalah mengubah kebijakan dan sistem, bukan memburu satu dua penjahat, membuat undang dan peraturan

---

<sup>78</sup> Tim Penulis, *Pendidikan Anti-Korupsi Untuk Perguruan Tinggi*, hal. 91

<sup>79</sup> Robert Klitgaard, Ronald Maclean-Abaroa, dan Lindsey Parris, *Penuntut Pemberantas Korupsi dalam Pemerintah Daerah*, hal. 28.

baru, atau mengeluarkan himbaun agar semua orang meningkatkan moral masing-masing. Selama ada monopoli plus wewenang minus akuntabilitas, selama itu pula akan ada korupsi.

Bila gaji pejabat pemerintah kecil dan ia tidak dapat imbalan lain atau insentif karena telah melakukan tugasnya dengan baik, dan bila sanksi bagi tindak korupsi jarang ditegakkan dan ringan pula, maka dapat dipastikan bahwa korupsi akan merajarela. Perubahan yang berhasil berurusan dengan masalah-masalah sistemik seperti ini. Contoh strategi Anti-korupsi yang diterapkan oleh Hong Kong sebagai berikut;

1. Bila dihadapkan pada korupsi sistematis. Hendaknya disadari bahwa pendekatan-pendekatan biasa yang berkisar di sekitar penegakan hukum, tidak cukup. Kekuasaan sebesar apapun untuk melakukan penyelidikan akan gagal bila perangkat penyelidikan itu sendiri korup.
2. Bentuk lembaga baru yang independen untuk memerangi korupsi, dengan anggota yang dipilih secara hati-hati, cakap dan berjiwa kepemimpinan dan tidak gentar menghadapi apa pun, dan dengan control intern yang kuat. Bentuk badan-badan pengawas beranggotakan warga masyarakat untuk mengarahkan dan memantau lembaga Anti-korupsi itu. Kedua lembaga ini akan menimbulkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.
3. Basmi budaya tidak percaya ucapan pemerintah dan ikut arus dengan cara mengadili koruptor "kakap". Kemudian pusatkan perhatian pada pencegahan. Lakukan analisis sistematis atas fungsi-fungsi pemerintah. Hapuskan

monopoli sejauh mungkin, per jelas batas-batas wewenang, dan tingkatkan akuntabilitas. Jalin kerjasama dengan lembaga-lembaga pemerintah, jangan musuhi mereka. Kerjasama ini tidak hanya dapat memberantas korupsi tetapi juga dapat memperbaiki secara mendasar mekanisme pemberian layanan masyarakat.

4. Kerahkan warga masyarakat untuk memerangi korupsi dengan cara menciptakan cara-cara baru untuk mendapatkan informasi dari warga mengenai korupsi dan untuk memberikan penyuluhan pada warga mengenai kerugian yang disebabkan oleh korupsi. Pengarahan warga masyarakat ini tidak hanya dapat membasmi korupsi, tetapi juga akan dapat memperbaiki secara mendasar mengenai partisipasi dan dukungan warga.
5. Pendeknya, hendaknya dipahami, korupsi sistematis memerlukan pendekatan yang sistematis dan perubahan-perubahan fundamental. Upaya memerangi korupsi dapat mendorong terjadinya perubahan dalam tubuh pemerintah daerah.<sup>80</sup>

Berikut akan dipaparkan berbagai upaya atau strategi yang dilakukan untuk memberantas korupsi yang dikembangkan oleh United Nations yang dinamakan the Global Program Against Corruption dan dibuat dalam bentuk United Nations Anti-Corruption Toolkit;

#### 1. Pembentukan Lembaga Anti-korupsi

- a. Salah satu cara untuk memberantas korupsi adalah dengan membentuk lembaga yang independen yang khusus menangani korupsi. Sebagai contoh di beberapa negara didirikan lembaga yang dinamakan Ombudsman.

---

<sup>80</sup> Ibid, hal. 25-27.

Lembaga ini pertama kali didirikan oleh Parlemen Swedia dengan nama Justitieombudsmannen pada tahun 1809. Peran lembaga ombudsman yang kemudian berkembang pula di negara lain antara lain menyediakan sarana bagi masyarakat yang hendak mengkomplain apa yang dilakukan oleh Lembaga Pemerintah dan pegawainya. Selain itu lembaga ini juga memberikan edukasi pada pemerintah dan masyarakat serta menegembangkan perilaku serta *code of conduct* bagi lembaga pemerintah maupun lembaga hukum yang membutuhkan. Salah satu peran yang strategis adalah mengembangkan kepedulian serta pengetahuan masyarakat mengenai hak mereka untuk mendapatkan perlakuan yang baik, jujur, dan efisien dari pegawai pemerintah.

- b. Hal lain yang perlu diperhatikan adalah memperbaiki kinerja lembaga peradilan baik dari tingkat kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan. Pengadilan adalah jantungnya penegakan hukum yang harus bersikap imparisial (tidak memihak), jujur dan adil. Banyak kasus korupsi yang tidak terjerat oleh hukum karena kinerja lembaga peradilan yang sangat buruk. Bila kinerjanya buruk karena tidak mampu (*unable*), mungkin masih dapat dimaklumi. Ini berarti pengetahuan serta ketrampilan aparat penegak hukum harus ditingkatkan. Yang menjadi masalah adalah bila mereka tidak mau (*unwilling*) atau tidak memiliki keinginan yang kuat (*strong political will*) untuk memberantas korupsi, atau justru terlibat dalam berbagai perkara korupsi.
- c. Di tingkat departemen, kinerja lembaga-lembaga audit seperti Inspektorat Jenderal harus ditingkatkan. Selama ini ada kesan bahwa lembaga ini sama sekali “tidak

punya gigi” ketika berhadapan dengan korupsi yang melibatkan pejabat tinggi.

- d. Reformasi birokrasi dan reformasi pelayanan publik adalah salah satu cara untuk mencegah korupsi. Semakin banyak meja yang harus dilewati untuk mengurus suatu hal, semakin banyak pula kemungkinan untuk terjadinya korupsi. Salah satu cara untuk menghindari praktek suap menyuap dalam rangka pelayanan publik adalah dengan mengumumkan secara resmi biaya yang harus dikeluarkan oleh seseorang untuk mengurus suatu hal seperti mengurus paspor, mengurus SIM, mengurus ijin usaha atau Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) dsb.
- e. Salah satu hal yang juga cukup krusial untuk mengurangi resiko korupsi adalah dengan memperbaiki dan memantau kinerja Pemerintah Daerah. Sebelum Otonomi Daerah diberlakukan, umumnya semua kebijakan diambil oleh Pemerintah Pusat. Dengan demikian korupsi besar-besaran umumnya terjadi di Ibukota negara atau di Jakarta. Dengan otonomi yang diberikan kepada Pemerintah Daerah, kantong korupsi tidak terpusat hanya di ibukota negara saja tetapi berkembang di berbagai daerah. Untuk itu kinerja dari aparat pemerintahan di daerah juga perlu diperbaiki dan dipantau atau diawasi.
- f. Dalam berbagai pemberitaan di media massa, ternyata korupsi juga banyak dilakukan oleh anggota parlemen baik di pusat (DPR) maupun di daerah (DPRD). Alih-alih menjadi wakil rakyat dan berjuang untuk kepentingan rakyat, anggota parlemen justru melakukan berbagai macam korupsi yang ‘dibungkus’ dengan rapi. Daftar anggota DPR dan DPRD yang terbukti melakukan

korupsi menambah panjang daftar korupsi di Indonesia. Untuk itu kita perlu berhati-hati ketika ‘mencoblos’ atau ‘mencontreng’ pada saat Pemilihan Umum. Jangan asal memilih, pilihlah wakil rakyat yang punya integritas. Berhati-hati pula ketika DPR atau DPRD akan mengeluarkan suatu kebijakan atau peraturan perundang-undangan. Salah-salah kebijakan tersebut justru digunakan bagi kepentingan beberapa pihak bukan bagi kepentingan rakyat. Untuk itulah ketika Parlemen hendak mengeluarkan sebuah kebijakan yang akan mempengaruhi hajat hidup orang banyak, masyarakat sipil (*civil society*) termasuk mahasiswa dan media harus ikut mengawal pembuatan kebijakan tersebut.<sup>81</sup>

b. Pencegahan Korupsi disektor Publik

- a. Salah satu cara untuk mencegah korupsi adalah dengan mewajibkan pejabat publik untuk melaporkan dan mengumumkan jumlah kekayaan yang dimiliki baik sebelum maupun sesudah menjabat. Dengan demikian masyarakat dapat memantau tingkat kewajaran peningkatan jumlah kekayaan yang dimiliki khususnya apabila ada peningkatan jumlah kekayaan setelah selesai menjabat. Kesulitan timbul ketika kekayaan yang didapatkan dengan melakukan korupsi dialihkan kepemilikannya kepada orang lain misalnya anggota keluarga.
- b. Untuk kontrak pekerjaan atau pengadaan barang baik di pemerintahan pusat, daerah maupun militer, salah satu cara untuk memperkecil potensi korupsi adalah dengan melakukan lelang atau penawaran secara terbuka. Masyarakat harus diberi otoritas atau akses untuk dapat

---

<sup>81</sup> Tim Penulis, *Pendidikan Anti-Korupsi Untuk Perguruan Tinggi*, Hal. 93-94.

memantau dan memonitor hasil dari pelelangan atau penawaran tersebut. Untuk itu harus dikembangkan sistem yang dapat memberi kemudahan bagi masyarakat untuk ikut memantau ataupun memonitor hal ini.

- c. Korupsi juga banyak terjadi dalam perekrutan pegawai negeri dan anggota militer baru. Korupsi, kolusi dan nepotisme sering terjadi dalam kondisi ini. Sebuah sistem yang transparan dan akuntabel dalam hal perekrutan pegawai negeri dan anggota militer juga perlu dikembangkan.
- d. Selain sistem perekrutan, sistem penilaian kinerja pegawai negeri yang menitikberatkan pada proses (*proccess oriented*) dan hasil kerja akhir (*result oriented*) perlu dikembangkan. Untuk meningkatkan budaya kerja dan motivasi kerja pegawai negeri, bagi pegawai negeri yang berprestasi perlu diberi insentif yang sifatnya positif. Pujian dari atasan, penghargaan, bonus atau jenis insentif lainnya dapat memacu kinerja pegawai negeri. Tentu saja pemberian ini harus disertai dengan berbagai pra-kondisi yang ketat karena hal ini juga berpotensi korupsi, karena salah-salah hal ini justru dipergunakan sebagai ajang bagi-bagi bonus di antara para pegawai negeri.<sup>82</sup>

### 3. Pencegahan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat

- a. Salah satu upaya memberantas korupsi adalah memberi hak pada masyarakat untuk mendapatkan akses terhadap informasi (*access to information*). Sebuah harus dibangun di mana kepada masyarakat (termasuk media) diberikan hak meminta segala informasi yang berkaitan dengan kebijakan pemerintah yang mempengaruhi

---

<sup>82</sup> Ibid, hal. 95-96.

hajat hidup orang banyak. Hak ini dapat meningkatkan keinginan pemerintah untuk membuat kebijakan dan menjalankannya secara transparan. Pemerintah memiliki kewajiban melakukan sosialisasi atau diseminasi berbagai kebijakan yang dibuat dan akan dijalankan.

- b. Isu mengenai publik *awareness* atau kesadaran serta kepedulian publik terhadap bahaya korupsi dan isu pemberdayaan masyarakat adalah salah satu bagian. Sejak beberapa tahun silam KPK bekerjasama dengan perguruan tinggi dan guru membuat modul pendidikan Anti-korupsi bagi siswa Sekolah Menengah dan siswa Sekolah Dasar. Pendidikan Anti-korupsi ini bertujuan untuk sejak dini memperkenalkan kepada siswa sekolah tentang bahaya korupsi. Buku Ajar Pendidikan Anti-korupsi yang anda pegang ini juga merupakan salah satu cara untuk meningkatkan kepedulian serta kesadaran mahasiswa akan bahaya korupsi. Buku saku yang dikeluarkan oleh KPK adalah salah satu contoh saja cara melakukan kampanye untuk mencegah dan memberantas korupsi.

Salah satu cara untuk meningkatkan publik *awareness* adalah dengan melakukan kampanye tentang bahaya korupsi. Sosialisasi serta diseminasi di ruang publik mengenai apa itu korupsi, dampak korupsi dan bagaimana memerangi korupsi harus diintensifkan. Kampanye tersebut dapat dilakukan dengan menggunakan media massa (baik cetak maupun tertulis), melakukan seminar dan diskusi. Spanduk dan poster yang berisi ajakan untuk menolak segala bentuk korupsi 'harus' dipasang di kantor-kantor pemerintahan sebagai media kampanye tentang bahaya korupsi. Di beberapa negara termasuk



Indonesia, isu korupsi dimasukkan sebagai salah satu bagian dari mata pelajaran atau matakuliah baik di tingkat sekolah dasar maupun menengah dan perguruan tinggi. Sayangnya subjek ini belum diberikan secara nasional. *Transparency International* juga mengeluarkan *toolkit* mengenai pendidikan Anti-korupsi untuk anak di tingkat pendidikan dasar. Mata kuliah yang mahasiswa pelajari saat ini adalah salah satu cara supaya mahasiswa dapat mengetahui seluk-beluk korupsi dan meningkatkan kepedulian serta kesadaran akan bahaya korupsi. Di beberapa sekolah didirikan 'Kantin Kejujuran' yang bertujuan untuk melatih kejujuran siswa.

- c. Salah satu cara untuk ikut memberdayakan masyarakat dalam mencegah dan memberantas korupsi adalah dengan menyediakan sarana bagi masyarakat untuk melaporkan kasus korupsi. Sebuah mekanisme harus dikembangkan di mana masyarakat dapat dengan mudah dan bertanggungjawab melaporkan kasus korupsi yang diketahuinya. Mekanisme tersebut harus dipermudah atau disederhanakan misalnya via telepon, surat atau telex. Dengan berkembangnya teknologi informasi, media internet adalah salah satu mekanisme yang murah dan mudah untuk melaporkan kasus-kasus korupsi.
- d. Di beberapa Negara, pasal mengenai 'fitnah' dan 'pencemaran nama baik' tidak dapat diberlakukan untuk mereka yang melaporkan kasus korupsi dengan pemikiran bahwa bahaya korupsi dianggap lebih besar dari pada kepentingan individu. Walaupun sudah memiliki aturan mengenai perlindungan saksi dan korban yakni UU No.13 Tahun 2006 tentang Perlindungan

Saksi dan Korban, masyarakat Indonesia masih dihantui ketakutan akan tuntutan balik melakukan fitnah dan pencemaran nama baik apabila melaporkan kasus korupsi.

- e. Pers yang bebas adalah salah satu pilar dari demokrasi. Semakin banyak informasi yang diterima oleh masyarakat, semakin paham mereka akan bahaya korupsi. Menurut Pope media yang bebas sama pentingnya dengan peradilan yang independen. Selain berfungsi sebagai alat kampanye mengenai bahaya korupsi, media memiliki fungsi yang efektif untuk melakukan pengawasan atas perilaku pejabat publik. Henry Grunwald, pemimpin redaksi Tim menyatakan bahwa 'pemerintahan yang terpilih secara demokratis dan patuh sekalipun dapat dengan mudah menjadi pemerintah yang korup apabila kekuasaannya tidak diawasi oleh pers yang bebas'. Media mempunyai peranan khusus dalam perang melawan korupsi. Pejabat publik mungkin lebih mudah tergoda untuk menyalahgunakan jabatan mereka untuk kepentingan pribadi bila mereka yakin tidak ada resiko bahwa perbuatan mereka akan terbongkar dan diungkapkan oleh pers (Pope:2003). Namun media juga memiliki titik lemah. Hal ini terjadi apabila media tersebut dimiliki oleh pemerintah. Umumnya pemerintah adalah pemilik stasiun televisi dan radio terbesar dalam suatu negara. Kita ambil contoh saja TVRI dan RRI. Karena milik pemerintah, tentu saja independensinya tidak dapat terlalu diandalkan. Salah satu titik lemah lagi dari media adalah pekerjaan jurnanisme yang berbahaya. Penculikan, penganiayaan dan intimidasi terhadap jurnalis atau wartawan menjadi hal yang biasa (Pope : 2003). Segala macam cara akan digunakan oleh

mereka (terutama yang memiliki uang dan kekuasaan) yang tidak ingin namanya tercoreng karena pemberitaan di media. Selain itu banyak pula negara yang berupaya untuk melakukan penyensoran terhadap informasi yang akan diberitakan oleh media atau bahkan pencabutan ijin usaha sebuah media.

- f. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) atau NGOs baik tingkat lokal atau internasional juga memiliki peranan penting untuk mencegah dan memberantas korupsi. Mereka adalah bagian dari masyarakat sipil (*civil society*) yang keberadaannya tidak dapat diremehkan begitu saja. Sejak era reformasi, LSM baru yang bergerak di bidang Anti-Korupsi banyak bermunculan. Sama seperti pers yang bebas, LSM memiliki fungsi untuk melakukan pengawasan atas perilaku pejabat publik. Simak saja apa yang telah dilakukan oleh ICW (Indonesia Corruption Watch), salah satu LSM lokal yang berkedudukan di Jakarta. LSM ini menjadi salah satu garda terdepan yang mengawasi segala macam perbuatan pemerintah dan perilaku anggota parlemen dan lembaga peradilan. Sama seperti pekerjaan jurnalisme yang berbahaya, penculikan penganiayaan dan intimidasi terhadap aktivis LSM sangat sering terjadi.
- g. Salah satu cara lain untuk mencegah dan memberantas korupsi adalah dengan menggunakan atau mengoperasikan perangkat electronic surveillance. Electronic surveillance adalah sebuah perangkat atau alat untuk mengetahui dan mengumpulkan data dengan menggunakan peralatan elektronik yang dipasang pada tempat-tempat tertentu. Alat tersebut misalnya audio-microphones atau kamera video (semacam kamera CCTV

atau Closed Circuit Television) atau datainterception dalam kasus atau di tempat-tempat di mana banyak digunakan telepon genggam dan *electronic mail* (e-mail) atau surat elektronik. Namun di beberapa negara, penggunaan *electronic surveillance* harus disetujui terlebih dahulu oleh masyarakat, karena masyarakat tidak ingin pemerintah 'memata-matai' segenap aktivitas dan gerak langkah yang mereka lakukan. Tindakan memata-matai atau 'spying' ini, dalam masyarakat yang demokratis dianggap melanggar hak asasi terutama hak akan *privacy*. Dalam beberapa kasus, negara yang otoriter justru akan menggunakan data yang terekam dalam *electronic surveillance* untuk melakukan intimidasi terhadap rakyatnya.<sup>83</sup>

#### 4. Sistem penganggaran yang baik dan berbasis kinerja

Salah satu kelemahan yang mengakibatkan terjadinya korupsi adalah lemahnya penganggaran. Penganggaran di lingkungan pemerintah daerah sering sangat miskin kreatifitas dan tidak berdasarkan basis data yang akurat. Penganggaran yang disusun seharusnya mempertimbangkan aspek seperti berapa jumlah berapa penduduk miskin, jumlah pelaku usaha kecil dan menengah, panjang jalan yang rusak atau belum diaspal, luas hutan dan lahan yang rusak, berapa jumlah usia anak sekolah, berapa luas sawah yang harus diairi, berapa kasus penyakit tertentu dalam satu tahun, dll.

Penganggaran oleh pemerintah seringkali terjebak pada kegiatan rutin dan hal yang bersifat birokratis. Berapa pengeluaran yang sebenarnya sebuah keniscayaan, tidak masuk dalam komponen anggaran. Misalnya untuk hal-hal kecil yang pada kenyataannya harus dibayarkan. Dalam

---

<sup>83</sup> Ibid, hal. 96-99.

banyak kasus, berapa pengeluaran untuk kegiatan yang seharusnya bisa diprediksi, namun tidak dianggarkan. Yang terjadi kemudian pemda mengeluarkan biaya untuk sesuatu yang tidak dianggarkan sebelumnya, sebuah pintu awal manipulasi.

Jika biaya tersebut tidak bisa diakomodir dalam perubahan anggaran dipertengahan tahun, maka yang terjadi adalah melakukan pengeluaran melalui pos lain yang dilarang oleh aturan, atau bahkan dengan pertanggungjawaban yang fiktif. Dengan permakluman-permakluman tersebut, maka lama-kelamaan pengeluaran-pengeluaran lain yang sebenarnya tidak dianggarkan juga bisa dianggap “sah” dikeluarkan. Dari kebiasaan manipulasi ini, akhirnya berubah menjadi sesuatu yang melanggar hukum yaitu kejahatan luar biasa berupa korupsi.<sup>84</sup>

## 5. Sistem Remunerasi Pegawai Negeri yang Baik

Banyak korupsi dilakukan bermula dari rendahnya *take home pay*. Korupsi kecil yang didorong alasan kebutuhan “dapur” ini menyebabkan seorang PNS “kreatif” untuk memanfaatkan kewenangan yang dimilikinya misalnya mengutip “uang rokok” bagi layanan publik yang ia gunakan. Akhirnya karena terlalu lama, kebiasaan buruk ini berubah menjadi korupsi besar, misalnya *mark up proyek* atau manipulasi lainnya, yang mengantarkan Indonesia menjadi republik korup nomor 15 di dunia. Jika menginginkan trobosan pemberantasan secara sistemik, maka perlu disusun sistem remunerasi yang bisa memenuhi kebutuhan layak seorang PNS.

---

<sup>84</sup> Nico Andriyanto, Ludy Prima Johansyah, *Korupsi di Daerah Modus Operandi dan Peta Jalan Pencegahannya*, (Surabaya: CV. Putra Media Nusantara, 2010), hal. 181-182.

Pada umumnya, PNS di negeri kita bukan berdasarkan kinerjanya, akan tetapi berdasarkan sama rata dan ukuran loyalitas. Sebuah ungkapan di “dunia” PNS mengatakan bahwa kerja keras atau santai hasilnya tetap sama saja. Yang terjadi kemudian pegawai cenderung berlaku malas dan suka mangkir dari tanggungjawab sebagai pelayan masyarakat. Bertahun-tahun, PNS kita dipertahankan dalam jumlah yang sangat banyak untuk pekerjaan administratif. Pekerjaan yang bisa dilakukan oleh satu orang dikerjakan oleh tiga, atau empat orang. Sementara pekerjaan yang bersifat profesi ataupun spesialisasi seperti guru, dokter, akuntan masih kekurangan.

Pada saat ini telah dimungkinkan menganggarkan tunjangan kesejahteraan daerah untuk pegawai daerah, yang istilah pemerintah pusat yaitu remunerasi. Daerah seperti kabupaten solok dan jemberana, kota pecan baru, serta provinsi gorontalo telah menerapkan kebijakan ini pemberian tunjangan ini dilakukan dengan menata kebijakan pemberian tunjangan dengan menghabiskan berbagai macam honor serta efisiensi realisasi belanja daerah dan kemudian mengalokasikannya secara legal kepada PNS dengan sejumlah pertimbangan, seperti tingkat jabatan, penilaian kerja, tingkat kehadiran, tingakat tanggung jawab dan resiko pekerjaan. Di Negara-negara maju yang minim korupsi kebijakan seperti ini sudah lama diterapkan, di mana gaji pegawai Negeri tidak kalah atau bahkan lebih tinggi dibandingkan dengan gaji pegawai swasta, tentu saja dengan kinerja yang juga unggul.<sup>85</sup>

6. Pengembangan dan Pembuatan berbagai Instrumen Hukum yang mendukung Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi

---

<sup>85</sup> Ibid, hal. 182-184.

Untuk mendukung pencegahan dan pemberantasan korupsi tidak cukup hanya mengandalkan satu instrumen hukum yakni Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Berbagai peraturan perundang-undangan atau instrumen hukum lain perlu dikembangkan. Salah satu peraturan perundang-undangan yang harus ada untuk mendukung pemberantasan korupsi adalah Undang-Undang Tindak Pidana *Money Laundering* atau Pencucian Uang.

Untuk melindungi saksi dan korban tindak pidana korupsi, perlu instrumen hukum berupa UUPerindungan Saksi dan Korban. Untuk memberdayakan Pers, perlu UU yang mengatur mengenai Pers yang bebas. Bagaimana mekanisme masyarakat yang akan melaporkan tindak pidana korupsi dan penggunaan *electronic surveillance* juga perlu diatur supaya tidak melanggar privasi seseorang. Selain itu hak warga negara untuk secara bebas menyatakan pendapatnya harus pula diatur.

Pasal-pasal yang mengkriminalisasi perbuatan seseorang yang akan melaporkan tindak pidana korupsi serta menghalang-halangi penyelidikan, penyidikan dan pemeriksaan tindak pidana korupsi seperti pasal mengenai fitnah atau pencemaran nama baik perlu dikaji ulang dan bilamana perlu diamandemen atau dihapuskan.

Hal ini bertujuan untuk lebih memberdayakan masyarakat. Masyarakat tidak boleh takut melaporkan kasus korupsi yang diketahuinya. Selain itu, untuk mendukung pemerintahan yang bersih, perlu instrument Kode Etik atau *code of conduct* yang ditujukan untuk semua pejabat publik, baik pejabat eksekutif, legislatif maupun *code of conduct* bagi aparat lembaga peradilan (kepolisian, kejaksaan dan pengadilan).<sup>86</sup>

---

<sup>86</sup> Tim Penulis, *Pendidikan Anti-Korupsi Untuk Perguruan Tinggi*, hal. 99.

## 7. Monitoring dan Evaluasi

Ada satu hal penting lagi yang harus dilakukan dalam rangka mensukseskan pemberantasan korupsi, yakni melakukan monitoring dan evaluasi. Tanpa melakukan monitoring dan evaluasi terhadap seluruh pekerjaan atau kegiatan pemberantasan korupsi, sulit mengetahui capaian yang telah dilakukan. Dengan melakukan monitoring dan evaluasi, dapat dilihat strategi atau program yang sukses dan yang gagal.

Untuk strategi atau program yang sukses, sebaiknya dilanjutkan. Untuk yang gagal, harus dicari penyebabnya. Pengalaman negara-negara lain yang sukses maupun yang gagal dapat dijadikan bahan pertimbangan ketika memilih cara, strategi, upaya maupun program pemberantasan korupsi di negara kita. Namun mengingat ada begitu banyak strategi, cara atau upaya yang dapat digunakan, kita tetap harus mencari cara kita sendiri untuk menemukan solusi memberantas korupsi.<sup>87</sup>

---

<sup>87</sup> Ibid, hal. 9.





## BAB IV

# ANATOMI TINDAK PIDANA KORUPSI

### A. Jenis dan Tipologi Korupsi

INSTRUMEN HUKUM menjaring tindakan pada korupsi termasuk KKN secara umum tidak cukup lengkap, peraturan perundang-undangan yang seharusnya dapat berfungsi dan dioptimalkan (*ius operatum*) untuk mencegah dan menanggulangi perbuatan korupsi bagi pejabat yang menyalahgunakan kewenangan, kesempatan dan sarana prasana yang ada karena kedudukan dan jabatan yang secara langsung dan tak langsung merugikan ekonomi dan keuangan negara.

Menurut prof. Dr. Syed Husein Alatas, yang dikutip oleh Kusumah,<sup>1</sup> guru besar Universitas singapura yang banyak menulis dan pakar perihal korupsi menyebutkan terdapat 7 (tujuh) tipologi atau bentuk dan jenis korupsi yaitu:

- a. Korupsi *Transaksif* (*Transaktif Corruption*), jenis korupsi yang menunjuk adanya kesepakatan timbal balik antara pihak pemberi dan pihak penerima demi keuntungan

---

<sup>1</sup> Kusumah, M. W., *Tegaknya Supermasi Hukum*, (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2001), hal.141.

kepada kedua belah pihak dan dengan aktif diusahakan tercapainya keuntungan yang biasanya melibatkan dunia usaha atau bisnis dengan pemerintah atau masyarakat dan pemerintahan seperti subversi, transaksi ilegal luar negeri, swastamisasi anggaran pemerintah, transaksi penyelundupan, transaksi penggelapan milik negara, kesepakatan mengalirkan uang ke rekening pribadi, dan menyalah gunakan dana.

- b. Korupsi perkerabatan (*nepotistic corruption*) yang menyangkut penyalahgunaan kekuasaan dan wewenang untuk berbagai keuntungan bagi teman atau sanak saudara dan kroni-kroninya, atau tindakan yang memberikan perlakuan khusus, dalam bentuk uang atau bentuk lain kepada mereka, yang bertentangan dengan norma dan peraturan yang berlaku seperti perkoncoan, kontrak order, dan menutupi kejahatan.
- c. Korupsi yang memeras (*extortive corruption*) adalah korupsi yang dipaksakan kepada suatu pihak yang biasanya disertai ancaman, terror, penekanan(*pressure*) terhadap kepentingan orang-orang dan hal-hal yang dimikinya.
- d. Korupsi *Investif*(*Investive Corruption*), dalah memberikan suatu jasa atau barang tertentu kepada pihak lain demi keuntungan di masa depan, selain keuntungan yang dibayangkan akan diperoleh dimasa datang semisal penyuapan dan penyogokan, mengutip pungutan, meminta komisi, menawarkan jasa perantara, menerima hadiah, uang jasa, uang pelicin dan hiburan, perjalanan yang tidak pada tempatnya operasi pasar gelap.
- e. Korupsi *Defensif* (*Defensive Corruption*), adalah pihak yang akan dirugikan terpaksa ikut terlibat di dalamnya

atau bentuk ini membuat terjebak bahkan menjadi korban perbuatan korupsi atau perbuatan korban korupsi pemerasan demi mempertahankan diri seperti menipu, mengecoh, mencurangi, dan memperdaya serta kesan yang salah.

- f. Korupsi *Otogenik* (*Outogenic Corruption*) yaitu korupsi yang dilakukan seorang diri (*single Fighter*), tidak ada orang lain atau pihak lain yang terlibat, seumpama menipu, mencuri, merampok, menggunakan uang yang tidak tepat, tidak menjalankan tugas, desersi, memberi kesaksian palsu, menggelapkan uang atau pajak, menyalahgunakan rumah jabatan dan hak istimewa jabatan.

Korupsi *Supportif* (*Supportif Corruption*), adalah korupsi dukungan dan tak ada orang atau pihak lain yang terlibat. Yang tidak secara langsung menyangkut uang atau imbalan langsung dalam bentuk lain, tindakan yang dilakukan untuk melindungi dan memperkuat korupsi kekuasaan yang sudah ada seperti menjegal pemilihan umum, memalsukan kartu suara, pembelian barang persediaan, memberi ampun atau grasi tidak pada tempatnya.<sup>2</sup>

Tujuh tipologi di atas dapat diklasifikasikan dalam dua kategori, yaitu administratif dan struktural. Bersifat administratif adalah korupsi yang dilakukan pegawai pemerintah atau pejabat negara dan tidak ada urusannya dengan politik. Biasanya korupsi model ini didorong oleh rasa keterpaksaan dan keserakahan. Korupsi bersifat struktural berkaitan erat dengan adanya ikatan kerjasama atau persekongkolan antara pihak yang dekat dengan struktur kekuasaan dengan pihak yang tidak memiliki kedekatan. Korupsi struktural biasanya dilakukan mereka yang bermotif

---

<sup>2</sup> Hakim Muda Harahap, *Ayat-Ayat Korupsi*, hal. 19.

materi (*income corruption*) dan bermotif untuk menciptakan peraturan baru agar dapat melegalisasi tindakan korupsi menjadi legitimated.

Bidang yang menjadi lahan praktik korupsi adalah, antara lain: pemerintahan (eksekutif, yudikatif, legislatif), perusahaan swasta, anggota komite olahraga internasional, wasit pertandingan olahraga, penipuan berkedok pemimpin agama, lembaga 'amal' yang menggalang dana umat, organisasi-organisasi publik, seluruh media yang bergerak dalam informasi pemberitaan. Pihak yang dirugikan dalam tindakan korupsi adalah masyarakat dan pihak ketiga, mitra jujur yang kalah dalam persaingan, karena membayar sesuai ketentuan.

Sedangkan yang diuntungkan adalah oknum pejabat pelaku, masyarakat yang membayar lebih sedikit dari yang seharusnya, dan pihak ketiga yang tidak jujur. Secara khusus praktik korupsi dalam lembaga-lembaga pemerintahan dapat berupa *mark up* harga pengadaan barang, sehingga terjadi kemahalan harga, pajak yang tidak disetorkan kepada negara, penentuan pemenang lelang yang tidak sesuai prosedur dan ketentuan, suap yang ditujukan untuk memperlancar pelaksanaan tugas pencairan anggaran, pengangkatan pegawai negeri yang tidak sesuai prosedur dan perjalanan dinas fiksi.

Dengan memahami tipologi (*prototype*) atau bentuk dan jenis korupsi tersebut menjadi semakin kronis serta kompleksnya permasalahan korupsi yang terjadi di tingkat nasional dan transnasional. Korupsi memerlukan perhatian yang serius di Indonesia terutama yang banyak terjadi yaitu korupsi transaktif yang merupakan bentuk penyalahgunaan kekuasaan dan wewenang politik dan ekonomi yang

berpengaruh kepada kondisi sosial budaya kehidupan masyarakat.

Lebih khusus bagi korupsi jenis ini merupakan bagian dari *patronase* yang menjadi ciri dinamika perekonomian nasional dan global sumber daya politik dimanfaatkan untuk tujuan strategis menguasai dan menguras kekayaan sumber daya alam, kekayaan negara secara diskriminatif dan tak adil, yang penting menguntungkan kepentingan bisnis terikat dengan *partonase* kekuasaan. Gambaran lebih teknis tentang praktik bisnis pada korupsi *Transaktif* yaitu:

a. Jenis korupsi "*epidemic*" (*epidemic corruption*)

Jenis Korupsi konvensional yang lebih populer dengan korupsi publik (*publik corruption*) dan dengan cepat mewabah atau "*epedimic*" yang pelakunya biasanya masyarakat atau berbagai tingkat bawah dengan pungutan "tidak resmi" atau pungutan liar, suap menyuap untuk urusan administrasi, surat izin atau lisensi, layanan dari pemerintah masih ada tambahan biaya petugas pajak yang curang, tagihan rekening listrik, telepon yang merugikan masyarakat, jadi benar-benar merupakan bentuk korupsi yang hampir sehari-hari terjadi masyarakat.

b. Jenis korupsi "*endemic*" (*endemic corruption*)

Jenis korupsi "*endemic corruption*" (*endemic corrupton*) merupakan bentuk korupsi antara kalangan bisnis, pelaku bisnis dengan tindakan kolusi pada birokrat, sehingga jatah proyek pada yang tak berhak, komisi untuk pengadaan barang dan jasa oleh pemerintah daerah, melakukan *ruislag* tukar guling dengan keputusan-keputusan dipengaruhi unsur korupsi, menyalahgunakan APBN dan berbagai bentuk penyelewengan keuangan negara dalam pengelolaan

keuangan dengan alasan kepentingan tugas padahal relatif dan meragukan tapi menguntungkan diri sendiri atau korupsi ditempuh dengan cara sistematis dengan memanfaatkan peluang saksi dalam bisnis mulai proses perencanaan atau korupsi berencana.<sup>3</sup>

Selanjutnya sejak awal kontraktor berusaha memperoleh proyek melalui pimpinan proyek (pimpro) dan bekerja sama dengan rekanan pemborong atau kontraktor, kerja sama dapat terjadi mulai menyusun Rancangan Rencana Kerja dan Anggaran kerja (Renja), Rencana Kerja Anggaran Kementrian Lembaga (RKA\_KL) menjadi daftar isian pelaksanaan Anggaran (DIPA), termasuk mulai penyusunan Rencana Anggaran Biaya(RAB), suatu proyek pembangunan dan perencanaan agar terbit DIPS, sedangkan rencana tentang pembagian keuntungan atau komisi telah disusun rapi sejak awal. Modus korupsi yang sistemik melalui perencanaan inilah yang sering membuat biaya operasional proyek menjadi kecil misalnya pajak PPN, PPh 12,5%, Rendalwas 4%, cadangan susut/ hangus sampai 6% sisanya 55% sampai 60% dan kualitas proyek menjadi buruk di luar spektek, bestek sehingga menjadi bermasalah.

c. Jenis Korupsi “transnasional” (*transnasional corruption*).

Jenis korupsi “transnasional” (*transnasional corruption*) yaitu bentuk korupsi dilakukan oleh pelaku bisnis atau para elite birokrat dengan cara yang professional dengan memanfaatkan *hi-tech* dan bentuk kejahatan dimensi baru (*new dimentions crime*) bahkan melibatkan investor asing, kontraktir asing dan oleh badan-badan uasaha besar

---

<sup>3</sup> Hamzah, A., *Korupsi Dalam Pengolaan Proyek Pembangunan*, (Jakarta: CV. Akademi Prasindo, 1984), hal. 59.

yang berbentuk *Multi National Corporation* (MNC) yang melakukan korupsi, serta yang lebih populer disebut sebagai konglomerat hitam karena korupsi jenis ini langsung berpengaruh kepada besar kecilnya APBN.<sup>4</sup>

Praktik jenis korupsi transnasional misalnya dalam bentuk *mark-up* proyek-proyek pertambangan emas, tembaga, minyak, eksplorasi uap, batu bara dan lain-lain, manipulasi pengolaan hutan disertai *illegal logging*, komisi dalam jumlah besar pada proyek-proyek pemerintah, manipulasi dan manipulasi proyek-proyek pembangunan lainnya serta kerugian yang ditimbulkan mencapai milyaran dolar atau triliun Rupiah.

Jenis dan Tipologi Korupsi menurut Bentuk-bentuk TIPIKOR menurut UU No. 31 Tahun dan diubah dengan UU No.20 Tahun 2001.<sup>5</sup>

Jenis dan tipologi korupsi menurut bentuk-bentuk tindak pidana korupsi yang dimuat dalam UU No.31/1999 yang diubah dengan UU No.20/2001 sebagai berikut:

- a. Tindak Pidana Korupsi dengan Memperkaya Diri Sendiri, Orang Lain, atau suatu Korporasi (pasal 2)
- b. Tindak Pidana Korupsi dengan Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan, Sarana Jabatan, atau Kedudukan (pasal 3)
- c. Tindak Pidana Korupsi Suap dengan Memberikan atau Menjanjikan Sesuatu (pasal 5)
- d. Tindak Pidana Korupsi Suap pada Hakim dan Advokat

---

<sup>4</sup> Awaludin Djamin, *Pendayagunaan Aparatur Negara RI dalam era Reformasi*, (Jakarta:Yayasan Brata Bhakti Polri, 1999), hal. 19.

<sup>5</sup> Adami Chazawi, *Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia*, (Malang: Bayumedia Publisng, 2003), hal. 33.

(pasal 6)

- e. Korupsi dalam Hal Membuat Bangunan dan Menjual Bahan Bangunan dan Korupsi dalam Hal Menyerahkan Alat Keperluan TNI dan KNRI (pasal 7)
- f. Korupsi Pegawai Negeri Menggelapkan Uang dan Surat Beharga (pasal 8)
- g. Tindak Pidana Korupsi Pegawai Negeri Memalsu Buku-Buku dan Daftar-Daftar (pasal 9)
- h. Tindak Pidana Korupsi Pegawai Negeri Merusakkan Barang, Akta, Surat atau Daftar (pasal 10)
- i. Korupsi Pegawai Negeri Menerima Hadiah atau Janji yang Berhubungan dengan Kewenangan Jabatan (pasal 11)
- j. Korupsi pegawai Negeri atau Penyelenggaraan Negara atau Hakim dan Advokat Menerima Hadiah atau Janji; Pegawai Negeri Memaksa Membayar, Memotong Pembayaran, Meminta Pekerjaan, Menggunakan Tanah Negara, dan Turut serta dalam Pemborongan (pasal 12)
- k. Tindak Pidana Korupsi Suap Pegawai Negeri Menerima Gratifikasi (pasal 12B)
- l. Korupsi suap pada Pegawai Negeri dengan mengingat Kekuasaan Jabatan (pasal 13)
- M. Tindak Pidana yang Berhubungan dengan Hukum Acara Pembrantasan Korupsi
- n. Tindak Pidana Pelanggaran Terhadap Pasal 220, 231, 421, 429, dan 430 KUHP (pasal 23)



## B. Modus Operandi Korupsi

Modus operandi dari korupsi adalah cara-cara melakukan kejahatan korupsi dalam hubungannya dengan perbuatan korupsi, dapat terjadi dengan terencana dan modus operandi yang beragam. Beberapa modus operandi korupsi yang sering dilakukan oleh para koruptor antara lain:

- a. Perilaku oknum aparat pemerintahan atau birokrat dengan modus operandi yang sering digunakan terutama pada bisnis proyek jasa kontruksi atau pembangunan, pengadaan barang dan jasa seperti komisi proyek dan biaya servis pejabat tinggi sehingga biaya operasional rendah, *mark-up* harga barang, barang palsu, menyimpang dari *spektek*, pengadaan barang fiktif. Menarik untuk ditengahkan, korupsi yang dilakukan oleh 332 anggota DPRD di seluruh Indonesia dan 214 sudah dilakukan penyidikan dengan kerugian sekitar 450 miliar rupiah dengan modus operandi perjalanan dinas fiktif, penggelembungan harga barang dan jasa, *mark-up* dana operasi dan kesejahteraan DPR dan penyimpangan dana APBD yang dibagi-bagi anggota DPRD Cirebon.<sup>6</sup>
- b. Badan Usaha Milik Negara (BUMN), perbuatan korupsi dengan modus operandi pada impor gula oleh bulog melalui perusahaan yang menggunakan dokumen palsu, kredit macet pada berbagai bank dengan agunan fiktif atau jaminan fiktif, manipulasi pajak pada dinas pendapatan daerah, manipulasi dana pensiun dengan pembayaran kadaluwarsa, kasus BNI cabang utama Kebayoran Baru menggunakan dokumen ekspor fiktif lewat 37 lembar *letter of credit* L/C) kerugian 1,7 triliun rupiah.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> IGM Nurdjana, *Sistem Hukum Pidana dan Bahaya Laten Korupsi*, hal.38.

<sup>7</sup> Ibid, hal. 37.

- c. Korupsi pada KUD(Kopresi Unit Desa) dan KUT (Koprasi Unit Tani) dengan modus operandi uang kredit pembelian cengkik fiktif, pembiayaan ongkos fiktif, pemberian investasi fiktif, penyelewengan dana *fee*, pemalsuan data dalam neraca, pemalsuan kuitansi faktur pembelian, uang simpan pinjam asal uang kredit yang dibagi-bagi untuk pribadi.

Pandangan atau pengertian mengenai apa yang disebut “korup” dan apa yang tidak sangat berbeda-beda satu sama lain. Penting sekali bagi semua orang yang ingin turut mengurangi korupsi untuk menyadari bahwa apa yang diartikan sebagai “prilaku korupsi” akan berbeda-beda dengan berbagai pendapat. Upaya pemberantasan korupsi semakin sulit karena tidak ada pengertian yang asama mengenai apa yang dimaksud dengan korupsi.

Korupsi dalam semua bentuknya, bukan monopoli suatu negara. Korupsi di Cina, tempat para birokrat “menjual kekuasaan administrasi mereka” tidak ada bedanya dengan korupsi di Eropa, tempat partai-partai politik mendapat komisi dalam jumlah-jumlah sangat besar dari proyek-proyek pemerintah. Di Italia , biaya membangun jalan menurut laporan turun lebih dari dua puluh persen setelah “tangan-tangan bersih” turun tangan memberantas korupsi. Dana gelap disimpan di bank-bank Swis untuk membiayai kegiatan ilegal partai politik, dan ada kemungkinan dana-dana ini “dibocorkan” ke kantong-kantong pribadi.

Anotomi korupsi sangat dipengaruhi oleh dinamika, budaya hidup, pola hidup dan pengaruh lingkungan moral masyarakatnya, instusi sosial dan pranata-pranata sosial yang tumbuh dalam masyarakat. Proses klasifikasi dan idnetifikasi menunjukkan masalah korupsi telah menjadi fenomena sosial, serta dengan kajian sosiologi criminal yang bersumber

dari ilmu pengetahuan kriminologi, maka dapatlah dipahami tentang sebab musabab tipologi atau bentuk, jenis dan modus operandi korupsi yang menjadi semakin kompleks pada abad ke 21.

Praktik korupsi yang merugikan kepentingan masyarakat bukan hanya terjadi sektor publik saja, namun dapat terjadi pula pada sektor privat. Banyak kasus korupsi yang selalu melibatkan sektor swasta atau pengusaha. Hal ini terjadi karena praktik korupsi selalu dilakukan oleh orang atau kelompok yang mempunyai modal ekonomi dan kekuasaan. Gambaran fakta ini semakin menunjukkan dengan jelas bahwa *political society* di daerah telah betul-betul terjangkit penyakit akut korupsi.



## BAB V

# HUKUM-HUKUM TINDAK PIDANA KORUPSI

### A. Pengaturan Tindak Pidana Korupsi dalam Sistem Hukum Pidana Di Indonesia

ASPEK ASAs legalitas *pertama*, mengandung makna bahwa ketentuan dapat dipidanannya suatu perbuatan harus terjadi melalui Undang-Undang dalam arti formal atau berdasarkan kekuatan Undang-Undang dalam arti formal, yang berarti Undang-Undang dalam arti materiil yang dibuat oleh pembentuk Undang-Undang yang lebih rendah yang dikuasakan dalam arti formal untuk berbuat demikian, sedangkan aspek asas legalitas *kedua* mengandung makna bahwa pembentuk Undang-Undang yang lebih rendah dapat membuat peraturan pidana selama mendapatkan legitimasi dalam Undang-Undang dalam arti formal, tetapi tidak boleh menciptakan sanksi pidana selain yang ditentukan oleh Undang-Undang dalam arti formal.

Menurut wujudnya atau sifatnya, perbuatan-perbuatan pidana adalah perbuatan-perbuatan yang melawan hukum khususnya korupsi merupakan perbuatan yang merugikan

ekonomi dan keuangan negara, menguntungkan diri sendiri, orang lain atau *corporation* dalam arti merupakan perbuatan buruk dan menyimpang bertentangan dengan atau menghambat akan melaksananya tata dalam pergaulan masyarakat yang dianggap baik dan adil.

Dengan wujud dan sifat perbuatan tindak pidana korupsi yang spesifik, yaitu kolerasi antara aspek hukum dan moral yang sangat kompleks sehingga secara teoristik asas hukum dalam sistem hukum pidana akan sangat menentukan ratiologis dari suatu produk peraturan perundang-undangan tentang pemberantasan korupsi. Dalam rangka pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia, sesuai dengan asas hukum *lex specialis derogat legi generalis* maka diterapkan peraturan khusus tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yaitu UU No.3 Tahun 1971, UU No.31 Tahun 1999 dan UU No.20 Tahun 2001, akan tetapi peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk kejahatan seperti kejahatan perpajakan, *money laundering*, kehutanan, perikanan, pertambangan dan sebagainya yang deliknya dapat memenuhi unsur korupsi, berlaku peraturan perundang-undangan masing-masing.

Problem muncul ketika dalam penanggulangannya dilakukan seperti proses penegakan hukum dengan peraturan umum dalam hal ini korupsi sebagai peraturan khusus atau tindak pidana khusus (tipidcus) menimbulkan sistem hukum dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi karena tidak dapat diterapkan sistem hukum hanya dengan asas legalitas formal tetapi juga mencakup asas legalitas materiil atau nonformil yang mempengaruhi hubungan antara hukum dan moral serta perkembangan budaya yang sangat cepat.<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003), hal. 11.

Oleh karena itu, sebagai instansi membuat peraturan perundang-undangan tersendiri dengan membuat saksi pidana sendiri serta membentuk PPNS tersendiri, padahal dalam setiap kegiatan operasional semua instansi terdapat potensi korupsi, akan tetapi dengan pengaturan khusus dalam Undang-Undang tersendiri sering kali menjadi aturan khusus dalam Undang-Undang tersendiri sering kali menjadi tameng untuk melepaskan diri dari jeratan korupsi. Dengan demikian, dalam upaya penanggulangan kejahatan yang potensial korupsi tersebut didasarkan pada aturan formil acara pidana biasa, bukan dengan aturan formil korupsi yang *extra ordinary crime*.

Mengingat problematik sistem hukum pidana dan implikasinya terhadap penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi yang bersifat spesifik dan universal maka sebagai bahan kajian teoretikal terhadap asas hukum yang bersifat spesifik, dalam arti hanya dikenal dalam hukum pidana tertentu seperti tindak pidana korupsi terdapat beberapa asas misalnya:

- a. Asas *the binding force of presedent* atau asas *satre decisi et quieta non movere* ('tetap pada yang diputuskan, dan yang dalam keadaan istirahat tidak digerakkan'), hanya dikenal pada negara-negara yang menganut sistem hukum Eropa Daratn, dianut asas *persuasivepresedence*.
- b. Asas *nullun delictum nulla poena sine praevia lege peonale* (asas, *legalitas*, 'tidak seorang pun boleh atas suatu perbuatan, kecuali telah ada peraturan yang ditetapkan lebih dahulu'), hanya dikenal di negara-negara yang menggunakan bentuk hukum tertulis (kodifikasi).
- c. Asas *cogatitionis poenam nemo patitur* ('tidak seorang pun dapat di hukum karena apa yang dipikirkan atau

dibatinnya') hanya berlaku di negara-negara yang menganut sistem hukum sekuler. Di negara-negara yang menganut hukum islam misalnya, justru niat seseorang untuk melakukan suatu perbuatan sangat diperhatikan.

Penggunaan sanksi pidana melalui pencantuman bab tentang "ketentuan pidana" dalam suatu produk peraturan perundang-undangan pada hakikatnya dimaksudkan untuk menjamin agar produk peraturan perundang-undangan tersebut dapat ditaati dan dilaksanakan sebagaimana mestinya. Eksistensi pidana tersebut dimaksudkan untuk memperkuat berlakunya peraturan perundang-undangan.

Terhadap kebijakan rumusan tindak pidana korupsi pada suatu peraturan perundang-undangan tidak selalu konsisten, artinya kebijakan mencantumkan substansi pasal tindak pidana korupsi bukan merupakan suatu keharusan atau tidak bersifat absolute/imperative. Dengan kata lain, meskipun suatu peraturan perundang-undangan potensial dengan korupsi bukan suatu inkonsistensi jika digunakan atau delik korupsi dalam setiap produk peraturan perundang-undangan. Kebijakan penggunaan tersebut merupakan problematik hukum inkonsistensi dari sistem hukum yang mengatur perbuatan tindak pidana korupsi dan yang ada hanya tindak pidana umum atau biasa. Penggunaan sanksi pidana dalam produk peraturan perundang-undangan tersebut dengan sanksi tindak pidana biasa(*ordinary crime*).

Pengaruh pidana terhadap masyarakat luas sangat sulit diukur, pengaruh itu terdiri dari sejumlah bentuk aksi dan reaksi yang berbeda dan saling berkaitan erat, yang disebut dengan berbagai macam nama, misalnya *deterrence* (pencegahan), *general prevention* (pencegahan umum), *re-inforcement of moral values* (memperkuat kembali nilai-nilai moral), *strengthening*

*the collective colidary* (memperkuat kesadaran kolektif), *re-affirmation of the publik feeling security* (memperkuat rasa aman dari masyarakat), *allevation of fears* (mengurangi kekuatan), *release of aggressive tension* (melepaskan ketegasan-ketegasan agresif) dan lain sebagainya.

Fenomena sosial yang menonjol dalam sistem hukum pidana dalam rangka penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi, di mana transisi dan perubahan praktik sistem hukum pidana berjalan dari cara tradisional, konvensional, nasional menuju sistem hukum yang global atau transnasional. Masyarakat semakin dihadapkan dengan berbagai persoalan yang sangat kompleks dengan diikuti munculnya berbagai aturan baru dalam masyarakat secara dogmatic hukum dengan berbagai peraturan perundang-undangan pemberantasan tindak pidana korupsi (*corruption crime*) yang dalam praktik sistem hukum pidana akan menentukan atas perbuatan, sanksi pidana meliputi subsistem hukum, struktur hukum dan budaya hukum bahkan produk politik hukum dan kebijakan hukum secara yuridis formal bertentangan dengan Undang-Undang dasar 1945, hukum belum mencerminkan rasa keadilan yang diharapkan masyarakat.

Probelamatik hukum dalam praktik sistem hukum pidana pada sistem peradilan pidana korupsi diperlukan penelitian beberapa instrument hukum atau peraturan perundang-undangan yang potensial korupsi dan yang belum mengatur delik korupsi sebagai *extra ordinary crime*, tetapi hanya sebagai delik tindak pidana biasa. Hal ini mencerminkan terjadinya kesenjangan dan implementasi konsistensi hukum pidana di Indonesia atau belum ada legal spirit yang menunjukkan adanya *sense of crisis* terhadap korupsi.



## B. Korupsi dalam Konsep Hukum Formal

Undang-Undang dalam arti formil, ialah keputusan pemerintah yang memperoleh nama Undang-Undang karena bentuknya, dalam mana ia timbul.<sup>2</sup> Artinya bahwa hukum formil adalah hukum yang ditetapkan untuk mempertahankan atau melaksanakan hukum materiil. Hukum dalam arti formal ini disebut juga hukum acara.

Mengingat tindak pidana korupsi sudah merupakan *extra ordinary crime* sehingga penanggulangannya pun diperlukan cara-cara yang luar biasa, sehingga menghandalkan hukum acara (KUHP) maka penegakan hukum terhadap kejahatan korupsi tidak akan efektif. Oleh karena itu, dalam perundang-undangan tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, juga diatur tentang beberapa ketentuan acara yang diperlukan untuk lebih efektifnya penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi.

Dalam UU No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi beberapa ketentuan tentang acara pidana terhadap tindak pidana korupsi yaitu antara lain:

### 1) Pembuktian terbalik dalam proses peradilan tindak pidana korupsi

Tindak pidana korupsi yang selama ini terjadi secara sistematis dan meluas, pemberantasannya harus dilakukan dengan cara khusus, antara lain dengan cara penerapan “sistem pembuktian terbalik” yakni pembuktian yang dibebankan kepada terdakwa. Artinya terdakwa sudah dianggap telah melakukan tindak pidana korupsi kecuali yang bersangkutan mampu membuktikan

---

<sup>2</sup> IGM Nurdjana, *Sistem Hukum Pidana dan Bahaya Laten Korupsi*, hal.72.

sebaliknya. Dalam hal setiap PNS, pegawai BUMN/D atau penyelenggara negara yang berdasarkan bukti permulaan mempunyai kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilan atau sumber pendapatannya, wajib membuktikan sahnyanya kekayaan yang diperolehnya. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 pasal 37 dan 38 B.

Namun demikian sebagai konsekuensi dari sistem pembuktian terbalik tersebut, kepada terdakwa juga diberikan hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi, sehingga dengan demikian tercipta suatu keseimbangan atas pelanggaran asas praduga tak bersalah (*presuntion of innocence*) dan menyalahkan diri sendiri (*non self incrimination*) dengan perlindungan hukum yang wajib diberikan kepada tiap orang.

Peraturan dan perundang-undangan yang terkait dengan KKN dan bisnis meskipun instrumen hukum telah cukup lengkap, namun dalam penerapan hukum secara struktural dan praktikal tetap menjadi peluang dan kendala terjadinya bentuk kejahatan dimensi baru. Kasus-kasus KKN dalam praktik bisnis, yang terjadi selama ini hampir tidak dapat terdeteksi dan terselesaikan secara yuridis. Peran politik hukum pidana dalam pembentukan peraturan dan perundang-undangan baru yang memenuhi kebutuhan perkembangan KKN sangat menentukan. Pasal-pasal hukum dalam KKN dan hukum bisnis masih terjadi kamufase yang dikemas sedemikian rupa sehingga dalam penerapannya terjadi kelemahan bahkan KKN dalam praktik bisnis semakin meningkat *kronis endemis*.

## 2) Perluasan alat bukti

Perluasan alat bukti ini dimaksudkan untuk mendukung sistem pembuktian terbalik. Dalam UU No.20 Tahun 2001 menetapkan perluasan mengenai perolehan alat bukti berupa petunjuk. Menurut paragraf empat penjelasan umum UU. No.20 Tahun 2001 bahwa perluasan mengenai sumber perolehan alat bukti berupa petunjuk selain yang diperoleh dari keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa (sebagaimana diatur dalam pasal 188 ayat (2) UU No.8 Tahun 1981 tentang KUHAP), juga menurut pasal 26 A UU No.20 Tahun 2001 diperoleh dari alat bukti lain yang berupa : (1) Alat bukti berupa informasi yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan optik atau yang serupa itu, (2) Dokumen, yakni setiap rekaman data atau informasi yang dapat dilihat, dibaca dan atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apa pun selain kertas, maupun yang terekam secara elektronik, yang berupa tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, huruf, tanda, angka, atau perforasi yang memiliki makna.

## C. Korupsi dalam Konsep Hukum Materiil

Undang-Undang dalam arti materiil menurut Van Apeldorn yang diterjemahkan oleh sadino.<sup>3</sup> Adalah bahwa: "Undang-Undang dalam arti materiil ialah sesuatu keputusan pemerintah, yang mengingat isinya disebut Undang-Undang, yaitu tiap-tiap keputusan pemerintah, yang menetapkan peraturan-peraturan yang mengikat, secara umum (dengan perkataan lain, peraturan-peraturan objektif).

---

<sup>3</sup> Ibid, hal.74.

Perbuatan korupsi sebagai konsep hukum materiil berarti perbuatan yang diatur dalam perundang-undangan tentang korupsi itu sendiri atau perbuatan yang dirumuskan dalam suatu Undang-Undang yang ditetapkan oleh pemerintah yang isinya tentang perbuatan yang disebut dengan korupsi. Ada suatu kepentingan yang ingin dilindungi oleh pembuat Undang-Undang sehingga larangan terhadap perbuatan korupsi dirumuskan dalam perundang-undangan tersebut. Barang siapa yang menyalahi ketentuan dari makna yang dirumuskan dalam perundangan itu berarti telah melakukan perbuatan melawan hukum.

Sifat melawan hukum materiil menurut Schaffmeiter et, al, yang diterjemahkan oleh Sahetapy adalah bahwa melanggar atau membahayakan kepentingan hukum yang hendak dilindungi oleh pembentuk Undang-Undang dalam rumusan delik tertentu. Artinya bahwa perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana. (pasal 2 ayat (1) Undang-Undang 31 Tahun 1999). Sifat melawan hukum formal berarti: “semua bagian yang tertulis dari rumusan delik telah dipenuhi (jadi semua syarat tertulis untuk dipidana).

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ditinjau dari segi materiil muatannya membawa perubahan yang substansial, sehingga secara filosofis, sosiologis, dan yuridis diharapkan mampu memberikan daya berlaku yang kuat, dalam upaya mewujudkan penegakan supremasi hukum berdasarkan keadilan, kebenaran dan kepastian hukum. Pokok-pokok perubahan di antaranya adalah: penyebutan secara langsung

unsur-unsur yang terdapat dalam masing-masing Pasal KUHP yang diacu, penghapusan ketentuan minimum denda dan pidana penjara, pengaturan mengenai gratifikasi dan pengecualiannya, perluasan alat bukti, pembuktian terbalik, hak negara melakukan gugatan perdata dan penegasan terhadap pemberlakuan Undang-Undang korupsi sebelumnya.

Dalam perundang-undangan korupsi telah mengatur tentang upaya perlindungan keadilan sosial ekonomi bagi masyarakat. Dalam pasal 38 C UU No.20 Tahun 2002 ditentukan bahwa negara diberi hak untuk melakukan gugatan perdata terhadap terpidana dan atau ahli warisnya, dalam hal terpidana sengaja menyembunyikan atau menyamarkan kekayaan atau harta benda yang diduga atau patut diduga berasal dari tindak pidana korupsi yang belum dikenakan perampasan untuk negara, pada saat pengadilan memutuskan perkara yang memperoleh kuatan hukum tetap.

Dasar filosofi timbulnya hak negara tersebut adalah memenuhi rasa keadilan masyarakat terhadap pelaku korupsi yang menunjukkan bahwa Undang-Undang tersebut tidak hanya sebagai alat penegak keadilan hukum, tetapi juga penegak keadilan sosial ekonomi. Mengingat bahwa perbuatan korupsi adalah perbuatan yang bukan hanya merugikan keuangan dan perekonomian negara tetapi lebih dari itu menimbulkan konflik dan kesenjangan sosial. Artinya bukan semata memberi hukuman bagi yang terbukti bersalah dengan hukuman yang sebesar-besarnya, melainkan juga agar kerugian negara yang diakibatkan oleh perbuatan pelaku dapat kembali semua dalam waktu yang tidak terlalu lama.

#### D. Peraturan Perundang-undangan Tindak Pidana Korupsi Nasional

##### 1) Peraturan Perundang-undangan Korupsi dalam Perundang-undangan Nasional

Pengaturan tindak pidana korupsi yang dikenal dalam peraturan perundang-undangan saat ini, pada mulanya ditentukan sesuai dengan delik dalam peraturan penguasa perang yaitu UU No.24 Prp/1960 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 72) (Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang menjadi Undang-Undang berdasarkan UU No.1 Tahun 1961), khususnya dalam pasal 1 huruf a dan b.

Pengaturan tindak pidana korupsi dalam ketentuan tersebut di atas, kemudian dicantumkan dalam UU No.3 Tahun 1971 Pasal 1 ayat (1) sub a, b, d, dan e, sedangkan pengaturan korupsi yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) sub a UU No.3 Tahun 1971 tersebut pengaturan korupsi dirumuskan kembali dalam pasal 2 UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan beberapa perubahan redaksi, kemudian pasal 1 ayat (1) sub b UU No. 3/1971 dijabarkan kembali dalam Pasal 3 UU No.31/1999, serta pasal 1 ayat (1) sub d UU No.3/1971 dijabarkan kembali dalam pasal 13 UU No.31/1999. Pasal 1 ayat (1) sub b UU No.3/1971 dihapus karena tidak logis jika pelaku tindak pidana korupsi melaporkan perbuatannya dan dikategorikan sebagai tindak pidana tersendiri.<sup>4</sup>

a) Pengaturan tindak pidana korupsi dalam Pasal 1 sub a dan b UU No.24 Prp/1960. Sesuai dengan delik korupsi

---

<sup>4</sup> Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, (Jakarta: PT. Radjagrafindo Persada, 1984), hal. 121.

dalam UU No.24 Prp/1960 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi, sebagai berikut :

“Yang dimaksud tindak pidana korupsi ialah:

- 1) Tindakan seseorang yang dengan atau karena melakukan suatu kejahatan atau pelanggaran memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan atau perekonomian negara atau daerah atau merugikan keuangan suatu badan yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah atau badan hukum lain yang mempergunakan modal kelonggaran-kelonggaran dari negara atau masyarakat.
- 2) Perbuatan seseorang yang dengan atau karena melakukan suatu kejahatan atau pelanggaran memperkaya diri sendiri atau orang lain atau badan yang dilakukn dengan menyalahgunakan jabatan dan kedudukan.”

Masa pembuatan UU tersebut pada waktu itu masih dalam suasana negara yang baru merdeka di bawah penguasa militer, sehingga rumusan delik dalam UU tersebut masih banyak dipengaruhi oleh situasi pada waktu itu.

b) Pengaturan Tindak Pidana Korupsi dalam Pasal 1 UU No.3/1971.

Dalam Pasal 1 UU No.3/1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dijelaskan sebagai delik korupsi sebagai berikut:

“dihukum karena tindak pidana korupsi:

- (1) a. Barangsiapa dengan melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan, yang secara langsung atau tidak langsung

merugikan keuangan dan atau perekonomian negara atau diketahui atau patut disangka olehnya bahwa perbuatan tersebut merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

- b. Barangsiapa dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang secara langsung atau tidak langsung dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.
- c. Barangsiapa yang melakukan kejahatan yang tercantum dalam pasal-pasal 209, 210, 387, 388, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 423, 435 KUHP.
- d. Barangsiapa memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri seperti dimaksud pasal 2 dengan mengingat sesuatu kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatannya atau kedudukannya atau oleh si pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan itu.
- e. Barang siapa tanpa alasan yang wajar dalam waktu yang sesingkat-singkatnya setelah menerima pemberian atau janji yang diberikan kepadanya seperti tersebut dalam pasal-pasal 418, 419, dan 420 KUHP tidak melaporkan pemberian atau janji tersebut kepada yang berwajib.

(2) Barangsiapa yang melakukan percobaan atau pemufakatan untuk melakukan tindak pidana tersebut dalam ayat (1) a, b, c, d, e, Pasal ini. Kemudian pengertian korupsi dalam pasal 2 UU No. 3 Tahun 1971 dan Pasal 2 dan 3 UU No. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mencabut UU No. 3 Tahun 1971 di atas, disebutkan bawa:



- (1) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara....(Pasal 2 ayat 1)
- (2) Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara...(Pasal 3).

Unsur-unsur korupsi menurut Kurniawan et. al, adalah

- (1) Tindakan melawan hukum.
- (2) Menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan.
- (3) Merugikan negara baik secara langsung maupun tidak langsung.
- (4) Dilakukan oleh pejabat publik atau penyelenggara negara maupun masyarakat.

c) Pengaturan Tindak Pidana Korupsi dalam pasal 2 dan 3 UU No.31/1999

Pengaturan tindak pidana korupsi dalam pasal 2 ayat (1) UU No. 31/1999, yaitu bahwa “Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara...”

Menurut Andi Hamzah bahwa pasal 1 ayat (2) UU No. 31/1999 merupakan keadaan yang memperberat pidana jika tindak pidana ini dilakukan dalam “keadaan tertentu” dapat dijatuhkan pidana mati. Bagian inti (*bestanddelen*) Pasal 2 ayat (1) adalah :

- (1) Melawan Hukum
- (2) Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.
- (3) Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Unsur “Melawan hukum” dalam pasal tersebut adalah perbuatan melawan hukum baik materiil maupun formil. Perbuatan yang melawan hukum adalah perbuatan yang menyalahiapa yang telah diatur dalam ketentuan pidana tersebut. Scha Ffmeiter et, al, membagi sifat melawan hukum menjadi empat makna yaitu; a) sifat melawan hukum umum, b) sifat melawan hukum khusus, c) sifat melawan hukum formal dan, d) sifat melawan hukum materiil. Sifat melawan hukum formal berarti: “semua bagian yang tertulis dari rumusan delik telah dipenuhi (jadi semua syarat tertulis untuk dapat dipidana terpenuhi), sedangkan sifat melawan hukum materiil berarti melanggar atau membahayakan kepentingan hukum yang hendak dilindungi oleh pembentuk Undang-Undang dalam rumusan delik tertentu.

#### **E. Penjatuhan Pidana Pada Perkara Tindak Pidana Korupsi**

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, jenis penjatuhan pidana yang dapat dilakukan hakim terhadap terdakwa tindak pidana korupsi terhadap orang yang melakukan Tindak Pidana Korupsi adalah sebagai berikut:

##### **1) Pidana Mati**

Dapat dipidana mati karena kepada setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat

merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi salah satu tujuannya adalah untuk menjerat pelaku korupsi<sup>5</sup>, yang dilakukan dalam keadaan tertentu.

Pidana Mati, baik berdasarkan pasal 69 KUHP, UU PTPK maupun berdasarkan hak tertinggi manusia pidana mati adalah pidana terberat karena pelaksanaannya berupa penyerangan terhadap hak hidup manusia yang merupakan hak asasi manusia yang utama. Selain itu, tidak dapat dikoreksi atau diperbaiki eksekusi yang telah terjadi apabila dikemudian hari ditemukan kekeliruan. Untuk itu hanya perbuatan pidana yang benar-benar berat yang diancam oleh pidana mati. Dan setiap pasal yang mencantumkan pidana mati selalu disertai alternatif pidana lainnya sehingga hakim tidak disertai merta pasti menjatuhkan hukuman mati kepada pelanggar pasal yang diancam pidana mati. Misalnya pidana mati atau penjara seumur hidup atau pidana sementara paling lama 20 tahun sebagaimana tercantum dalam pasal 340 KUHP, prinsip ini juga diikuti UU lain termasuk UU PTPK.<sup>6</sup> Di dalam UU No.31 Tahun 1999 hanya terdapat tindak pidana yang diancam mati yaitu pasal 2 ayat 2. Pidana mati di sini “dapat diancam apabila tindak pidana yang diatur pada ayat 2 beserta penjelasannya. Keadaan tertentu dijelaskan dalam penjelasan pasal 2 ayat 2 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu sebagai pemberatan bagi pelaku tindak pidana korupsi apabila tindak pidana tersebut dilakukan

---

<sup>5</sup> Mahrus Ali, *Hukum Pidana Korupsi Di Indonesia*, (Yogyakarta: UII Press, 2011), hal.198.

<sup>6</sup> Efi Laila Kholis, *Pembayaran Uang Pengganti dalam Perkara Korupsi*, (Jakarta: Penerbit Solusi Publishing, 2010), hal.7.

pada waktu negara dalam keadaan bahaya sesuai dengan UU yang berlaku, pada waktu terjadi bencana nasional, sebagai pengulangan tindak pidana korupsi, atau pada waktu negara dalam keadaan krisis ekonomi atau moneter.

## 2) Pidana Penjara

Pidana Penjara, merupakan perampasan kemerdekaan yang merupakan hak dasar diambil secara paksa. Mereka tidak bebas pergi ke mana saja dan tidak dapat berpartisipasi dalam kehidupan sosial sesuai yang ia kehendaki. Namun, waktu pembedaannya dipergunakan demi kepentingan *reclassering* (Pemasyarakatan atau pembinaan). Pengaturan pidana penjara menurut KUHP adalah sebagai berikut:

- a. Pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) bagi setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara. (Pasal 2 ayat 1).
- b. Pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak satu Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) bagi setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara (Pasal 3).

- c. Pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta) bagi setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintangi atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka atau terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi (Pasal 21).
- d. Pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) bagi setiap orang sebagaimana dimaksud dalam pasal 28, pasal 29, pasal 35, dan pasal 36.

Semua tindak pidana yang diatur dalam UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, diancam dengan pidana penjara baik penjara seumur hidup maupun sementara. Pidana penjara seumur hidup terdapat dalam pasal 2 ayat 1,3,12, 12B ayat 2. Pidana penjara sementara diancam dengan batas maksimum dan batas minimum. Batas minimum ditentukan dalam pasal- pasal dalam UU ini sebagai salah satu upaya dalam rangka mencapai tujuan yang lebih efektif untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi. Pidana penjara sementara berkisar antara 1 tahun hingga 20 tahun. Pidana 20 tahun sebagai alternatif penjara seumur hidup.<sup>7</sup>

### 3) Pidana Tambahan

- a. Perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan

<sup>7</sup> Ibid, hal.7-9.

untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut.

- b. Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta yang diperoleh dari tindak pidana korupsi.
- c. Penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun.
- d. Pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu yang telah atau dapat diberikan oleh pemerintah kepada terpidana.<sup>8</sup>
- e. Jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.
- f. Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka terpidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak memenuhi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> Evi Hartantai, *Tindak Pidana Korupsi*, (Jakarta: Penerbit Sinar Grafika, 2008), hal. 14-15.

<sup>9</sup> AgustHurtabarat, *tentang pemberantasan tindak pidana korupsi*, dalam <http://agusthurtabarat.wordpress.com/2009/11/06/tindak-pidana-korupsi-di-indonesia-tinjauan-uu-no-31-tahun-1999-jo-uu-no-20-tahun-2001>



## **BAB VI**

# **KONSEP DAN HUKUMAN KORUPSI DALAM PERSPEKTIF ALQURAN**

### **A. Konsep Hukum Pidana Islam**

HUKUM PIDANA Islam dalam istilah *fiqh* disebut dengan jinayah. Jinayah adalah bentuk verbal noun dari kata *jana*. Secara etimologi *jana* berarti berbuat dosa atau salah, sedangkan jinayah dimaknai sebagai sebuah tindakan dosa atau tindakan salah. Para pakar hukum Islam mengartikan jinayah secara terminologis sebagai perbuatan yang terlarang menurut syara', karena dapat mengancam keselamatan jiwa, harta, keturunan dan akal manusia. Dari pengertian ini dapat disimpulkan bahwa istilah *fiqh jinayah* sama dengan hukum pidana Islam.

Para pakar hukum Islam pada umumnya membagi jarimah berdasarkan aspek berat dan ringannya hukuman serta ditegaskan atau tidaknya oleh Alquran ataupun Hadis, yaitu:

#### **a. Jarimah Hudud**

Jarimah hudud adalah perbuatan melanggar hukum yang jenis dan ancaman hukumannya ditentukan dan dibatasi oleh nash. Ketentuan dan pembatasan hukuman

yang dimaksud tidak memiliki batas terendah dan tertinggi dan tidak dapat dihapuskan oleh perorangan atau penguasa. Kategori hukuman jarimah hudud seperti zina (*al-zina*); menuduh berzina (*qazi*); korupsi berat dengan anak cucunya seperti pencurian (*al-sariqah*), perampokan atau penyamunan (*hirabah*), transaksi penyelundupan, transaksi penggelapan milik lembaga, kesepakatan mengalirkan uang ke rekening pribadi dan menyalahgunakan dana; pemberontakan (*al-baghy*), minum-minuman keras dan kemudian murtad (*riddah*).

#### b. Jarimah Qisas Diyat

Jarimah qisas diyat adalah suatu tindakan kejahatan yang diancam dengan hukuman qisas dan diyat. Hukuman qisas maupun diyat adalah hukuman yang tidak ada batas terendah dan tertingginya, tetapi menjadi hak perorangan (si korban dan walinya). Adapun jarimah kategori qisas dan diyat antara lain; a) pembunuhan sengaja; b) pembunuhan semi sengaja; c) pembunuhan keliru; d) penganiayaan sengaja; dan e) penganiayaan salah.

#### c. Jarimah Ta'zir

Adapun jarimah adalah pelanggaran atau kejahatan yang diberi sanksi hukuman ta'zir, yaitu hukuman selain had dan qisas diyat. Penerapan hukuman ta'zir baik yang ditentukan oleh nash atau tidak, baik perbuatan itu menyangkut hak Allah atau hak manusia, hukumannya sepenuhnya diserahkan kepada penguasa. Dan satu lagi adalah batasan ukuran atau kadar tinggi dan rendahnya hukuman jarimah ta'zir diserahkan kepada penguasa. Dengan demikian syar'i mendelegasikan kepada hakim untuk menentukan format hukuman kepada pelaku jarimah.<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Anwar Harjono, *Hukum Islam: Keluasan dan Keadilannya*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1968), hal.159.



Perlu diketahui bahwa maksud utama penerapan sanksi ta'zir adalah sebagai preventif dan represif serta kuratif dan edukatif. Atas dasar ini sanksi ta'zir tidak boleh membawa kehancuran. Yang dimaksud dengan fungsi preventif adalah bahwa sanksi ta'zir harus memberikan dampak positif bagi orang yang tidak dikenai hukuman ta'zir, sehingga mereka tidak berniat melakukan tindakan yang sama. Sedangkan fungsi represif adalah bahwa sanksi ta'zir dapat memberikan dampak positif bagi si terhukum, sehingga ia jera berbuat jahat. Oleh karena itu, sanksi ta'zir dengan kedua fungsi tersebut harus sesuai dengan keperluan, tidak lebih dan tidak kurang dengan menerapkan prinsip keadilan Tuhan.

#### d. Jarimah Mukhalafah

Dr. Abdurrahman al-Maliki memisahkan kasus mukhalafah (pelanggaran) dari ta'zir. Pemisahan ini tentunya berbeda dengan sebagian besar fukaha yang memasukkan mukhalafah dalam bab ta'zir. Menurut beliau, fakta mukhalafah berbeda dengan ta'zir. Oleh karenaitu, mukhalafah berdiri sendiri dan terpisah dari ta'zir. Menurut beliau, mukhalafah adalah tidak menaati ketetapan yang dikeluarkan oleh pemerintah, baik yang berwujud larangan maupun perintah.

Adanya pembagian keempat hukuman tersebut merupakan acuan yang tepat untuk dapat menjerat pelaku korupsi yang juga terdiri dari berbagai ragam tipologi yang hukumannya tentu berbeda antara satu dengan yang lainnya. Misalnya, sanksi tipe korupsi pencurian akan sangat berbeda dengan sanksi tipe korupsi perampokan. Begitu juga sanksi tipe korupsi suap dan kolusi akan berbeda dengan hukuman tipe korupsi penggelapan dan penipuan. Sampai melebihi batas maksimal, suatu waktu hukuman jarimah korupsi akan setingkat dengan hukuman qisas dan diyat.

Dasar hukum asas legalitas pidana Islam yang bersumber dari metodologi hukum Islam adalah sebagai berikut:

- a. *Ijma'* (konsensus), yakni kesepakatan para mujtahid sesudah Nabi Muhammad saw, tentang hukum atau suatu kasus tertentu.
- b. *Qiyas* (analogi), yakni perluasan hukum yang telah disebutkan dalam Alquran dan hadis sehingga mencakup juga kasus yang serupa yang pada aslinya tidak disebutkan dalam kedua sumber hukum dimaksud ada kesamaan illat (*causa legis*) di antara kasus tersebut.
- c. *Istihsan* (penilaian baik, pilihan, preference), metode istihsan adalah suatu metode yang digunakan untuk menetapkan hukum suatu masalah dengan cara berpaling dari ketentuan hukum yang ada kepada ketentuan hukum yang lain, karena adanya pertimbangan yang lebih utama yang menghendaki.
- d. *Maslahah Mursalah* (kemaslahatan atau kepentingan umum, publik interest), yakni istilah ini dimaksudkan segala kepentingan yang bermanfaat dan baik, namun tidak ada nash yang mendukungnya secara langsung ataupun yang melarangnya. Dengan kata lain, masalah mursalah adalah segala kepentingan yang baik yang tidak dilarang Alquran dan sunah, dan juga tidak terdapat penegasannya secara eksplisit didalam kedua sumber tersebut.
- e. *'Urf* (adat, kebiasaan), yakni suatu kebiasaan masyarakat yang diakui oleh jiwa kolektif dan diterima oleh akal sehat baik berupa perkataan ataupun perbuatan sejauh tidak bertentangan dengan nash atau *ijma'*. Hukum Islam mengakui adat-istiadat masyarakat sebagai sumber hukum dengan beberapa persyaratan, yakni adat tersebut

tidak bertentangan dengan nash dan adat itu konstan dan berlaku umum dikalangan masyarakat. Dari prinsip adat inilah kemudian dilahirkan beberapa kaidah hukum Islam.

- f. Istishab (mengikuti ketentuan/ aturan yang sudah berlaku sebelum ketentuan baru), yakni kelangsungan status hukum suatu hal dimasa lalu pada masa kini dan masa depan sejauh belum ada perubahan terhadap status hukum tersebut.
- g. Sadd al-zari'ah (tindakan preventif), merupakan tindakan preventif dengan melarang suatu perbuatan yang menurut hukum syar'i sebenarnya diperbolehkan, namun dilarang karena perbuatan tersebut dapat membawa kepada mudarat. Para ahli ushul fiqh mendefinisikan sadd al-zariah sebagai pencegah perbuatan-perbuatan yang mengakibatkan kerugian yang secara eksplisit dinyatakan oleh nash Alquran dan sunah (muktabarah), meskipun semula perbuatan-perbuatan tersebut mengandung maslahat.
- h. Syar'un man qablana, yakni ketentuan hukum yang dibawa oleh para nabi sebelum Nabi Muhammad saw. Maksudnya, dalam konteks hukum Islam hal ini adalah aturan-aturan hukum agama terdahulu yang disebutkan didalam Alquran atau sunah sebagai suatu cerita mengenai nabi-nabi terdahulu, bukan sebagai persyariat hukum.
- i. Mazhab al-Sahabi (pendapat para sahabat), yakni pendirian seorang sahabat mengenai suatu masalah hukum ijihadnya, baik yang tercermin dalam fatwanya maupun dalam keputusannya yang menyangkut masalah di mana tidak terdapat penegasan dalam Alquran, hadis nabi, maupun dalam ijma'.<sup>2</sup>

<sup>2</sup> Hakim Muda Harahap, *Ayat-ayat Korupsi*, hal. 140-141.

## B. Prinsip-prinsip Keadilan

Salah satu hal terpenting yang harus ditegakkan dalam penegakan hukum Islam adalah memutuskan perkara berdasarkan prinsip keadilan dan persamaan terhadap siapa pun. Karena nasib para terdakwa sepenuhnya terletak ditangan penyelenggaraan keadilan. Apabila seorang penegak hukum tidak memiliki moralitas dan integrasi yang tinggi, maka ia akan memutuskan perkara sesuai dengan pertimbangan hawa nafsu, pribadi maupun kelompok, sehingga keputusan yang diambil merugikan salah satu pihak yang berperkara. Oleh karena itu, moralitas utama seorang penegak hukum pidana Islam harus dibangun di atas prinsip-prinsip keadilan. Alquran dalam surat al-Nisa ayat 58 telah menetapkan garis hukum.

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerinya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat” (Q.S.al-nisa:58).<sup>3</sup>

Tolak ukur keadilan dalam Alquran adalah kebenaran yang mendapat dukungan umat. Oleh karena itu, keadilan

<sup>3</sup> Ahmad Hatta, *Tafsir Qur'an Per Kata*, (Jakarta: Maghfirah Pustaka, 2009), .hal.87.

harus dihayati sebagai kesadaran, pengertian, perasaan, perilaku dan tujuan bersama. Keterkaitan keadilan dan kebenaran dengan umat mempunyai implikasi terhadap perlunya kekuatan dan kekuasaan. Maka tanpa ada kekuatan yang disimbolkan dengan besi, keadilan dan kebenaran tidak akan dapat ditegakkan secara optimal.

Bertolak dari konsep yang berakar dari kesadaran tentang Tuhan Yang MahaAdil, maka keadilan dalam Alquran berimplikasi terhadap tanggung jawab moral. Tanggung jawab moral ini terkait dengan kebebasan manusia memilih dan memilah berbagai keputusan dalam hidupnya. Yang nantinya harus dipertanggungjawabkan dihadapan-Nya sampai hari keadilan tiba. Dalam hubungannya dengan implikasi keadilan maka tanggungjawab moral itu meliputi:

#### a) Keadilan Hukum

Keadilan hukum adalah menetapkan secara formal semua orang sama dihadapan hukum. Martabat dan kehormatan manusia dalam pandangan Alquran adalah anugerah Allah. Oleh karena itu, tidak ada satu kekuatan pun yang dapat merusakkan dan menghancurkannya, kecuali dengan ketentuan Allah. Keadilan adalah prinsip melekat dalam esensi hukum. Keadilan adalah watak intrinsik hukum. Dalam bidang hukum pidana, asas keberimbangan terlihat pada sanksi yang diberikan kepada pelaku kejahatan. Semakin tinggi kualitas kejahatan, semakin tinggi sanksi yang diberikan, dan semakin tinggi status sosial dan kedudukan seseorang dalam masyarakat, semakin berat hukuman yang dijatuhkan. Sementara dalam bidang hukum perdata, juga berlaku prinsip keadilan berimbang. Perbandingan dan perbedaan porsi bagi ahli waris sebagaimana yang telah ditentukan oleh Alquran, adalah disesuaikan dengan

pertimbangan tanggungjawab yang disebabkan antara laki-laki dan perempuan. Di sini tampak bahwa keadilan adalah menempatkan sesuatu pada tempat semestinya.

#### b) Keadilan Sosial

Keadilan sosial menekankan persamaan manusia (egalitari-anisme) dan menghindarkan segala macam bentuk kepincangan sosial yang berpangkal dari kepincangan ekonomi. Kepincangan ekonomi terlihat dari kerakusan para penguasa terhadap kekayaan negara yang bukan haknya. Kekayaan negara yang seharusnya dialirkan dan digunakan untuk rakyat, dikorupsi dan dimonopoli sendiri, tanpa memperhatikan nasib rakyat. Akibatnya banyak rakyat berkubang dalam kemiskinan dan kebodohan.

### C. Hukuman Korupsi dalam Alquran

Allah menetapkan hukuman bagi koruptor yang terkandung didalam Alquran, berdasarkan prinsip-prinsip hukum pidana Islam, baik yang kontemporer maupun klasik. Dari hasil penelusuran ini, akan terlihat jelas berapa macam bentuk hukum yang akan dijatuhkan kepada koruptor secara objektif;

#### 1. Korupsi Dalam Batas Hudud

Setiap orang yang terbukti melakukan tindak pidana jenis ini, akan dihukum sesuai dengan ketetapan Alquran dan sunah.<sup>4</sup> Bentuk korupsi dalam batas wilayah jarimah hudud terdiri dari dua bentuk, yaitu: pencurian dan perampokan.

##### a. Korupsi Pencurian

Bentuk hukuman jarimah korupsi pencurian dapat diterapkan sesuai dengan apa yang disebutkan di dalam

<sup>4</sup> Anwar Harjono, *Hukum Islam Keluasan dan Keadilannya*, hal. 161-194.

Alquran surat Al-Maidah ayat 38 adalah penerapan hukum potong tangan dan penyitaan harta curian. Hukum potong tangan tidak berlaku bagi orang tua yang mencuri harta anaknya, pembantu mencuri harta tuannya dan pencuri dimusim paceklik. Adapun mengenai mengganti hukum potong tangan dengan hukum penjara dalam konteks negara sekuler, bukanlah merupakan keputusan yang bertentangan dengan syariat Islam. Hal ini didukung oleh fakta sejarah yang tidak selamanya menafsirkan qat'I al-yad memotong tangan bagi pencuri, juga terdapat penafsiran memotong kemampuan, kekuasaan atau kemerdekaan. Hukum penjara dibenarkan syara', bila dinilai lebih efektif dan mampu menjerakan pencuri sekaligus mendidik bagi masyarakat umum untuk tidak berbuat jahat.

#### b. Korupsi Perampokan

Bentuk hukuman bagi pelaku perampokan berbeda-beda berdasarkan cara pandangan terhadap surat Al-Maidah ayat 33.

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِّنْ خَلْفٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ

Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik, atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka didunia, dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar.<sup>5</sup>

<sup>5</sup> Ahmad Hatta, *Tafsir Qur'an Per Kata*, (Jakarta: Maghfirah Pustaka, 2009), hal.87.

Muhammad Syahrur dalam memahami ayat di atas memaparkan bahwa secara global ada tiga bentuk pilihan hukuman yang dapat diterapkan bagi muharib, yaitu hukuman mati, potong tangan dan kaki dan penjara seumur hidup. Ketiga bentuk hukuman ini merupakan batas maksimal. Artinya, penguasa (hakim) tidak dapat menetapkan dan memutuskan diluar wilayah tiga hukuman tersebut. Penguasa hanya boleh berijtihad didalam salah satu tiga hukuman tersebut, yakni hukuman mati, potong tangan atau penjara seumur hidup sesuai kadar perbuatan masing-masing pelaku. Kemudian semua hukuman bisa digugurkan bila pelaku bertaubat kepada Allah dan memohon maaf kepada korban perampokan sebelum sampai kehadiran sidang pengadilan.

## 2. Korupsi Dalam Batas Ta'zir

Seperti telah dijelaskan dimuka, bahwa setiap kejahatan yang telah ditentukan sanksinya oleh Alquran maupun sunah disebut sebagai jarimah hudud. Sedangkan jarimah yang tidak ditentukan sanksinya oleh nash disebut dengan jarimah ta'zir. Jenis hukuman bagi pelaku ta'zir dapat ditentukan oleh pemerintah berdasarkan kemaslahatan umum. Beberapa jenis hukuman yang dapat dijatuhkan kepada pelaku ini berdasarkan aturan hukum Islam adalah hukuman mati, hukman jilid, hukuman penjara, dipecat dari jabatan, diumumkan kesalahannya dan diancam masuk neraka.

Seperti kasus korupsi uang suap/pelicin (al-Suhtu), Allah menegur keras orang-orang yang melakukannya, yang terdapat dalam surat Al-Maidah ayat 62. Korupsi kerakusan dalam garis besar, unsur-unsur kejahatan dalam delik ini adalah penyalahgunaan wewenang, perminaan memaksa



dan pemerasan. Berpijak pada unsur-unsur tersebut, maka perbuatan yang masuk dalam kategori ini seperti perampasan harta (*gasab*) dan penghianatan (*gulul*). Hukuman bagi korupsi perampasan atau pemerasan telah dijelaskan dalam Alquran surat Al-Kahfi ayat 79 dan bagi korupsi penghianatan hukumannya dijelaskan dalam surat Ali Imron ayat 161.

وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَغُلَّ ۚ وَمَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ  
الْقِيَمَةِ ۚ ثُمَّ تُوَفَّىٰ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا  
يُظْلَمُونَ

Tidak mungkin seorang Nabi berkhianat dalam urusan harta rampasan perang. Barangsiapa yang berkhianat dalam urusan rampasan perang itu, Maka pada hari kiamat ia akan datang membawa apa yang dikhianatkannya itu, kemudian tiap-tiap diri akan diberi pembalasan tentang apa yang ia kerjakan dengan (pembalasan) setimpal, sedang mereka tidak dianiaya.<sup>6</sup>

### 3. Korupsi dalam batas mukhalafah

Hukuman korupsi dalam batas jarimah mukhalafah adalah hukuman yang diberikan kepada pegawai negeri atau seseorang yang melakukan kurang disiplin atau pelanggaran terhadap peraturan-peraturan pemerintah.<sup>7</sup> Seperti bagi seorang pegawai negeri, pegawai negeri sebagaimana dipahami harus memenuhi sekian kewajiban kepegawaiannya seumpama mengangkat sumpah jabatan, menyimpan rahasia jabatan, menjaga keamanan rahasia jabatan, menyimpan surat-surat rahasia, menaati jam kerja masuk, dan larangan menerima hadiah saat menjabat. Jika kewajiban-kewajiban ini dilanggar oleh seorang pegawai

<sup>6</sup> Ahmad Hatta, *Tafsir Qur'an Per Kata*, (Jakarta: Magfirah Pustaka, 2009)

<sup>7</sup> Hakim Muda Harahap, *Ayat-ayat Korupsi*, hal. 161.

negeri, maka ia telah dianggap melakukan korupsi dalam batas jarimah mukhalafah. Pelaku dapat dikenai sanksi yang tidak bisa diancam dengan hukuman penjara tetapi hanya dapat dihukum dengan membayar denda, peringatan keras, atau dipecat dari kepegawaiannya.

Sanksi terhadap aparatur pemerintah yang menyelewengkan kekuasaannya dengan melakukan perilaku nepotisme yang menunjuk secara tidak sah terhadap teman atau sanak saudara untuk memegang jabatan, atau tindakan yang memberikan perlakuan khusus, dalam bentuk uang atau bentuk lain kepada mereka yang dianggap bertentangan dengan norma dan peraturan pemerintah yang berlaku. Semua perbuatan tersebut dapat dikenai sanksi pelanggaran seperti pernyataan keras, dicela, dinasehati, dan dipecat dari jabatan.



## BAB VII PENUTUP

DARI PEMBAHASAN yang telah dipaparkan di depan, penulis dapat mendiskripsikan. Bahwa korupsi begitu luas dan sudah menjadi kegiatan formal dalam pemerintahan kalangan elit atas sampai kehidupan lokal masyarakat, misalnya kasus tentang kolusi, nepotisme, penghianatan, penipuan, berbuat curang, pencurian perampokan, perampasan harta, dan penggelapan. Artinya terdapat kesamaan unsur korupsi dengan unsur-unsur tersebut. Bahwa unsur korupsi yang *pertama*, koruptor itu bisa berasal dari kalangan pemerintah (pegawai negeri), swasta (pengusaha elit), perseorangan maupun dari kalangan politisi itu sendiri. Unsur *kedua*, koruptor melakukan korupsi untuk memperkaya diri sendiri, orang dekat atau orang yang memang menjadi kawan dalam tindak korupsi. Unsur *ketiga*, bahwa korupsi telah dianggap bertentangan dengan nilai-nilai agama dan hukum Negara. Unsur *keempat*, bahwa tindak korupsi dapat merugikan orang lain. Dari ke empat unsur tersebut merupakan pandangan sosial yang meresahkan kehidupan.

Meluasnya praktik korupsi di suatu negara akan memperburuk kondisi ekonomi bangsa, misalnya harga barang menjadi mahal dengan kualitas yang buruk, akses

rakyat terhadap pendidikan dan kesehatan menjadi sulit, keamanan suatu negara terancam, kerusakan lingkungan hidup, dan citra pemerintah yang buruk di mata internasional sehingga menggoyahkan sendi-sendi kepercayaan pemilik modal asing, krisis ekonomi yang berkepanjangan, dan Negara pun menjadi semakin terperosok dalam kemiskinan. Berdasarkan Laporan Bank Dunia, Indonesia dikategorikan sebagai negara yang utangnya parah, berpenghasilan rendah (*severely indebted low income country*) dan termasuk dalam kategori negara-negara termiskin di dunia seperti Mali dan Ethiopia. Sehingga perlu adanya sebuah pemberantasan yang riil dalam memerangi pesatnya korupsi yang telah menjadi aspek dalam kehidupan masyarakat dan Negara khususnya.

Persoalan korupsi tidak bisa lepas dari persoalan hukum, karena ia tidak hanya status pelanggaran, tetapi juga telah lama beralih menjadi sebuah kejahatan yang terorganisasi yang harus dicegah. Oleh karena itu, sudah ternasuk dalam persoalan wilayah hukum pidana, maka sudah tiba saatnya hukum pidana di Indonesia ditegakkan. Hal ini sebagai upaya untuk memberantas tidak korupsi yang telah menjadi kegiatan yang sangat merugikan orang lain.

Alquran sudah begitu jelas memasukkan korupsi sebagai bagian tindak pidana kejahatan, maka dari itu umat Islam khususnya dan masyarakat pada umumnya harus mau bekerja sama untuk membantu pemerintah dalam mencegah dan memberantas tidak pidana korupsi. Karena kerusakan akibat korupsi tidak hanya berimbas pada pelaku dan korban, akan tetapi juga berimbas pada rapuhnya sistem pelayanan publik mulai dari pelayanan pendidikan, kesehatan, dan keamanan yang jauh di bawah standar.



## DAFTAR PUSTAKA

- A, Hamzah, *Korupsi Dalam Pengolaan Proyek Pembangunan* (Jakarta: CV. Akademi Prasindo, 1984)
- al-Barry, Dahlan dan Pius A Partanto. *Kamus Ilmiah Populer*(Surabaya: Arkola, 2010)
- Arief,Barda Nawawi, *Kapita Selektta Hukum Pidana*(Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003)
- BAPPENAS RI, *Publik Good Governance: SebuahPaparan Singkat* (Jakarta: Bappenas, 2002)
- Chazawi,Adami, *Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia* (Malang: Bayumedia Publising, 2003)
- Djamin, Awaludin, *Pendayagunaan Aparatur Negara RI dalam era Reformasi*, (Jakarta: Yayasan Brata Bhakti Polri, 1999)
- Hamzah, Andi, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional* (Jakarta: PT. Radjagrafindo Persada, 1984)
- Harjono, Anwar,*Hukum Islam:Keluasan dan Keadilannya* (Jakarta: Bulan Bintang, 1968)
- Hartantai, Evi.*Tindak Pidana Korupsi* (Jakarta: Penerbit Sinar Grafika, 2008)

Hatta, Ahmad, *Tafsir Qur'an Per Kata* (Jakarta: Maghfirah Pustaka, 2009)

<http://dangse.wordpress.com/2009/01/17/sejarah-pemberantasan-korupsi-di-indonesia/>

Hutabarat agust, Tindak Pidana Korupsi di Indonesia, dalam <http://agusthutabarat.wordpress.com/2009/11/06/tindak-pidana-korupsi-di-indonesia-tinjauan-uu-no-31-tahun-1999-jo-uu-no-20-tahun-2001-tentang-pemberantasan-tindak-pidana-korupsi/>

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), *Memahami Untuk Membasmi* (Jakarta: Selatan MPRCons Indonesia, 2006)

Kompas, *Jihat Melawan Korupsi* (Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2005)

Laila Kholis, Efi, *Pembayaran Uang Pengganti dalam Perkara Korupsi* (Jakarta: Penerbit Solusi Publishing, 2010)

Ludy Prima Johansyah, Nico Andriianto, *Korupsi di Daerah Modus Operandi dan Peta Jalan Pencegahannya* (Surabaya: CV. Putra Media Nusantara, 2010)

LukiDjani, Danang Widoyoko, DKK, *Saatnya Warga Melawan Korupsi Citizen Report Card Untuk Pendidikan* (Jakarta: Indonesia Corruption Watch, 2006)

M.W, Kusumah, *Tegaknya Supermasi Hukum*(Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2001)

Majelis Tarjihdan Tajdid PP Muhammadiyah, *Fikih Anti-korupsi* (Jakarta: PusatStudi Agama dan Peradaban, 2006)

Martono, Nanang, *Sosiologi Perubahan Sosial* (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2011)

Maunah,Binti, *Ilmu Pendidikan* (Yogyakarta: Teras, 2009)

- Muda Harahap, Hakim, *Ayat-Ayat Korupsi* (Yogyakarta: Gama Media, 2009)
- Mulyasa, *Manajemen Pendidikan Karakter* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2011)
- Muslim, Mahmudin, *Jalan Panjang Menuju KPTPK* (Jakarta: Gerakan Rakyat Anti-korupsi Indonesia)
- Nurdjana, IGM, *Sistem Hukum Pidana Dan Bahaya Laten Korupsi* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010)
- Nusantara Maulan, *Sejarah Korupsi di Indonesia*, dalam <http://maulanusantara.wordpress.com/2009/12/09/sejarah-korupsi-di-indonesia/>
- Robert Klitgaard, Ronald Maclean-Abaroa, dan Lindsey Parris, *Penuntut Pemberantas Korupsi dalam Pemerintah Daerah* (Jakarta: DeaGrafi, 2002)
- Rosidin, *Pendidikan Karakter Pesantren* (Malang: LiteraUlul Albab, 2013)
- Setyawati, Deni, *KPK Pemburu Koruptor* (Yogyakarta: Pustaka Timur, 2008)
- Shaddiliy, Hassan, Jhon M. Echols, *Kamus Inggris-Indonesia* (Jakarta: PT.Gramedia, 1996)
- Shapiro, Ian, *Asas Moral dalam Politik* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2006)
- Singgih, *Dunia pun Memerangi Korupsi* (Jakarta: Pusat Studi Hukum Bisnis, 2002)
- Siswono, Dwi, *Ilmu Pendidikan* (Yogyakarta: UNY Press, 2007)
- Soesilo, *Korupsi Refleksi Zaman Edan* (Malang: Yayasan Yusula, 2008)

- Soyomukti, Nurani, *Teori-Teori Pendidikan* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media Group, 2010)
- Sugiono, Dendi, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008)
- Supardi, Endang, *Kewirausahaan SMK: Kiat Mengembangkan Sikap Mandiri* (Bandung: Direktorat Pendidikan Menengah Kejuruan, Pendidikan Dasardan Menengah, Departemen Pendidikan Nasional, 2004)
- Suwaro, Wiji, *Dasar-dasar Ilmu Penddidikan* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2006)
- Tim Editor Kompas, “belajar dari cina”, *Dalam Buku Surga Para Koruptor* (Jakarta: Kompas, 2004)
- Tim Penulis, *Pendidikan Anti-korupsi Untuk Perguruan Tinggi* (Jakarta: Kemen dikbud, 2011)
- W. Pranoto, Suhartono, *Bandit Berdasi Korupsi Berjamaah Merangkai hasil Kejahatan Pasca-Reformasi* (Yogyakarta: IMPULSE (Instute for Multiculturalism and Pluralism Studies, 2008)
- WA, Bongar, *Pengantar Tentang Krimonologi* (Jakarta: PT. Pembangunan Alike Indonesia, 1981)
- Wibowo, Agus, *Pendidikan Anti Korupsi di Sekolah* (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2013)
- Wijayanto dan Ridwan Zachrie, *Korupsi Mengorupsi Indonesia Prespektif Hukum Pemberantasan Korupsi Di Indonesia* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2009)
- Zainuddin, *PemikiranPolitik Islam* (Jakarta: Grafika Indah, 2004)



## TENTANG PENULIS



**Dr. St. Halimang, M.HI.** Lahir di Bontoramba /19 Mei 1963, Anak dari Pabeta Daeng Murung. Suami dari Dr. H. Muh. Daming K, M.A.g. Cukup banyak memberikan kontribusi dalam keilmuan Islam.

Lulusan Pendidikan antara lain SD Bontoramba tahun 1973, PGA 4 tahun Jeneponto tahun 1977, PGAN 6 tahun Jeneponto tahun 1979, Sarjana (S1) Fakultas Adab Jurusan Sejarah dan Kebudayaan Islam pada IAIN Alauddin Makassar, 1986, Pascasarjana (S2) Syariah Hukum Islam pada UIN Alauddin Makassar tahun 2009. Pascasarjana (S3) Syariah Hukum Islam pada UIN Alauddin Makassar tahun 2015, Pekerjaan yang ditekuni PNS dosen pada IAIN Kendari sultra dan Jabatan/pangkat Lektor Kepala/Pembina utama Muda / IV/c pengalaman Organisasi Pengurus Wilayah Aisyiyah.

Karya Tulis atau buku yang sudah trebit antara lain: Sejarah dan Peradaban Islam, Sejarah Islam Regional, Akhlak Tasawuf, Sejarah Peradilan Islam, Ijtihad Umar ibn al-Khattab dan Peluang Implementasinya di negara hokum Indonesia.

Penelitian ilmiah ialah: Kawin lari di Kab. Jeneponto suatu tinjauan Sosio Kultural, Kiprah Politik Perempuan Perspektif Hukum Islam, Perkembangan Islam di Sulawesi Tenggara (laporan Hasil Penelitian 2003), Ijtihad Umar bin Khattab bidang Ekonomi dan Implementasinya di Indonesia (laporan Hasil Penelitian 2013), Abdullah bin Saba' Suatu Refleksi Prototipe Propokator, Paradigma Pendidikan Multi Kultural, Teori dan Aplikasi Maqashid al-Syari'ah (jurnal), Hukum Ta'ziah dan Permasalahannya, Kepemimpinan Perempuan (Metode Maudhu'i dalam Perspektif Hadis (Jurnal al-'Adl), Transformasi Hukum Islam dalam Qanun al-Duali dan Qanun al-Dusturi (Jurnal al-'Adl), Pendekatan 'illat Hukum dalam Penalaran Fikih (Jurnal al-'Adl), Wawasan Gender dalam Perundang-undangan Perkawinan di Indonesia (Jurnal al-'Adl), Salat dan Kesehatan perspektif hukum Islam (Jurnal Zawiyah), Perspektif Maqasid al-Syariah terhadap Undang-undang RI Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dan Pornoaksi. Islam Kontrasepsi dan Keluarga Sejahtera, *Constitution of Pornography in RI Number 44 in 2008 Perspective Maqashid Al-Syariah. Delayed Mahar: The Perspective of Islamic and Customary Law.*



**PENDIDIKAN  
ANTI KORUPSI**  
Pendekatan Hukum di Indonesia



Pendidikan adalah proses di mana suatu bangsa mempersiapkan generasi mudanya untuk meneruskan tujuan pendidikan. Pada hakikatnya, pendidikan merupakan daya upaya untuk mengasah budi pekerti, intelektual, dan jasmani. Artinya, pendidikan menuntut segala kekuatan kodrat yang ada pada diri seseorang agar mereka sebagai manusia sekaligus anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya (*insan kamil*).

Tindak pidana korupsi adalah perbuatan-perbuatan yang melawan hukum, selain itu juga merugikan ekonomi, keuangan negara, serta menghambat terealisasinya pendidikan. Al-Qur'an (QS. An-Nisa': 58) sudah begitu jelas memasukkan korupsi sebagai bagian tindak pidana kejahatan, maka dari itu umat Islam khususnya dan masyarakat pada umumnya harus mau bekerja sama untuk membantu pemerintah dalam mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi.

Buku ini diharapkan mampu dijadikan sebagai bahan refleksi terhadap realitas yang terjadi dengan beberapa gambaran kesenjangan yang meresahkan kehidupan. Dengan menawarkan prinsip serta nilai kejujuran, kedisiplinan, dan tanggung jawab.